



**Dokumen Rapat Kerja Nasional  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 1999**

**D99**

**Direktorat  
Kebudayaan**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
1999**

353.8 DEP d

**DOKUMEN RAPAT KERJA NASIONAL  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1999**





**DOKUMEN RAPAT KERJA NASIONAL  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1999**

**TENTANG  
HASIL NOTULA/ANALISIS PERSIDANGAN**

**Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
1999**



## KATA PENGANTAR

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei sampai dengan 19 Mei 1999 di Pusdiklat Pegawai, Sawangan, Bogor, telah menghasilkan rumusan Kebijakan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas Kebijaksanaan Umum Tahun 1999, Kebijaksanaan Pelaksanaan Tahun 1999/2000, dan Kebijaksanaan Awal Perencanaan Tahun 2000/2001. Kebijaksanaan tersebut telah ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/U/1999, tanggal 1 September 1999.

Perumusan Kebijaksanaan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 ini ditempuh melalui evaluasi pelaksanaan program lima tahun Repelita VI dan perumusan usulan rencana program tahun 1999/2000, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Selanjutnya, kedua hal tersebut dipresentasikan oleh para pimpinan unit utama pada sidang pleno dan didiskusikan dalam sidang kelompok.

Seluruh proses persidangan Rakernas dicatat oleh panitia Rakernas. Setiap hasil sidang kelompok ditindaklanjuti dengan perumusan hasilnya sehingga diperoleh suatu rumusan yang lebih tajam mulai dari identifikasi permasalahan hingga rumusan usul kebijaksanaan, yang selanjutnya dibukukan tersendiri menjadi buku Kumpulan Dokumen Rakernas Tahun 1999 atau disingkat menjadi buku D-99.

Buku D-99 ini menggambarkan jalannya persidangan yang merupakan dokumen pelengkap buku R-99 yang berisi kebijaksanaan tahunan dan buku P-99 yang berisi kumpulan sambutan dan

pengarahan yang disampaikan pada Rakernas. Ketiga dokumen tersebut merupakan informasi hasil Rakernas Tahun 1999 yang saling melengkapi.

Kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas semua unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam melaksanakan kegiatan program pendidikan dan kebudayaan pada tahun anggaran 1999/2000 serta dalam penyusunan perencanaan program tahun anggaran 2000/2001.

Jakarta, 8 September 1999

Kepala Biro Perencanaan

Selaku Ketua Substansi Rakernas Tahun 1999

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate scribble.

**Muljani A. Nurhadi**

NIP 130358893

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PEMBUKAAN RAKERNAS.....	3
Laporan Mendikbud.....	3
Pidato Pembukaan oleh Presiden B.J. Habibie.....	5
BAB III SIDANG PARIPURNA I, PENGARAHAN MENDIKBUD DAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA TERKAIT .....	11
Pengarahan Mendikbud.....	11
Pengarahan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.....	16
Pengarahan Dirjen PUOD Depdagri.....	19
Pengarahan Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter Depkeu.....	24
Pengarahan Asisten Menko Wasbang Bidang Otonomi Daerah..	27
Pengarahan Kepala BAKN.....	33
BAB IV SIDANG PARIPURNA II, PENYAJIAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 1994/1995 S.D. 1996/1999.....	40
Ditjen Dikdasmen.....	40
Ditjen Dikti.....	52
Ditjen Diklusepora.....	57
Ditjen Kebudayaan.....	62

Sekretariat Jenderal.....	66
Inspektorat Jenderal.....	72
Balitbang Dikbud.....	75

<b>BAB V SIDANG KELOMPOK TENTANG HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 1994/ 1994 S.D. 1998/1999 DAN RANCANGAN KEBIJAKSANAAN UMUM TAHUN 1999.....</b>	<b>80</b>
Subkelompok Pendidikan Dasar.....	80
Subkelompok Pendidikan Menengah.....	84
Kelompok Diklusepora.....	87
Kelompok Kebudayaan.....	90
Kelompok Penunjang.....	97
Subkelompok Dikti-LPTK.....	100
Subkelompok Dikti-Politeknik.....	105
Subkelompok Dikti-Universitas/Institut.....	107
Subkelompok Dikti- PTN Seni.....	113
Subkelompok Dikti-Kopertis.....	120

<b>BAB VI SIDANG PARIPURNA III, PEMAPARAN HASIL KERJA KELOMPOK DAN UPACARA PENUTUPAN.....</b>	<b>128</b>
Kelompok Dikdasmen.....	128
Kelompok Kebudayaan.....	133
Kelompok Penunjang.....	136
Laporan Sesjen dan Penyampaian Butir-butir Kebijakan Umum.....	143
Pengarahan dan Sambutan Penutupan oleh Menko Kesra dan Taskin.....	158

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Kebijakan Tahunan Tahun 1999 yang di dalamnya mencakup Kebijakan Umum Tahun 1999, Kebijakan Pelaksanaan Tahun 1999/2000, dan Kebijakan Awal Perencanaan Tahun 2000/2001 dilakukan melalui berbagai tahap. Pada tingkat unit utama dipersiapkan masukan bahan kebijakan tahunan yang selanjutnya dirangkum pada tingkat departemen menjadi buram rumusan kebijakan tahunan. Setelah memperhatikan sajian unit utama tentang evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan program selama lima tahun Repelita VI dan rancangan kebijakan umum, buram kebijakan tahunan ini menjadi salah satu bahan diskusi/sidang kelompok dalam Rakernas.

Pembagian kelompok diatur secara spesifik sesuai dengan karakteristik permasalahan dan isu strategis sebagai berikut.

Kelompok Dikdasmen dibagi menjadi 2 subkelompok, yaitu subkelompok dikdas dan subkelompok dikmen;

Kelompok Dikti, dibagi menjadi 5 subkelompok, yaitu subkelompok LPTK, poli, PTN, PT Seni, dan Kopertis;

Kelompok Diklusepora;

Kelompok Kebudayaan; dan

Kelompok Penunjang.

Mekanisme sidang kelompok dilakukan dengan mengelompokkan peserta menjadi lima kelompok, untuk kelompok dikdasmen dibagi menjadi dua subkelompok, dan kelompok dikti dibagi ke dalam lima subkelompok. Setiap kelompok dan subkelompok mendiskusikan substansi yang relevan, selama lebih kurang tiga jam.

Seluruh kelompok dan subkelompok mendiskusikan masalah atau isu strategis dan usulan kebijaksanaan tahun yang akan datang. Hasil diskusi kelompok merupakan salah satu bahan acuan bagi proses lahirnya kebijaksanaan tahunan.

Sesuai dengan tugas kepanitiaan Rakernas Depdikbud Tahun 1999, khususnya yang dibebankan kepada seksi nota/analisa; Seksi notula/analisa telah mengikuti dan meliput jalannya persidangan mulai dari pembukaan, sidang-sidang paripurna, dan sidang/diskusi kelompok yang hasilnya dilaporkan secara menyeluruh sesuai acara Rakernas. Khusus tentang kutipan butir-butir kebijaksanaan umum yang dituangkan dalam buku ini, bukan merupakan rumusan kebijaksanaan umum yang bersifat final. Apabila pembaca ingin mengetahui rumusan final silakan membaca buku R-99.

## **BAB II**

### **SAMBUTAN PRESIDEN DAN PEMBUKAAN RAKERNAS**

#### **A. Laporan Mendikbud**

##### **Proses Persidangan**

Rangkaian upacara pembukaan Rakernas dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB, bertempat di Istana Negara, yang diawali dengan laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bapak Presiden. Pada kesempatan ini hadir pula beberapa Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan, Anggota Komisi VII DPR, dan seluruh peserta Rakernas.

##### **Butir-butir Laporan Mendikbud**

1. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden atas perkenan Bapak Presiden menyampaikan pesan serta membuka secara resmi Rakernas Depdikbud Tahun 1999.
2. Laporan tentang pelaksanaan Rakernas sebagai berikut :
  - a. Rakernas berlangsung tanggal 17 s/d 19 Mei 1999 di Gedung Depdikbud, Senayan, Jakarta, dilanjutkan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depdikbud di Sawangan, Bogor.
  - b. Rakernas bertemakan **“Melalui Reformasi Pendidikan yang terarah dan sistematis, kita tingkatkan Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemberdayaan menuju pembangunan Masyarakat Madani”**.

- c. Rakernas bertujuan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan pencapaian sasaran Repelita VI untuk merumuskan kebijaksanaan umum tahun 1999, khususnya sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak bulan Juli 1997.
  - d. Rakernas dilaksanakan dalam bentuk sidang paripurna maupun sidang kelompok yang bersifat informatif maupun yang bersifat pembahasan. Rakernas diikuti 315 orang, yang terdiri atas 294 pejabat di lingkungan Depdikbud yang meliputi pimpinan Unit Utama (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan), para Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Kanwil, Kopertis, Ketua Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik, Pejabat Eselon I Pusat, para Atase Pendidikan dan Kebudayaan, serta 20 orang dari instansi di luar Depdikbud yang terkait kegiatannya dengan pendidikan dan kebudayaan. Hadir pula Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris.
3. Misi abadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah pembelajaran dan pembudayaan bangsa dan masyarakat Indonesia agar setiap insan Indonesia berpendidikan dan berbudaya, cerdas tetapi berakal kuat dalam moral kebudayaan dan agama sehingga terbangunlah masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial.

4. Sebagai bagian dari reformasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, kami telah menugaskan dan mengukuhkan Bapak Sekretaris Jenderal sebagai pejabat utama yang bertugas untuk menggalang kesatuan arah serta kesatuan tindak kebijaksanaan sehingga sekaligus jenis dan jenjang unit kerja bergerak dalam kejelasan arah serta tahapan kerja yang berpedoman pada undang-undang serta hukum yang berlaku. Hal ini kami lakukan mengingat bahwa krisis ekonomi dan moneter telah memaksa kita semua untuk lebih cermat merencanakan, lebih hemat dalam pengeluaran anggaran dan lebih tepat dalam memanfaatkan waktu.
5. Mandat Depdikbud dalam kabinet Reformasi Pembangunan pada hakekatnya adalah untuk menyiapkan sistem kerja yang lebih transparan, lebih wajar dan lebih berdaya guna dalam mempersiapkan tugas yang dihadapi Kabinet baru hasil Pemilu 1999 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Nopember yang akan datang.

## **B. Pidato Pembukaan oleh Presiden B.J. Habibie**

### **Proses Persidangan**

Pidato Pengarahan Presiden RI dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Rakernas Depdikbud) Tahun 1999 dimulai pukul 10.15-11.00 WIB pada Senin, 17 Mei 1999, dihadiri oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (UPW), Menteri Kependudukan, Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Anggota Komisi VII DPR RI.

Selesai pembukaan dilanjutkan acara ramah tamah. Acara berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan.

### **Butir-Butir Pokok Pengarahan**

1. Rapat Kerja Nasional Depdikbud Tahun 1999 merupakan momentum yang tepat dan strategis karena dilaksanakan pada saat dunia pendidikan menghadapi dampak krisis ekonomi dan moneter, yang bersamaan, dengan tuntutan globalisasi dan keterbukaan serta mulainya babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu era reformasi.
2. Rapat Kerja Nasional ini penting dalam rangka evaluasi terhadap pencapaian sasaran program pendidikan dan kebudayaan selama Pelita VI serta untuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan guna dicari jalan pemecahannya, program dan kegiatan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pada masa datang yang akan direvisi, dipertajam atau diganti sama sekali.
3. Program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun masih tetap merupakan program yang relevan dan perlu mendapat prioritas utama untuk mewujudkan amanat UUD 1945 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa".
4. Pembangunan akan berhasil dilaksanakan apabila masyarakat Indonesia minimal telah mengenyam pendidikan dasar, oleh sebab itu kita telah mencanangkan program "pendaftaran dini dalam penerimaan siswa baru" untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, agar jajaran Depdikbud menindaklanjuti penancangan tersebut sebaik-baiknya.
5. Kita menyadari bahwa cobaan untuk mencapai sasaran tersebut sangat berat, akibat terjadi krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan telah merambah ke dunia pendidikan dan

kebudayaan Indonesia, meskipun dampak tersebut tidak secepat dan separah di bidang ekonomi. Kita perlu melakukan intervensi agar dampak krisis tersebut tidak semakin besar.

6. Presiden mendukung berbagai upaya agar hasil pembangunan pendidikan yang dicapai dapat diselamatkan, Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk bantuan beasiswa beserta kegiatan pendukungnya perlu dilanjutkan dan sasarannya perlu diperluas serta ketepatan dalam memilih sasaran program perlu dilakukan.
7. Untuk mengurangi angka putus sekolah (APS), selain melalui pemberian beasiswa, dapat pula hal itu dilakukan melalui sumbangan orang tua peserta didik yang diminimalkan dan kalau bisa dihapuskan.
8. Jika dilihat dari dimensi masa depan, pembangunan pendidikan dan kebudayaan akan menghadapi tantangan dan dimana globalisasi yang semakin keras. Untuk itu, perlu disiapkan kemampuan daya saing bangsa agar mampu berinteraksi dan berkompetisi antarwarga dunia dalam segala dimensi. Untuk itu, ada tiga modal pokok yang perlu dimiliki, yaitu:
  - a. kualitas SDM yang kompetitif;
  - b. kemampuan manajemen yang unggul;
  - c. penguasaan teknologi.
9. Untuk mengatasi hal tersebut walaupun sumber dana yang tersedia terbatas, sekolah unggulan, pembinaan kualitas anak usia dini yang berorientasi keunggulan, pengembangan penelitian ilmu dasar dan terapan serta program pengembangan manajemen perlu mendapat perhatian dan mutu pendidikan harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, Dana Bantuan

Operasional (DBO) pendidikan diberikan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Dalam konteks ini ada 5 hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. pengembangan kualitas SDM yang dimulai sejak dini;
  - b. kemampuan manajemen para pengelola pendidikan di semua tingkat;
  - c. perkembangan teknologi dan informasi serta persaingan yang semakin ketat;
  - d. wawasan keunggulan dalam percaturan internasional;
  - e. peningkatan keunggulan di bidang teknologi.
10. Bangsa Indonesia akan memulai babak sejarah baru untuk melakukan berbagai perubahan yang, sesuai dengan yang diamanatkan dalam TAP MPR No. X/MPR/1998 yang telah mengamanatkan bahwa program pembangunan dalam jangka pendek antara lain untuk meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya untuk mewujudkan *masyarakat madani*, yaitu masyarakat demokratis dengan kesempatan partisipasi masyarakat yang lebih luas yang dilandasi dengan kepastian hukum, egalitarian, berkeadilan, menghargai harkat kemanusiaan, menghormati kemajemukan budaya dalam kesatuan bangsa yang dilingkupi oleh nilai-nilai budaya dan agama.
11. Dalam rangka mempersiapkan individu dan masyarakat dengan memberikan kemampuan mengaktualisasikan, melembagakan dan mengembangkan masyarakat madani, maka misi pendidikan nasional jangka panjang adalah mengembangkan sistem dan organisasi pendidikan yang lebih otonom, adaptif, dan fleksibel serta berwawasan global.

12. Pengalaman sejarah dari bangsa lain menunjukkan bahwa peran sumber daya manusia yang berkualitas lebih unggul daripada sumber daya alam, maka oleh karena itu walaupun dalam kondisi masih prihatin, Pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada dunia pendidikan untuk meningkatkan SDM.
13. Untuk mendukung program peningkatan SDM, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta menteri-menteri yang terkait untuk mengkaji dan mempersiapkan skenario pengembangan SDM, sehingga pada saatnya nanti anggaran pendidikan yang sekarang delapan persen (8%) dari APBN dapat ditingkatkan menjadi sekitar 20%-25%. Meskipun dapat dicapai secara bertahap, hal itu sudah harus disiapkan dari sekarang.
14. Sebelum rencana anggaran tersebut tercapai, tidak hanya peran pemerintah tetapi oleh peran orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih amat dibutuhkan, selain dari itu, pihak sekolah, dan perguruan tinggi perlu diberdayakan untuk dapat menghasilkan pendapatan sendiri guna menopang operasional proses belajar mengajar dan peningkatan mutu.
15. Pengembangan program koperasi sekolah, unit produksi SMK, layanan jasa konsultasi perguruan tinggi perlu ditumbuhkembangkan, juga program ini dapat dijadikan wahana untuk melatih keterampilan kewiraswastaan.
16. Berkaitan dengan hal tersebut prakarsa untuk mengembangkan program *land grant college* sebagai hasil kerjasama antara Depdikbud dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun), selain untuk memberi kesempatan kepada perguruan tinggi memperoleh pendapatan, program ini akan

menjadi laboratorium hidup dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan pelestarian lingkungan.

17. Akhirnya Presiden ingin mengingatkan kembali pada jajaran Depdikbud tentang perlunya mempersiapkan langkah-langkah penyegaran dan pembenahan yang mendasar serta konseptual terhadap berbagai dimensi pendidikan, yaitu :
  - a. Dimensi bagaimana merencanakan dan melaksanakan pokok-pokok reformasi pendidikan secara mendasar, terarah dan sistematis untuk memberdayakan individu dan masyarakat ke arah terbentuknya masyarakat madani;
  - b. Dimensi reformasi tersebut hendaknya dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan agar tidak mengganggu kegiatan pendidikan itu sendiri.
  - c. Dimensi aspek-aspek peraturan perundang-undangan, kelembagaan, tatalaksana, perangkat lunak, dan kurikulum serta pendukungnya dalam keseluruhan proses pendidikan secara seksama dengan memperhatikan corak budaya dan kondisi daerah yang majemuk.
18. Reformasi pendidikan yang kita kehendaki adalah agar pendidikan benar-benar dapat mencerahkan kehidupan intelektual, estetis, dan mental peserta didik yang mampu memberdayakan generasi muda, baik sebagai makhluk individu dengan kompetisi pribadinya maupun sebagai makhluk sosial dengan kemampuan kemasyarakatannya yang mempunyai kehidupan yang sehat dan efektif serta berwawasan kebangsaan, yang semakin kukuh nilai-nilai budaya dan agama yang tercermin dalam akhlakunya.

# **SIDANG PARIPURNA I**

## **PENGARAHAN MENDIKBUD DAN MENTERI LEMBAGA NON DEPARTEMEN TERKAIT**

### **A. Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

#### **Proses Persidangan**

Sidang Paripurna I Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 diawali dengan sambutan dan pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang disampaikan langsung oleh Prof.Dr. Juwono Sudarsono, M.A

Acara pengarahan ini diikuti oleh seluruh peserta Rapat Kerja Nasional dan dalam menyampaikan amanatnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan didampingi oleh semua Pimpinan Unit Utama.

#### **Butir-Butir Pokok Pengarahan**

Dalam pengarahannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menekankan tiga hal pokok dan penting, yaitu (1) Kedudukan dan Peranan Sekretariat Jenderal; (2) Peranan Unit Utama; dan (3) Bidang Pengawasan.

1. Kedudukan dan peranan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Depdikbud).
  - a. Setjen terkait dengan masalah yang dihadapi dengan adanya berbagai dampak krisis ekonomi dan moneter. Untuk itu, dalam pelaksanaan tugasnya Setjen harus lebih cermat, hemat, dan cepat dalam penggunaan anggaran yang relatif terbatas.
  - b. Kedudukan Sekretaris Jenderal Depdikbud harus kuat karena

bertindak sebagai penyambung utama, baik antar Unit Utama Pusat maupun Daerah

- c. Tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Kabinet Reformasi ini adalah mempersiapkan tugas-tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendatang secara terarah dan sistematis sehingga siapa pun yang akan menjadi Presiden dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendatang tidak ada masalah karena tidak tergantung pada figur, tetapi bertumpu pada sistem yang ada. Pemantapan sistem ini perlu dibudayakan.
  - d. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya tergantung kepada bawahannya, terutama para pejabat eselon II dan eselon III yang bertindak sebagai penyambung pertama antara kebijakan normatif dengan pelaksanaan di lapangan.
  - e. Bekerja terarah, terukur dan teratur, bekerja dengan rambu-rambu hukum yang ada sehingga kebijakan sistem dapat diterima oleh masyarakat secara wajar, dan akhirnya menjadi pola kerja yang rutin.
  - f. Jumlah anggaran Depdikbud saat ini lebih sedikit jika dibanding dengan dua tahun yang lalu.
2. Sehubungan dengan semua unit kerja dan para pelaksana tugas di lapangan, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan berkenaan dengan pendaerahan dan otonomi.
    - a. Indonesia merdeka telah lebih dari 50 tahun, maka sudah tiba saatnya pelaksanaan pendidikan diserahkan kepada daerah.
    - b. Pelaksanaan otonomi harus dilakukan secara hati-hati,

karena tidak semua daerah siap untuk melaksanakan otonomi. Namun, hal itu bukan merupakan alasan untuk menunda pelaksanaan otonomi di daerah.

Untuk itu diperlukan adanya usaha-usaha program pelatihan perencanaan nasional dan pemberdayaan pemerintahan daerah, baik itu untuk melatih SDM-nya maupun program kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan.

- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus berpangkal pada keberanian masyarakat (*Community Based Management*), termasuk bagaimana masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan sekolah untuk memperkuat pelaksanaan *School Based Management* (misal semakin berperannya BP3).
  - d. Reformasi pada hakikatnya adalah upaya untuk menggugah keberanian masyarakat untuk melakukan gugatan-gugatan dan/atau perbaikan-perbaikan yang menurutnya patut diperhatikan termasuk oleh kepala sekolah, walikota, bupati atau oleh gubernur.
3. Bidang Pengawasan
- a. Dalam bidang pengawasan yang paling penting adalah keadilan, dan tidak digunakannya standar ganda.
  - b. Di lingkungan Depdikbud, setiap aparat harus bersedia untuk dipertanyakan oleh masyarakat luas tentang sifat keadilan dan kewajaran dari pelaksanaan program dan proyek.
  - c. Basis utama dalam pelaksanaan pengawasan adalah Inspektur Jenderal.
  - d. Apabila di daerah ada gugatan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun LSM, hal itu harap dilaporkan ke Irjen untuk diselesaikan secara intern Depdikbud. Apabila

terdapat cukup bukti-bukti dan ada aspek kriminal, barulah masalah itu dilimpahkan ke Pengadilan.

- e. Dalam reformasi ini banyak keterbukaan disalahartikan untuk memfitnah dan balas dendam terhadap para pejabat yang masih melaksanakan tugas. Oleh karena itu para pejabat dalam melaksanakan tugasnya harus hati-hati, terukur, mempunyai bukti-bukti yang kuat terutama bukti hukum.

### **Tanya Jawab**

Setelah sambutan berakhir, selanjutnya dibuka forum tanya jawab. Dalam forum tanya jawab ini hanya terdapat seorang penanya, yaitu dari Rektor Universitas Hasanudin yang menanyakan mengenai:

1. Pelaksanaan kampanye Pemilu mendatang, apakah bisa selama kampanye berlangsung, mahasiswa diliburkan?
2. Pelaksanaan Ospek, apakah di tahun mendatang masih diadakan atau tidak?
3. Pendaerahan dan otonomi, tingkat kesiapan dan persiapan di daerah, jangan sampai dipakai untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaannya.

Atas pertanyaan tersebut, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberi jawaban sebagai berikut.:

1. Pada dasarnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui pelaksanaan kampanye oleh Parpol di lingkungan perguruan tinggi dengan berbagai ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan kampanye adalah atas inisiatif dari pihak perguruan tinggi;
  - b. waktu penyelenggaraan dianjurkan dalam satu hari antara

jam 09.00 - 16.00 waktu setempat;

- c. dalam setiap penyelenggaraan kampanye diikuti maksimal oleh 6 Parpol. Jika ada parpol yang belum memperoleh kesempatan, disarankan untuk mengikuti kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi/kampus terdekat;
- d. dan penyelenggaraan kampanye didasarkan pada kemampuan kampus masing-masing.  
Bentuk penyelenggaraan kampanye ada dua macam;
  - a. pertama, bersifat tertutup jika hanya dihadiri oleh kalangan sivitas akademika sebagai stadium general dan hasilnya tidak dipublikasikan untuk umum;
  - b. kedua, bersifat terbuka apabila dihadiri oleh sivitas akademika dan masyarakat umum yang penyelenggaraannya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan KUHP.

Dengan demikian Surat Edaran Direktur Jenderal Dikti tanggal 14 Mei 1999 tentang Kampanye dalam Kampus bukan merupakan ketentuan wajib melainkan merupakan pedoman yang pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada sivitas akademika atau Rektor.

Hal ini berarti perguruan tinggi dapat memakai atau menolak pedoman tersebut, tergantung dari tingkat kebebasan dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing kampus.

- 2. Pelaksanaan ospek sepenuhnya diserahkan kepada sivitas akademika dalam hal ini kebijakan Rektor setempat.
- 3. Masalah pendaerahan dan otonomi daerah tergantung kepada

Pemda dan masyarakat setempat termasuk DPRD dan Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Dalam hal otonomi keuangan dari perguruan tinggi jangan sampai terwujud pemindahan korupsi dari Pusat ke Daerah.

## **B. Pengarahan Menteri Kehutanan dan Perkebunan**

### **Proses Persidangan**

Sidang Paripurna dimulai pukul 13.30 WIB yang dipimpin oleh Prof.Dr. Juwono Sudarsono M.A Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyampaikan pengarahannya, pimpinan sidang menjelaskan tentang pejabat-pejabat Depdikbud yang hadir dalam Sidang Paripurna I ini.

Pengarahan Menteri Kehutanan dan Perkebunan ini disampaikan secara langsung oleh Dr.Ir. Muslimin Nasution selama hampir 60 menit. Sebelum sidang diakhiri, kepada peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Terdapat dua penanya yang mengajukan pertanyaan yaitu Rektor Universitas Hasanudin dan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

### **Butir-Butir Pengarahan**

Butir-butir pengarahan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Depdikbud Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Judul pengarahan “Konsep dan Implementasi *Land Grant College* dan *Levy and Grant College* di Perguruan Tinggi”.
2. Empat agenda pokok yang harus dipecahkan untuk mengatasi

krisis moneter dewasa ini adalah menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan memperbesar perolehan devisa negara, yang mempunyai implikasi penguatan kurs nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan menurunnya inflasi.

3. Indonesia mempunyai kekuatan sumber daya alam yang banyak dan dapat diperbarui secara terus menerus, termasuk sumber daya kehutanan dan perkebunan. Di Indonesia terdapat 141 juta hektar hutan yang potensial. Permasalahan yang harus segera dipecahkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga ahli di bidang pengembangan sektor kehutanan dan perkebunan. Sektor perkebunan juga memiliki potensi yang besar, antara lain, dalam waktu enam tahun pohon pinus sudah dapat ditebang. Kekayaan flora dan fauna sangat besar, ditandai banyaknya jenis burung dari Indonesia yang diekspor. Ekoturisme kita dapat menghasilkan banyak devisa.
4. Kesuburan tanah serta tenaga kerja yang melimpah dan murah sangat mendukung perkembangan sektor perkebunan dan kehutanan. Pengembangan sektor kehutanan dan perkebunan ini sangat potensial untuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor pangan.
5. Sektor kehutanan meliputi berbagai hal yang berhubungan dengan pepohonan, satwa hutan, plasma nutfah, dan lain-lain.
6. Kita perlu mencetak sarjana-sarjana kehutanan yang banyak melalui pembebasan uang kuliah. Sarjana yang dimaksud diusahakan agar menjadi sarjana yang tahu fungsinya sebagai ahli kehutanan dan memiliki kecintaan terhadap hutan. Perguruan

tinggi perlu mengembangkan pendidikan dengan memanfaatkan lahan.

Pengembangan ekonomi juga dapat dilakukan oleh masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat dengan memanfaatkan kehutanan.

7. Keselamatan hutan dipengaruhi oleh sistem kepemilikan hutan. Hutan yang dimiliki oleh perseorangan (penduduk asli setempat) lebih terpelihara dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama daripada hutan yang dimiliki oleh perusahaan secara besar-besaran.
8. Konsep pembangunan kehutanan seharusnya berasal dari perguruan tinggi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), antara lain bahwa kita perlu melaksanakan pembangunan kehutanan secara berkelanjutan dengan menggunakan konsep pendekatan yang meliputi tiga fungsi, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Pembangunan sumber daya alam seharusnya juga dapat membiayai pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dua sampai lima persen (2-5%) keuntungan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk meningkatkan SDM dan Iptek sektor kehutanan. Sebagian hasil hutan diperuntukan bagi pembangunan kampus-kampus dan pondok-pondok pesantren. Pemberian HPH kepada perguruan tinggi dan pondok pesantren melalui undang-undang selama 35-70 tahun.
10. Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun) merencanakan suatu program pengelolaan hutan, yaitu *Land Grant College (LGC)* dan *Levy and Grant College (L&GC)*. Program ini ditawarkan kepada kalangan perguruan tinggi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaan

teknisnya. *Memorandum Of Understanding (MOU)* dalam proses penyusunan. Uji coba program ini sudah dilaksanakan pada salah satu pondok pesantren di Jawa Timur yang diberi hak untuk menanam, memelihara, dan memanen dengan pembinaan langsung dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan Dephutbun.

11. Program LGC dan L&GC tersebut menawarkan hutan tidak hanya sebagai sumber ekonomi tetapi juga sebagai tempat untuk mempraktikkan dan mengembangkan pendidikan.
12. Lebih lanjut Menteri Kehutanan dan Perkebunan menginformasikan LGC dan L&GC akan diserahkan kepada institusi yang memiliki badan hukum. Dengan demikian, kalangan perguruan tinggi hendaknya dapat mencari upaya pembentukan suatu koperasi, misalnya, atau suatu yayasan yang berafiliasi dengan swasta. Untuk itu, Depdikbud harus segera menyusun kriteria perguruan tinggi yang dapat menerima LGC dan L&GC.

### **C. Pengarahan oleh Direktur Jenderal PUOD Depdagri**

#### **Proses Persidangan**

Persidangan dibuka tepat pukul 14.30 oleh Direktur Jenderal Dikdasmen, diawali dengan memperkenalkan penyaji. Karena topiknyanya cukup menarik dan sedang trend saat ini, maka jalannya persidangan sangat hidup, apalagi penyajinya juga profesional. Penyajian selesai pukul 15.00 kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang cukup hangat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

#### **Butir-Butir Pokok Pengarahan**

1. Departemen Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal PUOD menyatakan bahwa sebelum Pemilu tanggal 7 Juni 1999, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, harus sudah dipersiapkan pelaksanaannya. Manfaat yang dapat diambil dengan adanya pembentukan pemerintahan otonomi daerah adalah:
  - a. pengambilan keputusan lebih cepat;
  - b. pelayanan publik lebih efisien (pelayanan pemerintah lebih dekat kepada masyarakat);
  - c. kebanggaan daerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Uniform sebagai indikator adanya sentralisasi kekuasaan mengakibatkan daerah mengalami krisis kepemimpinan dan identitas, sedangkan Pemerintah Pusat selama ini banyak menghabiskan energi dan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh daerah. Dengan desentralisasi Pemerintah Pusat diharapkan akan memiliki waktu untuk mempersiapkan sumber daya menyongsong perubahan global. Untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia saat ini perlu dilakukan desentralisasi karena menurut paradigma baru menyatakan bahwa negara kesatuan RI dapat terpelihara jika otonomi diberikan kepada daerah-daerah dan untuk membuat perda (peraturan daerah) tidak lagi harus meminta persetujuan Pusat (daerah memiliki self regulating power), termasuk pembentukan organisasi daerah dan ijin usaha, disamping juga segi pemberdayaan masyarakat dan aparatur. Di samping itu daerah juga memiliki self modifieng power (kewenangan untuk menyesuaikan sendiri peraturan-peraturan yang diberlakukan).

Menurut paradigma lama untuk mempersatukan negara Indonesia harus dilakukan pemerintahan sentralisasi. Dengan demikian apabila paradigma lama itu dibandingkan paradigma baru terjadi kontradiksi.

Pemerintahan yang sentralistik semakin tidak populer, karena kekurangmampuannya untuk memahami secara tetap nilai-nilai sosial budaya daerah atau aspirasi lokal.

3. Jika pemerintah daerah sudah diberi kewenangan yang luas, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga perlu untuk melakukan training-training dan memajukan pendidikan daerahnya. Oleh karena itu daerah harus memajukan pendidikan dengan mengalokasikan sekian persen APBD untuk pendidikan. Kemajuan daerah akan ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah tersebut, dan mungkin akan terjadi kompetisi yang sehat atau justru akan terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi yang berdampak negatif sebagai akibat oleh adanya perbedaan kemampuan daerah. Hal ini disebabkan antara lain karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing daerah berbeda.
4. Ada dua hal yang perlu dipikirkan oleh calon pemimpin nasional masa yang akan datang:
  - a. Bagaimana caranya agar dapat menciptakan lapangan kerja;
  - b. Bagaimana mewujudkan pendidikan yang baik karena pada prinsipnya bahwa Pemerintahan pascapemilu yang akan datang harus dapat membangun masyarakat Indonesia menjadi semakin pintar.

5. Dari sesi tanya jawab, peserta antara lain menanyakan hal-hal berikut:
- a. Sehubungan dengan desentralisasi, sektor atau aspek apa saja yang masih ditangani oleh Pemerintah Pusat?
  - b. Seberapa jauh asas dekonsentrasi itu berlaku pada sektor yang dinyatakan penyelenggaraannya di daerah? Apakah masih ada kemungkinan-kemungkinan dekonsentrasi dan apa kriterianya.
  - c. Selama ini guru lebih banyak diperlakukan sebagai aparat pemerintah daripada sebagai insan pendidikan. Dengan desentralisasi diharapkan pengelolaan pendidikan menggunakan paradigma pendidikan dan bukan paradigma birokrasi. Apakah nanti masih akan terjadi penempatan aparat P & K (dalam hal ini Kepala Dinas) dengan paradigma pemerintahan? Sebagai catatan pernah terjadi mantan Kepala Dinas Pemakaman dan Kepala Dinas Peternakan diangkat menjadi Kepala Dinas P dan K.

Dengan desentralisasi ini diusulkan agar ada pengelolaan tunggal untuk sekolah dasar, sehingga permasalahan yang saat ini muncul sebagai akibat adanya pengelolaan ganda dapat diatasi.

Dari beberapa pertanyaan tersebut, penyaji menjelaskan sebagai berikut:

- a. Sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, otomatis Pemerintah Pusat menjadi lebih ramping dari sebelumnya. Kementerian/Departemen yang masih bertahan kurang lebih 17-18 termasuk Depdikbud.

Dari 36-39 yang ada sekarang sebenarnya Indonesia bisa lebih survive dengan 17-18 Kementerian. Sebagai bahan perbandingan, China yang jumlah penduduknya lebih besar

dari 1 milyar, jumlah kabinetnya hanya 29 orang, Jepang dibawah 20, padahal Jepang menguasai lebih dari 12,5% volume ekonomi dunia.

Beberapa kementerian bisa digabung, sedangkan BAPPENAS tidak seperti keadaan sekarang. Jika Bappenas masih dipertahankan mungkin menjadi Dewan Perencanaan Nasional yang tugasnya memberi advis kepada Presiden bagaimana mensinkronkan pembangunan antar sektor. Menteri Negara yang masih dipertahankan hanya tinggal Sekretariat Negara, sedangkan Menteri Koordinator (Menko) tidak diperlukan lagi, karena jumlah menteri sedikit dan tidak perlu dikoordinasikan lagi.

- b. Azas dekonsentrasi tetap berlaku, karena ada tugas-tugas Pusat yang tidak mungkin didesentralisasikan karena berbagai alasan, misal karena secara nasional harus ada standarisasi yang harus dipenuhi.

Di kabupaten/kota ada otonomi luas, sedangkan di propinsi dengan otonomi terbatas. Namun, tidak berarti bahwa kewenangan di propinsi kecil karena walaupun otonominya kecil tetapi propinsi mendapat limpahan kewenangan melalui dekonsentrasi yang besarnya signifikan dengan pengurangan kewenangan di Pusat. Kriteria untuk dekonsentrasi adalah untuk tugas-tugas Pusat yang tidak mungkin didesentralisasikan tetapi lebih baik didaerahkan karena lebih langsung mengenai kepentingan masyarakat.

- c. Dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan memang diharapkan menggunakan paradigma pendidikan. Sebagai usul untuk Depdikbud sebaiknya pendidikan di tingkat dasar

lebih diperhatikan. Selama ini memang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Depdagri. Dimasa yang akan datang semestinya seseorang yang pernah memimpin unit kerja di bidang pendidikan itulah yang dipromosikan untuk menjadi pemimpin daerah. Oleh karena itu perlu pendekatan/lobby ke anggota DPRD agar Kepala Daerah dan Kepala Dinas P dan K mempunyai visi pendidikan.

#### **D. Pengarahan Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) Departemen Keuangan (Depkeu)**

##### **Proses Persidangan**

Dr.Ir. Indra Djati Sidi, Direktur Jenderal Dikdasmen selaku Pimpinan Sidang/Moderator mempersilahkan penyaji menyampaikan paparan mata sajiannya. Selanjutnya, penyaji yaitu Arlen Tobana, Kepala Biro Analisa Keuangan Daerah Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) Departemen Keuangan menyampaikan bahwa Bapak Drs. Nur Fuad, M.Sc. Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan tidak dapat hadir karena sedang ada kegiatan di Bandung.

Penyajian dan tanya jawab berlangsung dengan baik dan selesai sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia.

##### **Butir -Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Judul pengarahan “Kebijaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Desentralisasi serta Implikasinya bagi Strategi Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan”.

2. Penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perimbangan Keuangan Daerah tidak terlepas dari Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam UU tersebut, paradigma yang dikembangkan sangat berbeda dengan yang berlaku saat ini, seperti semua kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah kecuali 5 bidang plus. Prinsip tersebut akan diterapkan dalam penyusunan RUU Perimbangan Keuangan. Namun, hal ini tetap mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalam UU Pemda tersebut, sesuai dengan arahan Menteri Keuangan bahwa uang mengikuti tugas dan tanggung jawabnya.
3. Beberapa prinsip yang mendasari penyusunan RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, antara lain, adalah teori tentang fungsi pemerintahan yang terdiri atas:
  - a. fungsi stabilisasi, meliputi masalah hankam atau perlindungan terhadap rakyat, masalah inflasi, fiskal, moneter, dan lain-lain yang lebih tepat dilaksanakan oleh pusat;
  - b. fungsi distribusi, seperti kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang juga lebih tepat bila dilaksanakan oleh pusat;
  - c. fungsi alokasi, khususnya pelayanan masyarakat yang lebih efektif apabila didekatkan kepada masyarakat.Dengan demikian, RUU ini, di samping mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah terpenting juga mengatur perimbangan keuangan antar daerah.
4. Hal lain yang juga menjadi harapan dalam RUU ini adalah terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang

- berlandaskan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, dan hak asasi manusia.
5. Berdasarkan hal tersebut, RUU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disusun dengan materi yang terdiri atas:
    - a. dasar-dasar pembiayaan pemerintah daerah;
    - b. sumber-sumber penerimaan pelaksanaan desentralisasi;
    - c. sumber penerimaan daerah yang terdiri atas (1) sumber pendapatan asli daerah; (2) dana perimbangan; (3) pinjaman daerah; (d) dana darurat (apabila terjadi bencana nasional);
    - d. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi;
    - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
    - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan desentralisasi;
    - g. sistem informasi keuangan daerah; dan
    - h. ketentuan penutup.
  6. Definisi perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut UU ini adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, adil, demokratis, dan transparan dengan memperhatikan potensi dan kondisi kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.
  7. Dasar-dasar pembiayaan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan desentralisasi dibiayai oleh APBD;
- b. pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai oleh APBN;
- c. pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai oleh APBN;
- d. penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota yang diikuti dengan pembiayaannya.

Dengan demikian, pelaksanaan penyerahan pembiayaan kepada daerah sangat tergantung pada peraturan pemerintah tentang kewenangan yang akan diserahkan.

8. Implikasi UU ini bagi strategi perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah “bagaimana merumuskan sebaik mungkin tugas-tugas yang tetap berada di pusat, tugas-tugas yang diserahkan kepada propinsi, serta tugas-tugas yang diserahkan kepada kabupaten/kotamadya dengan landasan pemikiran pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

## **E. Pengarahan Asisten Menko Wasbang/PAN**

### **Proses Persidangan**

Sidang Pengarahan dari Kantor Menko Wasbang/PAN yang berjudul “Pembagian Kewenangan dan Kebijakan Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah serta implikasinya bagi perencanaan pendidikan dan kebudayaan di daerah” merupakan Sidang Panel II bersama dengan pengarahan Kepala BAKN. Pengarahan ini disampaikan oleh Drs. Oman Sachroni Asisten Menko Wasbang/PAN hanya selama 15 menit dari 30 menit yang seharusnya.

Karena sidang bersifat panel setelah selesai sajian dari Asmenko Wasbang/PAN dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala BAKN, dan selanjutnya diisi dengan forum tanya jawab.

Pada Sidang Panel II ini bertindak sebagai pimpinan sidang/moderator adalah Dr. M. Boediono Soedjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Selama Panel II berlangsung seluruh peserta Rapat Kerja Nasional termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan para pejabat eselon I mengikuti dengan penuh antusiasme yang tinggi.

### **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Kondisi organisasi pemerintah saat ini masih mengandung berbagai kelemahan, antara lain: bentuk organisasi yang relatif besar, adanya kecenderungan pengembangan struktur, masih tumpang tindihnya penanganan berbagai urusan, besaran organisasi yang tidak proporsional dengan visi, misi dan beban kerja organisasi serta kurang proporsionalnya pembagian wewenang antara pemerintah pusat, Pemerintah Dati I dan Dati II.
2. Beberapa isu penting yang berkembang saat ini antara lain: adanya tuntutan peningkatan daya saing baik di tingkat pusat dan daerah. Di bidang politik, dituntut lebih ditegakkannya prinsip demokrasi, penyelenggaraan pemilu yang jujur, dan jaminan pegawai negeri yang netral. Selain itu adanya kecenderungan penerapan manajemen modern atau manajemen pemerintahan di negara maju.  
Manajemen modern mengandung beberapa prinsip antara lain:
  - a. orientasi kepada konsumen atau pelanggan;

- b. penggunaan teknik-teknik yang lebih ilmiah dalam analisis dan pengambilan keputusan;
- c. jaringan kerja;
- d. organisasi sebagai sistem terbuka;
- e. desentralisasi.

Kecenderungan yang cukup menonjol pada penerapan manajemen pemerintahan di negara maju adalah:

- a. pemerintah lebih berperan sebagai pengarah (*steering*) daripada pelaksana (*rowing*);
  - b. pemerintah lebih menerapkan sistem desentralisasi daripada sentralisasi.
3. Sehubungan dengan hal di atas, perlu dilakukan penataan kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah.
4. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 7, diatur tentang kewenangan daerah sebagai berikut:

Ayat (1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Ayat (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,

pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, koservasi dan standarisasi nasional.

5. Dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah, akan membawa konsekuensi dilakukan penataan kelembagaan di Pusat dan di Daerah. Bertambah luasnya kewenangan otonomi daerah secara langsung akan mengurangi kewenangan Pemerintah Pusat, karenanya organisasi di tingkat Pusat di masa mendatang akan mengalami penyederhanaan dan perampingan baik dengan mengurangi jumlah pembidangan maupun tingkat/hierarki.

Sebaliknya organisasi di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kotamadya) akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

6. Penataan organisasi melalui penyederhanaan organisasi, di samping dapat mengurangi beban anggaran, juga dapat menyederhanakan berbagai prosedur yang selama ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Prinsip-prinsip organisasi modern yang perlu dipegang oleh Pemerintah Daerah, adalah:

- a. visi dan misi yang jelas;
  - b. organisasi flat atau datar;
  - c. organisasi ramping (tidak banyak pembidangan);
  - d. pengayaan jabatan fungsional;
  - e. privatisasi/Unit swadana/BUMD/Swastanisasi.
7. Untuk menentukan pembagian kewenangan dan penataan organisasi di bidang pendidikan dan kebudayaan, perlu dilakukan analisis berdasarkan kriteria yang meliputi identitas dan integritas bangsa dan negara, skala pelayanan, dan teknologi strategis, serta pembagian kewenangan yang didasarkan pada fungsi

manajemen. Analisis dilaksanakan terhadap besaran kewenangan, keterkaitan fungsi, dan karakteristik tugas tiap-tiap unit kerja. Teknologi strategis yang dimaksud mengandung unsur:

- a. derajat kecanggihan tinggi;
- b. berisiko tinggi dalam penerapannya;
- c. memerlukan sumber pembiayaan tinggi, dan kualifikasi SDM yang tinggi.

8. Penentuan kewenangan daerah propinsi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Skala pelayanan lintas kabupaten/kota.
- b. Pertentangan kepentingan antar kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam perumusan kewenangan perlu dilakukan pendekatan fungsi umum manajemen pemerintah yang lazim, yaitu fungsi kebijaksanaan, perencanaan/alokasi, pendanaan, penerimaan, perijinan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan/pengawasan, dan kerjasama/koordinasi.

9. Dengan kriteria dan pendekatan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka kewenangan Pemerintah Pusat dalam menangani bidang pendidikan dan kebudayaan sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan/Pengaturan sistem pendidikan dasar dan menengah secara nasional yang didalamnya termasuk kurikulum, standar pendidikan dan tenaga pengajar.
- b. Kebijakan/Pengaturan sistem pendidikan tinggi secara nasional termasuk di dalamnya mengenai kurikulum, standar pendidikan dan akreditasi pendidikan tinggi, serta tenaga pengajar.
- c. Pengawasan dan perijinan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- d. Kebijakan/Pengaturan sistem pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
  - e. Kebijakan/Pengaturan pengembangan dan pelestarian budaya dan bahasa nasional.
10. Menurut UU Pemerintah Daerah, bahwa bidang dikbud tidak termasuk bidang yang seluruh kewenangannya harus menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sedangkan dalam UUD 1945 jelas dikatakan bahwa pemerintah pusat tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan nasional. Sedangkan pelaksanaan teknisnya dapat dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten/Kota.
- Dengan demikian, Pemerintah Pusat akan melaksanakan fungsi perencanaan dan perumusan kebijakan secara nasional, sedangkan pelaksanaan operasional dilakukan Pemda Kabupaten/Kota. Sehingga implikasinya bagi Depdikbud adalah turunnya volume dan beban kerja. Oleh karena itu Depdikbud perlu segera menyusun perencanaan *grand planning* (perencanaan makro) sampai dengan *micro planning* seperti pengelolaan sumber daya dan aset serta perlu segera mereformasi mekanisme perencanaan *top-down planning* menjadi *bottom-up planning*.
- Untuk menghilangkan sifat egosektoral yang melekat pada *bottom-up planning*, perlu diperkuat pola interaktif antarsektor dan manajemen data yang akurat.
11. Pada sesi tanya jawab, hanya ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada penyaji, yaitu mengapa bidang dikbud tidak termasuk dalam bidang yang kewenangannya harus tetap di Pusat, hal ini terkait dengan peranan pendidikan dan kebudayaan yang sangat vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanggapan yang disampaikan adalah kembali pada UUD 1945 seperti tersebut pada butir 9 di atas.

## **F. Pengarahan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)**

### **Proses Persidangan**

Sidang Paripurna I Panel kedua dengan materi pengarahan Kepala BAKN dimulai 15 menit lebih awal yaitu pukul 16.45. Panel kedua ini diikuti oleh seluruh peserta Rapat Kerja Nasional Depdikbud Tahun 1999. Persidangan berjalan dengan lancar, peserta aktif mengajukan pertanyaan dan karena penyaji menyampaikan topik utama adalah Rancangan Undang-undang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1974, maka antusiasme peserta cukup tinggi.

### **Butir-Butir Pokok Pengarahan**

1. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)/aparatur negara yang mampu mendukung pemerintahan pasca Pemilu Tahun 1999, BAKN mempersiapkan paket terobosan berupa reformasi kepegawaian. Hal ini penting, mengingat kecenderungan pemerintahan nantinya adalah bentuk pemerintahan koalisi.
2. Sistem pemerintahan pasca Pemilu 1999 berpikir pada perubahan strategis yang akan terjadi dan membawa implikasi terhadap sistem kepegawaian, yaitu:

a. Pemerintahan Koalisi

Sistem multipartai (48 partai) pada Pemilu 1999 akan mengakibatkan pembentukan sistem pemerintahan koalisi yang kemungkinan besar diisi oleh 9 atau 10 partai yang akan memperoleh dukungan cukup besar. Untuk itu BAKN berupaya agar ada pemisahan yang tegas antara jabatan negara sebagai pengangkatan politik dan jabatan profesional yang harus netral dari kegiatan politik.

b. Otonomi

Tuntutan informasi antara lain adanya keterbukaan dan kebebasan. Daerah dalam hal ini menuntut kewenangan lebih luas dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Untuk itu pemerintahan Pusat akan memberikan otonomi semakin luas kepada daerah. Implikasi otonomi daerah terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan PNS adalah bagaimana agar aparatur negara di Pusat dan Daerah memiliki kapabilitas dengan sama untuk melaksanakan tugas-tugas yang semakin berat tersebut.

c. Ancaman Disintegrasi

Maraknya berbagai konflik sosial di beberapa daerah memiliki potensi terjadinya disintegrasi negara kesatuan RI. PNS sebagai unsur aparatur negara memiliki fungsi strategis sebagai penyangga kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan ditetapkannya UU Pemerintahan Daerah mengenai daerah mempunyai kewenangan mengangkat, memberhentikan, dan memutasi PNS, maka dalam pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah tersebut diharapkan juga mampu menepis terjadinya disintegrasi teritorial. Pengangkatan pejabat harus berbasis

kompetensi (*merit system*) untuk menghindari terjadinya *spoil system*.

d. Peningkatan Peranan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan belum optimal. Untuk itu potensi masyarakat misalnya melalui lembaga swadana perlu ditingkatkan sehingga beban biaya penyelenggaraan pelayanan publik tidak perlu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini jika dilaksanakan akan mampu tidak hanya meringan beban pemerintah, tetapi juga akan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan.

3. Dasar-dasar kebijakan pengembangan SDM aparatur negara pasca Pemilu 1999

Pengembangan SDM diarahkan kepada terbentuknya aparatur negara yang profesional, netral dari kegiatan politik, berwawasan global, bermoral serta berkemampuan sebagai penyangga kesatuan dan persatuan bangsa (*clean governance*). Untuk mencapai hal itu, tujuan kebijakan SDM adalah untuk:

- a. memantapkan profesionalitas kepegawaian negara;
- b. menjaga pelaksanaan sistem merit setiap tahapan administrasi kepegawaian. Dalam hal ini fungsi Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas) akan ditingkatkan tidak sebagai badan yang mempertimbangkan usulan calon pejabat eselon I tetapi juga sebagai lembaga penasehat presiden.
- c. mendorong desentralisasi manajemen kepegawaian ke propinsi dan kabupaten;

- d. mendorong perkembangan pengelolaan kepegawaian pada lembaga swadana dan BUMN;
- f. mendorong mobilitas pegawai secara maksimal dan memperkuat peranan sebagai penjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan kepegawaian diarahkan untuk mengatur aspek kepegawaian sebagai berikut.

a. Penataan Struktur Kepegawaian Negara

Konsep struktur kepegawaian negara meliputi pejabat negara (*political appointees dan non political appointees*), jabatan karier (PNS golongan II/b s.d. IV/e) terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, POLRI, dan lembaga swadana di universitas, BUMN, BUMD, *outsourcing* (gol. I/a-II/a), lembaga-lembaga pelayanan (RSU, Litbang dan UPT).

b. Profesionalitas dan netralitas aparatur negara

- 1) sistem masuk ganda yaitu lulusan S1 diangkat dalam golongan III/a, S2-golongan III/b, dan S3-golongan III/c;
- 2) penerapan sistem penilaian pelaksanaan kerja berdasarkan kompetensi

c. Desentralisasi kewenangan kepegawaian dengan tetap mempertahankan mobilitas PNS.

Presiden untuk golongan IV/e; Kepala BAKN, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Propinsi (Sesprop) untuk golongan IV/b-IV/d dan Sekretaris Kabupaten (Seskab)/Sekretaris Kotamadya (Sesko) untuk golongan IV/a. Mobilitas nasional bagi pegawai meliputi eselon I dan II serta fungsional, mobilitas propinsi untuk eselon III dan fungsional setara,

mobilitas kabupaten untuk eselon IV dan V serta fungsional setara.

- d. Peningkatan kesejahteraan PNS ditempuh dengan cara:
- 1) penataan sistem penggajian dan tunjangan;
  - 2) penataan skema pensiun dan asuransi kesehatan;
  - 3) penataan skema kredit perumahan;
  - 4) penataan skema penghargaan, dimana penerima penghargaan mendapatkan efek/implikasi yang positif terhadap percepatan kenaikan pangkat, misal :
    - a) penerima satya lencana 30 tahun, otomatis dapat naik pangkat satu tingkat lebih tinggi;
    - b) penerima satya lencana 20 tahun, 1 tahun dalam pangkat terakhir dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi;
    - c) penerima satya lencana 10 tahun, 2 tahun dalam pangkat terakhir dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi;

4. Usulan penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian negara:
- a. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - b. PP No. 6 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS;
  - c. Rancangan PP tentang Pelatihan Jabatan PNS;
  - d. Rancangan PP tentang PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;
  - e. Rancangan PP tentang PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;
  - f. Rancangan PP tentang Pengangkatan dalam Pangkat PNS;

- g. Rancangan PP tentang Perubahan PP No. 20 Tahun 1975 Jo. PP No. 19 tahun 1991 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Seluruh rancangan UU dan PP tersebut sudah diteruskan kepada Presiden.

### **Tanya Jawab**

- a. Dalam kaitan penataan skema pensiun, apakah PNS yang memasuki usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian tanpa harus memenuhi persyaratan 4 tahun dalam pangkat terakhir.

Jawaban: bahwa hal itu sudah dimasukkan dalam rencana skema pensiun sedangkan perubahan BUP PNS belum ada.

- b. Merespon adanya upaya peningkatan profesionalitas dalam hal sistem pintu masuk ganda, apakah lulusan perguruan tinggi swasta yang belum diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Dikti mendapat perlakuan yang sama dengan PTS yang sudah diakreditasi.

Jawaban: bahwa hal itu hanya diberikan bagi lulusan PTN dan PTS yang sudah diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Dikti.

- c. Rektor ITS mempertanyakan kejelasan status rektor berdasarkan Kepmendikbud yang menyebutkan bahwa rektor adalah tugas tambahan, bukan lagi jabatan struktural.

Jawaban: Kepala BAKN menyatakan belum mengetahui secara pasti isi dari Kepmendikbud tersebut.

- d. Usul pembebasan PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol, mengapa belum ada penyelesaian dari BAKN.

Jawaban: bahwa usul yang diproses sampai ke BAKN bagi PNS di lingkungan perguruan tinggi hanya untuk rektor saja. Caranya

rektor mengusulkan ke Sekretaris Jenderal melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- e. Ekivalensi pangkat anggota ABRI yang beralih menjadi pegawai sipil.

Jawaban: Kepala BAKN menyatakan bahwa seharusnya dilihat dari jabatan apa yang akan diduduki dan bagaimana syarat jabatannya yang pernah dilakukan adalah pangkat kolonel ekivalen dengan golongan IV/a.

- f. Sejalan dengan upaya peningkatan profesionalitas, mengapa pengangkatan guru SD tidak dipersyaratkan memiliki ijazah S1.

Jawaban: Kepala BAKN menjelaskan bahwa idealnya memang S1 seperti persyaratan pengangkatan untuk guru SLTP dan SLTA tetapi dengan program penyetaraan D II itu juga sebagai upaya lain peningkatan profesional bagi guru SD. Produksi/lulusan D II masih banyak, sehingga untuk daerah tertentu lulusan dapat diserap sebagai guru SD, di sisi lain di daerah lain sudah kelebihan.

Sidang Panel II ini diakhiri tepat pukul 17.15 WIB dan selanjutnya seluruh peserta Rapat Kerja Nasional kembali ke Pusdiklat Depdikbud di Sawangan untuk mengikuti acara Rapat Kerja Nasional selanjutnya.

**BAB IV**  
**SIDANG PARIPURNA II**  
**PENYAJIAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**  
**PROGRAM**  
**TAHUN 1994/1995 S.D. 1998/1999**

**A. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah**

**Proses Persidangan**

Sidang dibuka oleh Ditjen Diklusepora dan langsung diserahkan kepada Dirjen Dikdasmen untuk memulai pengarahannya. Pengarahan dilaksanakan dengan menggunakan proyektor dan bantuan program pendengar, paparan cukup lancar dan di hadiri oleh sebagian besar peserta Rakernas.

Para peserta cukup aktif, banyak pertanyaan. Namun, pembahasan tidak karena keterbatasan waktu yang dialokasikan hanya 60 menit untuk dua pembicara yaitu Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Dikti. Penyampaian pertanyaan di bagi menjadi dua tahap, masing-masing diberikan kesempatan pada 5 penanya.

**Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Dirjen Dikdasmen membuka paparannya dengan menjelaskan beberapa isu penting yang mendasari kerja selama ini dan kemudian bagaimana kita akan memperbaiki etos kerja, kebijaksanaan strategi, dan prioritas yang perlu kita lakukan.
2. Kita sudah sepakat akan menciptakan bangsa yang unggul dengan beberapa parameter yang sudah disepakati, tetapi bagaimana

secara strategi hal ini dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, yaitu mewujudkan bangsa yang beriman dan beragama, mempunyai intelektual, dan berbudi pekerti, luhur, mempunyai emosional inteligen yang tinggi, sehat jasmani dan rohani, kreatif, inovatif dan proaktif.

3. Kalau dilihat kondisi negara saat ini, strategi pembangunan bidang pendidikan dasar dan menengah yang dahulu dikemukakan masih relevan, yaitu pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan efektifitas.
4. Untuk ke depan, kita harus dapat melihat sumber-sumber di luar Depdikbud atau Dikdasmen sebagai bagian dari upaya pengembangan pendidikan, karena terbatasnya dana dan bagaimana membuat sekolah swasta benar-benar merupakan mitra bukan saingan serta bagaimana meningkatkan partisipasi komunitas.
5. Kalau dilihat kondisi kita saat ini seperti disampaikan Bapak Presiden maka kita sedang mengalami reformasi total. Pada saat yang bersamaan kita harus mengatasi berbagai krisis, menghadapi tantangan global dan isu desentralisasi. Keempat faktor ini akan mewarnai bagaimana kita merumuskan berbagai kebijakan, dan melakukan reformasi di bidang pendidikan sementara pada saat yang bersamaan kita harus mengatasi krisis, namun mutu tetap harus ditingkatkan, karena dunia global tidak menunggu kita siap termasuk bagaimana kita menghadapi isu desentralisasi.
6. Kita tidak dapat keluar dari paradigma yaitu Wajar Dikdas 9 Tahun yang harus tetap kita laksanakan. karena struktur tenaga kerja kita 60% SD akan membuat negara kita tidak kompetitif.

7. Angka partisipasi kasar SD sudah mencapai target 114,17%, yaitu anak yang bersekolah lebih banyak dari yang berusia 7-12 tahun. Oleh karena itu, isu pada Sekolah Dasar adalah bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan, termasuk mutu guru, mutu buku, bagaimana kita mengadakan re-grouping, dan lain-lain.
8. Pada tingkat SLTP, masih ada gap, antara anak yang seharusnya sekolah, pembangunan ruang, penyediaan guru, dan sebagainya. Hal ini yang harus kita penuhi dimasa depan. Kesenjangan ini sangat besar sekali tahun 1994/1995 lebih kurang 6 juta dan tahun 1998/1999 lebih kurang 4 juta. Ini berarti kalau program pencahangan wajib belajar dan pencahangan pendaftaran dini anak usia sekolah bagi keluarga miskin berhasil baik, maka seluruh banku SLTP akan terpenuhi.
9. Alternatif lain yang ditempuh adalah melalui program SLTP terbuka dan program paket B, tetapi penyelenggaraan SLTP terbuka bukan sesuatu yang murah.
10. Dalam kondisi krisis ini, pembangunan RKB untuk SLTP terjadi penurunan pada tahun 1998/1999. Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain terbatasnya dana pemerintah, di pihak lain kemampuan kita untuk membangun dengan bagus pun terbatas. Untuk itu, Bank Dunia telah membantu pembangunan RKB, tetapi mutu bangunan selalu menurun. Hal ini berakibat dana yang di gulirkan banyak yang ditunda atau distop. Evaluasi menunjukkan hal tersebut disebabkan karena tidak berjalannya fungsi-fungsi yang diperankan oleh Kanwil, Kandep Dikbud Kab/Kodya atau kontraktor-kontraktor yang ada di daerah.
11. Hasil penelitian yang dikelola Balitbang Dikbud tentang nilai EBTANAS Murni, di tingkat SD, SLTP, SMU, dan SMK, secara

garis besar menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita laksanakan untuk meningkatkan mutu, baik untuk tingkat SD, SLTP, SMU maupun untuk SMK.

12. Jaring Pengaman Sosial (JPS) bertujuan untuk bagaimana kita bisa mempertahankan tingkat angka partisipasi, mempertahankan tingkat mutu yang ada dan mengajak masyarakat bersama-sama untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang melanda Indonesia saat ini. Jadi JPS bukan untuk meningkatkan mutu. JPS tidak dapat membuat semua orang senang, karena dananya terbatas, kalau JPS berhasil tanpa hambatan, maka masih ada sekian juta anak sekolah yang perlu bantuan dari pemerintah. Sementara itu, dari dampak krisis ini, droup out rate semakin meningkat, anggaran tidak memadai, biaya langsung pendidikan semakin meningkat dan kesadaran swasta dalam investasi pendidikan ikut turun karena prioritas perut lebih diutamakan.
13. Beberapa periode yang harus kita lewati dalam melaksanakan JPS, yaitu *rescue periode* (1998/1999 - 1999/2000), *recovery periode* (1999/2000 - 2002/2003), dan *expansi periode* dimulai tahun 2000/2009. Kalau dilihat dari data-data yang ada, dari 200 sample yang diambil kelihatannya APK sudah kembali seperti sebelum krisis, penyebabnya bukan hanya karena JPS, tetapi juga karena adanya deregulasi-deregulasi yang dilaksanakan pemerintah di bidang pendidikan, dan kesadaran masyarakat meningkat untuk bergotong - royong mengatasi kemiskinan.
14. Sebagai gambaran kasar, bahwa JPS itu hanya dapat menjangkau 6% dari jumlah siswa SD, 17% SLTP, dan 10% SMU, yang lain diharapkan dapat ditanggulangi oleh Yayasan Supersemar, Orbit, atau yayasan GN-OTA dan komunitas.

15. JPS juga memberikan bantuan operasional langsung ke sekolah yang paling miskin, 60% sekolah yang paling miskin mendapat bantuan baik SD, SLTP, SMU, SMK dan Madrasah. Bantuan ini ditentukan oleh aparat Kab/Kodya yang anggarannya 50% dari JPS dan 50% dari aparat pemerintah.
16. Kampanye Aku Anak Sekolah dilakukan untuk dapat mendorong pemberian bantuan dari komunitas dan mengurangi beban.
17. Deregulasi di bidang pendidikan dasar dan menengah juga dilakukan antara lain melalui: pengaturan seragam sekolah, EBANAS SD/MI, pembebanan pungutan, peran BP3 dan kemandirian sekolah, peran swasta di tingkatkan, dan desentralisasi kewenangan Pusat ke Kabupaten dan sekolah.
18. Peningkatan mutu pendidikan di laksanakan pada semua jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
19. Peningkatan mutu Pendidikan taman kanak-kanak dilaksanakan melalui pembinaan terhadap penyelenggara/guru TK agar lebih memahami konsepsi dan hakekat pendidikan TK. Dialog antara para pakar telah dilaksanakan, dengan organisasi yang menyelenggarakan TK yang benar tidak menghancurkan anak-anak pada usia dini, karena orang tua buru-buru ingin anaknya pintar, dengan cepat mampu membaca, mampu berhitung, mampu menulis. Jadi, belajar melalui dasar-dasar bermain akan kita tekankan.
20. Pendidikan SD dengan angka partisipasi yang sudah tinggi, akan diutamakan pada peningkatan akses dan mutu. Akses pendidikan pada wilayah terpencil akan lebih diperhatikan, terutama dalam hal pengangkatan guru-guru SPG karena pada kenyataannya

banyak tamatan PGSD yang tidak mau berangkat ke daerah terpencil, juga penyediaan beasiswa dan DBO.

21. Peningkatan mutu sekolah dasar diupayakan melalui sistim gugus (cluster system), dan revitalisasi (penggabungan) SD.
22. Pembinaan sekolah dasar dilakukan dengan menahan angka putus sekolah melalui beasiswa dan DBO, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin, pelaksanaan SD kecil satu guru (*one teacher school*) di daerah terpencil, dan peningkatan mutu pendidikan melalui desiminasi PEQIP, perluasan basic education, dll yang dilaksanakan di setiap kabupaten dan kualitasnya tidak berbeda antar kabupaten.
23. Pembinaan sekolah luar biasa, belum terlalu mendapatkan perhatian. Sinyalemen BBC, bahwa sekolah terpadu itu omong kosong karena pada kenyataannya banyak anak cacat yang datang ke sekolah di tolak, oleh kita karenanya ke depan perlu keseriusan kita, dalam menangani sekolah terpadu. Untuk itu, perlu di anggarkan, dilaksanakan, dan diawasi.
24. Pelaksanaan SLTP, masih mengalami angka putus sekolah yang meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 1997/1998 sebesar 3,49% (262,8 ribu) dan tahun 1998/1999 sebesar 6,19% (492,3 ribu), karena berbagai faktor, yaitu miskin, geografi, motivasi, akses, dsb. Untuk itu akan dilakukan, deregulasi pendidikan yaitu dengan pembebasan sumbangan, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, dan bantuan imbal swadaya bagi sekolah-sekolah swasta, pembangunan SLTP Negeri yang tidak hanya dilihat dari lokasi yang dapat dibeli, tetap juga dilihat dari keberadaan sekolah swasta, jangan sampai sekolah swastanya mati, karenanya harus ada kesepakatan dengan sekolah swasta dalam menentukan sekolah negeri yang baru.

25. Program pembinaan SLTP yang akan datang, akan ditingkatkan program beasiswa dan DBO secara tepat sasaran dan tepat waktu, penjangkauan langsung calon siswa atau siswa putus sekolah agar dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, Optimalisasi SLTP terbuka, SLTP kecil, SLTP terpadu, dan SLTP keterampilan, serta pemberian bantuan untuk swadaya bagi SLTP swasta.
26. Peningkatan mutu SDM berbasiskan sekolah diupayakan terukur di sekolah, jadi kalau gurunya tambah pintar, kurikulumnya lebih bagus, alatnya lebih lengkap, maka diharapkan muridnya tambah pintar.
27. Kekurangsesuaian SMK dengan kebutuhan masyarakat akan dievaluasi kembali dengan restructuring kebutuhan guru dan reengineering reorientasi serta penyesuaian guna mendukung ekonomi riil seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan lain sebagainya.
28. Masih banyak berbagai masalah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang perlu mendapat berbagai masukan dari kawan-kawan semua yaitu
  - a. pungutan-pungutan;
  - b. pengangkatan kepala sekolah SMU/SMK;
  - c. pendidikan agama dan budi pekerti;
  - d. akreditasi;
  - e. penerimaan siswa baru;
  - f. pendaftaran dini anak usia sekolah keluarga miskin;
  - g. tawuran;
  - h. dampak kerusuhan;
  - i. komputerisasi EBTA/EBTANAS.

- j. desentralisasi pendidikan;
- k. penyempurnaan kurikulum;
- l. penyempurnaan pengadaan UGB/USB;
- m. sekolah internasional;
- n. percepatan belajar;
- o. ekstra kurikuler;
- p. pemerataan guru;
- q. pengadaan buku paket;
- r. guru dan tenaga kependidikan;
- s. pengangkatan pengawas dan widyaiswara.

Dari beberapa masalah tersebut ada yang perlu kita garis bawahi yaitu MPR telah mengeluarkan TAP No. X/MPR/1999 yang berisi bahwa peserta didik harus mendapatkan pendidikan agama dan penilaian sesuai dengan agama masing-masing. Jadi, yang Kristen dididik Kristen, yang Katholik-Katholik, yang Budha-Budha, yang Hindu-Hindu, dan yang Islam dididik Islam tanpa kecuali. Mulai tahun ini hal ini akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kita perlu persamaan sikap bagaimana mengoperasionalisasikan dengan baik.

### **Tanya Jawab**

Selanjutnya diteruskan dengan tanya jawab.

1. Rektor IKIP Jakarta, ada 4 pertanyaan:
  - a. Strategi penyempurnaan yang berhubungan EBTANAS tidak atau belum digunakan untuk perbaikan sekolah/peningkatan mutu. Apakah policy EBTANAS ini akan diteruskan atau ditransformasikan dalam bentuk yang lebih fleksibel yaitu sesuai dengan school base policy pada sekolah untuk melaksanakan ujian dan menggunakan ujian itu sebagai masukan perbaikan mutu?

- b. Sistem pengembangan tenaga pendidikan bahwa sistem rekrutmen sampai dengan pengembangan pendidikan terutama guru adalah suatu sistem yang tidak terpisahkan tetapi nyatanya *policy* yang berhubungan dengan itu tidak kelihatan dan kelihatannya antara pendidikan pra jabatan dan latihan didalam jabatan itu tidak ada kaitannya satu sama lain.
  - c. Ada sekitar 600 miliar/thn untuk penataran guru, apakah tidak sebaiknya dana 600 miliar itu dibagi untuk kesejahteraan guru dan selanjutnya menyerahkan pengembangan kemampuan guru itu ke sekolah-sekolah sesuai dengan *policy* yang baru.
  - d. Kita dihadapkan dan didorong untuk menjaga drop out agar tetap stabil, tapi nyatanya angka *drop out* bertambah hampir dua kali lipat, dalam hal ini apakah kita akan mengampanyekan terus-menerus *ayo terus sekolah atau ayo terus belajar*? Apakah tidak sebaiknya mengalihkan anggaran dari Dirjen Dikdasmen ke Dirjen Diklusepora untuk menggalakkan pendidikan luar sekolah sebagai suatu alternatif tanpa kita melupakan tujuan dari pada pendidikan dasar 9 tahun.
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Jawa Tengah  
Kekurangan guru di Jawa Tengah yang sangat banyak dan akan menghambat peningkatan mutu? Padahal cadangan calon guru di Jawa Tengah cukup banyak, namun kendala formasi guru sangat terbatas.
3. Rektor IKIP Jakarta
- a. Apakah ada pikiran untuk merubah Undang-undang No. 2 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebab

undang-undang pendidikan hanya mengatur tentang persekolahan, bagaimana pendidikan di luar sekolah itu bisa berkembang? Kalau undang-undang hanya mengatur persekolahan, sekolah menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk segala-galanya, sehingga menjadi rancu.

- b. Hambatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, apabila dilihat dari struktur tenaga kerja Depnaker bahwa banyak lulusan sekolah dasar yang diterima sebagai tenaga kerja, selanjutnya lulusan SLTP, SMU, SMK, dan baru perguruan tinggi. Apakah ini tidak menghambat keberhasilan wajar Dikdas 9 Tahun? Apa perlu diadakan koordinasi dengan Depnaker supaya tidak menerima lulusan SD?

4. Direktur Kesenian

- a. Sekolah kejuruan masih berorientasi pada kemajuan ekonomi/pasar, padahal masih ada SMKI (kesenian) yang mempunyai urusan menyeimbangkan kepentingan jasmani dan rohani, ini belum tergarap dengan baik? Di lain segi guru kesenian untuk sekolah umum maupun kejuruan belum terpenuhi dengan baik?
- b. Keadaan di luar pendidikan, yaitu TV, perlu ada sinergy yang tepat antara Depdikbud dan Deppen, sebab TV selalu berorientasi perkotaan sedangkan mayoritas anak didik bertempat tinggal di pedesaan sehingga hidupnya seakan mimpi saja, melihat TV-nya seperti itu, tapi kenyataan seperti ini.

5. Atdikbud Bangkok

- a. Kalau mutu SD menjadi kebijakan utama, bagaimana bila EBTANAS dilakukan pada akhir kelas III SD supaya tidak

terlalu terlambat untuk mengevaluasi proses belajar mengajar yang tidak efektif sehingga dapat diperbaiki menjelang ujian akhir?

- b. Mengenai *School Based Management* merupakan suatu yang sangat radikal karena selama ini sangat terpusat. Agar sekolah dapat mengambil keputusan dan memiliki percaya diri maka sekolah perlu dilengkapi buku-buku, bila perlu menerjemahkan buku-buku asing/bahasa Inggris?

### **Jawaban Dirjen Dikdasmen**

1. EBTANAS sampai sekarang masih diperlukan, karena memang baru ini yang kita miliki, di negara maju pun (Amerika Serikat), masih menggunakan sistem ini, siswa tidak dapat melanjutkan sekolah kalau nilai belum mencapai 6,5. Di negara kita EBTANAS hanya empat pelajaran yang diberikan. yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana menjaga kelancaran pelaksanaannya dengan sistem komputerisasi. Kalau dikaitkan dengan school base bagaimana kalau sekolah mengadakan semacam EBTANAS seperti mata pelajaran kesenian atau olahraga sehingga tidak terjadi intelektual heavy yang seperti Bapak sampaikan, jeleknya sebenarnya maksud EBTANAS dilaksanakan empat pelajaran atau lima pelajaran bukannya kita langsung mengabaikan apa yang harus diujikan atau kompetensi apa yang harus dicapai di SD dan SLTP. Tapi karena ini suatu ukuran kita konsentrasi di situ lalu kita *manage* yang bagus NEM nya tinggi lalu mengabaikan menggambar, mengarang dan lain sebagainya. Secara konseptual kita ingin mengembalikan hal ini. mungkin EBTANAS kita kombinasikan terlebih dahulu, belum langsung fully school base di laksanakan, tapi ada beberapa mata

pelajaran mungkin sudah di laksanakan oleh sekolah tapi bagian dari EBTANAS, mungkin menggambar atau mengarang, olahraga, atau mungkin bahasa Indonesia. Kedepan kita tetap melaksanakan EBTANAS.

2. EBTANAS dilakukan untuk mengevaluasi suatu kompetensi yang ada, memang ada beberapa teman-teman yang mengusulkan agar EBTANAS di hapuskan? Hal ini dapat dilakukan kalau daya tampung terpenuhi. Saat ini masih ada 6 juta yang dan belum tertampung, sehingga tetap masih ada persaingan untuk masuk SLTP, di samping ada SLTP favorit yang diminati banyak siswa sehingga kalau tidak ada suatu mekanisme untuk menjarang bisa kita bayangkan ada SLTP yang mengadakan semacam UMSLTP sendiri-sendiri. Ini memang kondisi yang belum ideal, perlu kita coba bersama melihat apa cara untuk menilai kompetensi yang tidak rumit.
3. Mengenai masalah guru, masalah *pre-service* dan *on service* training guru yang belum kita layani dengan baik, walaupun PPPG dan BPG mengerahkan tenaganya secara maksimal dan LPTK yang melaksanakan pengadaan tenaga guru telah bekerja secara maksimal, namun masih banyak guru-guru yang belum terjangkau kedua lembaga ini, jadi bagaimana kita duduk bersama bersinergi.
4. Mengenai uang 600 milyar saat ini, untuk menambah kesejahteraan guru Rp 50.000,- saja dibutuhkan dana 1,2 triliun.
5. Isu mutu, dalam krisis ini kita masih berusaha mempertahankan mutu dalam rangka menghadapi era-globalisasi.
6. Angka *droup out* bertambah, masalah kampanye *ayo belajar atau ayo sekolah* saya kira antara sekolah yang konvensional dengan pendidikan luar sekolah itu hal yang saling di butuhkan tidak

ada masalah, kami mendukung program yang di laksanakan oleh Dirjen Diklusepora.

7. Masalah kekurangan guru di Jawa Tengah, kita harus mengambil skala prioritas dengan memperhatikan sekelompok anak didik dari bangsa ini kita harus dididik dengan cara yang bagus, yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang kita dambakan bersama karena kemampuan kita terbatas.
8. Alasan kita meningkatkan Wajar 6 Tahun ke Wajar 9 Tahun adalah memenuhi struktur tenaga kerja, kami setuju mengadakan koordinasi Depnaker.
9. Sekolah kejuruan harus berorientasi kepada pasar, supaya kalau mereka sudah dididik bisa langsung bekerja. Kalau SMKI ini ada sesuatu perkecualian yang harus kita perhatikan konsumsinya lain, guru kesenian memang sulit untuk diperoleh dan ini bagian yang sangat penting di dalam kurikulum kita sehingga SMKI harus tetap kita pertahankan.
10. Mengenai TV ini adalah program makro yang harus bersama-sama kita siapkan dengan Deppen.
11. EBTANAS untuk akhir kelas II SD nanti bisa kita bicarakan bersama, tapi saat ini sudah dilaksanakan ujian catur wulan yang sebenarnya bisa dijadikan evaluasi seperti yang dimaksud.

## **B. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**

### **Proses Persidangan**

Sidang sajian hasil evaluasi Dikti ini merupakan Sidang Paripurna I, yang disampaikan secara langsung oleh Prof.Dr.Ir. Satriyo Soemantri

Brodjonegoro Direktur Jenderal Dikti dengan menggunakan metode transparansi.

Sidang ini diikuti seluruh peserta Rapat Kerja Nasional dan para pejabat eselon I pada Unit Utama Pusat Depdikbud. Setelah selesai, sajian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, meliputi pertanyaan untuk Direktur Jenderal Dikdasmen dan Direktur Jenderal Dikti, selama 30 menit sehingga secara keseluruhan sajian ini selesai tepat pukul 09.00 WIB.

### **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Evaluasi program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) merupakan gambaran singkat tentang pelaksanaan rencana dan program pembinaan pendidikan tinggi sejak tahun 1994/1995 s.d. 1998/1999 serta permasalahan yang dihadapi dan usaha penanggulangannya.  
Ruang lingkup hasil evaluasi ini adalah meliputi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Dikti, yaitu 52 universitas/institut/sekolah tinggi/akademi/politeknik negeri, 12 wilayah kopertis yang membina 1.449 perguruan tinggi swasta, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Dikti.
2. Acuan yang dipergunakan dalam melakukan evaluasi adalah Wawasan 2018 untuk pencapaian misi Sistem Pendidikan Tinggi Nasional, dimana telah ditemukenal tiga masalah utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
  - a. Penataan sistem yang meliputi: perilaku efektif sistem dalam peran kelembagaan serta keefektifan dalam penyelenggaraan fungsi sistemiknya;

- b. Mutu dan relevansi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumberdaya pendidikan tinggi dan pembinaan mahasiswa;
  - c. Pemerataan pendidikan tinggi, meliputi (1) kesempatan bagi calon mahasiswa daerah terbatas (2) akses bagi pelaku pembangunan di daerah kawasan Indonesia Bagian Barat dan Timur juga terbatas.
3. Program-program prioritas Direktorat Jenderal Dikti selama kurun waktu tersebut adalah:
  - a. penataan sistem pendidikan tinggi;
  - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
  - c. pemerataan pendidikan;
  - d. pengembangan LPTK;
  - e. pengembangan kegiatan kemahasiswaan;
  - f. pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program tersebut ditunjukkan dengan:
  - a. Perkembangan angka partisipasi kasar (APK) yang cenderung menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak terlalu besar, yaitu 11,8 pada tahun 1994 dan 11,9 pada tahun 1998 dimana terjadi penurunan APK pada tahun 1996 menjadi 11,5.
  - b. Daya tampung perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru yaitu 626.300 mahasiswa pada tahun 1994 menjadi 681.200 pada tahun 1998.

- c. Produktivitas perguruan tinggi (PT), yang ditunjukkan dengan angka produktivitas PT/PTS baik program Diploma maupun S1 yang menunjukkan adanya peningkatan.
  - d. Peningkatan kualitas dosen yang ditunjukkan antara lain dengan semakin bertambahnya dosen yang berpendidikan tingkat S2 dan S3.
  - e. Volume hasil penelitian yang meningkat pesat terutama tahun 1997 dan tahun 1998.
  - f. Meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pengembangan kemahasiswaan.
5. Di samping hal itu, beberapa hal lain yang telah dicapai adalah akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk program studi S1 tahun 1996 s.d. 1998 dan terjadi penurunan jumlah perguruan tinggi yang diakreditasi dibandingkan dengan target.
  6. Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat tindak lanjut, meliputi aspek:
    - a. pemantapan Manajemen Mutu Terpadu (MMT);
    - b. aktualisasi azas otonomi;
    - c. sinergi;
    - d. pencarian sumber daya baru;
    - e. kualitas ketenagaan;
    - f. kurikulum fleksibel;
    - g. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    - h. sarana/prasarana/fasilitas;
    - i. kerjasama kemitraan;
    - j. program studi/jurusan/fakultas;

- k. beasiswa dan SPP yang proporsional;
  - l. peran PTS/PTK/PTA dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja;
  - m. wawasan kebangsaan;
  - n. peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun; serta
  - o. pengembangan LPTK.
7. Dari isu strategis di atas, diusulkan kebijaksanaan umum sebagai berikut:
- a. Menata sistem pendidikan tinggi dalam rangka efisiensi dan produktivitas PT melalui otonomi.
  - b. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.
  - c. Meningkatkan perluasan kesempatan belajar di perguruan tinggi.
  - d. Meningkatkan peran PTS, PTK, PTA dan mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
  - e. Meningkatkan peran perguruan tinggi untuk Wajar Dikdas 9 Tahun dan pengembangan LPTK.
  - f. Meningkatkan dinamika kampus dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan, serta
  - g. Meningkatkan penelitian dan pengembangan.

Sajian secara lengkap dapat dilihat pada bahan paparan dari Direktorat Jenderal Dikti dengan judul Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 1994/1995 s.d. 1998/1999 dan Usul Kebijaksanaan Umum Pendidikan Tinggi.

## **C. Direktorat Jenderal Diklusepora**

### **Proses Persidangan**

Pimpinan sidang memberitahukan kepada peserta bahwa dalam Sidang Paripurna II (hari kedua) akan ditampilkan dua orang penyaji, masing-masing Prof.Dr. Soedijarto, MA Direktur Jenderal Diklusepora yang akan menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan program 1994/1995 s.d. 1998/1999 dan Rencana Kebijakan Umum Diklusepora dan Prof.Dr. Edi Sedyawati Direktur Jenderal Kebudayaan yang akan menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program 1994/1995 s.d. 1998/1999 dan Rencana Kebijakan Umum Kebudayaan.

Sidang Paripurna II ini diikuti oleh seluruh peserta Rapat Kerja Nasional, dan juga Prof.Dr.Ir. Satriyo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jenderal Dikti, Sofian Effendi Sekretaris Jenderal, Dr.Ir. Indra Djati Sidi Direktur Jenderal Dikdasmen, Prof.Dr. Edi Sedyawati Direktur Jenderal Kebudayaan dan Dr. M. Boediono Soedjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Suasana sidang nampak begitu tenang, terbuka penuh kekeluargaan dan diikuti dengan serius dan penuh perhatian dari seluruh peserta Rapat Kerja Nasional.

Sajian dari Direktur Jenderal Diklusepora disampaikan dalam waktu 18 menit. Karena sidang ini bersifat panel, acara tanya jawab dilakukan setelah sajian dari Direktur Jenderal Kebudayaan. Pada sesi tanya jawab terdapat empat orang penanya, yang kesemuanya dijawab oleh Prof.Dr. Soedijarto, MA Direktur Jenderal Diklusepora.

## **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Tugas Diklusepora meliputi pendidikan luar sekolah (PLS), pembinaan generasi muda, keolahragaan, dan unsur pendukung yaitu ketenagaan.
2. Program Diklusepora meliputi keaksaraan dasar, kesetaraan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan anak usia dini dan pendidikan kewanitaan.  
Apabila Indonesia sudah makmur, Diklusepora hanya bertugas untuk mengurus pendidikan berkelanjutan. Karena Indonesia belum makmur maka pendidikan sekolah tidak mampu menyiapkan warga belajar yang bisa mandiri tanpa ditunjang oleh pendidikan luar sekolah.
3. Program pembinaan generasi muda meliputi Paskibraka, pertukaran pemuda, latihan kepemimpinan, pendidikan politik (ini yang diurus langsung oleh Menpora), kelompok pemuda produktif, SP3, kepramukaan, kepalangmerahan, dan pembinaan anak remaja.  
Program ini diharapkan menjadi penyiap generasi muda yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, pewaris nilai luhur dan insan pembangunan.
4. Program pembinaan keolahragaan, meliputi pemassalan, pembibitan, pembinaan prestasi, pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani dan rekreasi.
5. Program ketenagaan dan kelembagaan, semua ini anggarannya tidak ada 0,2% nya dari anggaran Direktorat Jenderal Dikti dan Direktorat Jenderal Dikdasmen. Dengan sasaran jutaan orang, jadi kalau prestasi olahraga rendah karena tidak ada uangnya.

6. Tantangan masih banyak yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Diklusepora sehingga masih memerlukan pendidikan luar sekolah, yaitu bahwa usia 10 tahun ke atas yang masih buta aksara sebesar 15%, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah usia 10-44 tahun sebesar 6%, tetapi yang dibiayai tidak lebih dari beberapa juta orang saja.
7. Jumlah anak yang tidak sekolah dan putus SD adalah 5% dan 3,7% sehingga dibuat program paket A setara SD, program keaksaraan dasar, program paket B setara SLTP dan pembinaan anak usia dini.
8. Mulai tahun 1999 Depdikbud akan mengadakan proyek di 3 wilayah Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Selatan yaitu proyek pembinaan anak usia dini untuk anak umum 0-6 tahun dan semuanya diarahkan kepada desa.
9. Pembinaan generasi muda, yang meliputi: SP3, pertukaran pemuda antar propinsi dan antar negara, LKPP, napak tilas jejak pahlawan. Dalam pertukaran pemuda antar propinsi diakhiri dengan perkemahan nusantara.
10. Berkaitan dengan keolahragaan, mulai tahun anggaran 1996/1997 dilaksanakan pembinaan terhadap klub-klub olahraga.
11. Dengan adanya program pengentasan kemiskinan, Diklusepora diberi dana untuk mengadakan program yang dapat mengentaskan kemiskinan, dengan cara: membina anak jalanan, membina anak usia sekolah yang terpaksa bekerja, meningkatkan jumlah penerima beasiswa untuk ikut kursus dan magang, mengadakan latihan pemuda produktif, yang mula-mula hanya dilatih kini diberi modal Rp. 2.000.000,00 per kelompok, dan SP3 ditambah jumlahnya menjadi 9.000 orang meliputi juga pendamping pengentasan kemiskinan.

12. Mulai tahun ini diadakan PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai suatu upaya untuk menggerakkan masyarakat agar dapat memberikan layanan pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh masyarakat, seluruh Indonesia berjumlah 600 orang.
13. Tenaga kependidikan yang dikelola oleh Diklusepora adalah tenaga penilik olahraga, tenaga teknis pamong belajar di 300 SKB dan 20 BPKB di seluruh Indonesia. SKB dan BPKB yang ada di kabupaten-kabupaten akan tetap dipelihara sebagai aset Pusat.

### **Tanya Jawab**

1. Pertanyaan dari Rektor IKIP Surabaya
  - a. Bagaimana memberdayakan PPLP itu menjadi bermutu, sehingga masukannya dapat ditampung dalam pembinaan lebih lanjut oleh KONI?
  - b. Bagaimana program PPLM itu, mohon untuk mendapatkan elaborasi, sehingga perguruan tinggi dapat ikut dalam pembinaan PPLM tersebut?
  - c. Bagaimana program-program lebih lanjut dalam kaitannya dengan pembinaan prestasi olahraga nasional?
  - d. Bagaimana link antara pendidikan jasmani dengan PPLP ini, sekaligus dana yang sedikit itu dapat dikontribusi dari Dikdasmen, juga dengan Dikti dalam kaitannya dengan PPLM, harus dilaksanakan pendekatan kesentuhan.
2. Pertanyaan dari Rektor IKIP Bandung
  - a. Dapatkah kita menjadikan istilah lama dulu pemberantasan buta huruf sebagai program yang mempunyai skala tinggi dan sebagai prioritas nasional?

- b. Dapatkah kita di jajaran Depdikbud memprioritaskan program ini dan menjadikannya sebagai gerakan nasional?
3. Rangkuman-tanggapan dari Direktur Jenderal Diklusepora
    - a. Dalam kaitannya dengan Dikdasmen, Diklusepora mempunyai tugas pendidikan luar sekolah yang semakin kecil, apabila pendidikan sekolah telah mantap.
    - b. Seyogyanya sekolah sebagai pusat pendidikan olahraga, namun karena kurang dan tidak adanya lapangan olahraga, guru olahraga dan ruang serbaguna sebagai tempat latihan, maka untuk itu diadakan PPLP dan PPLM.
    - c. Dalam keterkaitan antara perguruan tinggi (PT) dengan PPLM, adalah diharapkan agar PT-PT terutama yang besar bekerjasama untuk membuat PPLM yang dilengkapi dengan asrama mahasiswa, ruang kuliah, lapangan olahraga dan sarana prasarana untuk latihan.
    - d. Untuk mengatasi anggapan masyarakat bahwa pemberantasan buta aksara tidak berguna atau bermanfaat bagi masyarakat adalah dengan cara dikembangkan keaksaraan fungsional yaitu suatu bahan belajar yang dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar masyarakat setempat.
    - e. Diharapkan kita sebagai pejabat negara tidak akan mempersoalkan UUD 1945, tetapi melaksanakan UUD 1945 karena telah disumpah sebagai pejabat negara untuk melaksanakan UUD 1945.

## **D. Direktorat Jenderal Kebudayaan**

### **Proses Persidangan**

Materi ini merupakan paparan kedua dari Sidang Paripurna II dan dimulai pukul 09.30 WIB. Pemaparan disampaikan secara langsung oleh Prof.Dr. Edi Sedyawati Direktur Jenderal Kebudayaan selama sepuluh menit dan dilanjutkan dengan forum tanya jawab. Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan menyampaikan hasil pelaksanaan program Repelita VI, enam permasalahan pokok kebudayaan Indonesia dewasa ini dan proses pembudayaan masyarakat.

### **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

- 1 Hasil pelaksanaan program kebudayaan selama Repelita VI adalah sebagai berikut.:
  - a. program pembinaan ketenagaan kependidikan dan kebudayaan meliputi penataran, pemberian beasiswa, pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk penilik kebudayaan;
  - b. program operasi dan perawatan fasilitas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) berupa rehabilitasi gedung kantor taman budaya, museum, perawatan alarm sistem, perawatan peralatan kantor dan teknis.
  - c. program pengkajian dan pembinaan nilai “budaya”;
  - d. program pembinaan kebahasaan, kesastraan dan kepustakaan;
  - e. program pembinaan kesenian;
  - f. program pembinaan tradisi, peninggalan sejarah, purbakala dan permuseuman dengan mengadakan inventarisasi dan

- dokumentasi sejarah nasional, serta melaksanakan pemugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala, dan penelitian arkeologi;
- g. program pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - h. program pembinaan anak dan remaja.
  - i. program pengembangan sistem informasi pendidikan dan kebudayaan.
2. Berdasarkan evaluasi, permasalahan strategis yang muncul dalam pelaksanaan program kebudayaan antara lain:
- a. terbatasnya atau masih sedikitnya jumlah tenaga kebudayaan yang ditatar dan diberi beasiswa setiap tahunnya;
  - b. formasi penerimaan pegawai baru tidak sebanding dengan jumlah yang pensiun dan meninggal dunia, sebagai contoh selama Repelita VI ditargetkan penerimaan pegawai sejumlah 805 tetapi realisasi hanya 264;
  - c. dana perawatan operasional penilik kebudayaan kurang memadai;
  - d. terjadinya pergeseran tata nilai serta krisis moral;
  - e. terbatasnya tenaga pembinaan seni.
3. Permasalahan pokok kebudayaan Indonesia dewasa ini:
- a. perkembangan kebudayaan nasional;
  - b. budaya suku bangsa dalam konteks negara bangsa RI;
  - c. kecepatan perkembangan teknologi dan siswa;
  - d. keterasingan generasi muda dari warisan budaya bangsa;
  - e. eksistensi budaya Indonesia ditengah perkembangan global;
  - f. industri budaya Indonesia.

4. Proses pembudayaan melalui saluran:
  - a. keluarga dan kelompok-kelompok sosial untuk merancang program tatap muka dan penyusunan bahan acuan hasil industri budaya;
  - b. sekolah dalam program belajar mengajar, ditunjang oleh adanya pengajar dengan kemampuan memadai, dan melalui bahan ajar;
  - c. media massa dengan memanfaatkan program penyiaran, kemasan bahan siap siar, dan tersedianya tenaga ahli media, sebagai contoh saluran media massa dengan cara menggalang kerja sama dengan TV untuk memberdayakan masyarakat/pemirsa mengetahui dan menilai kebudayaan kita.

### **Tanya Jawab**

- a. Pertanyaan:

Seberapa jauh usaha Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam memperkenalkan budaya bangsa sejak usia dini, terutama untuk mengurangi dampak/pengaruh TV terhadap generasi muda?

Jawaban:

Usaha di dalam memperkenalkan budaya bangsa sejak usia dini itu di luar jangkauan Direktorat Jenderal Kebudayaan, tetapi upaya Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah diarahkan kepada agen-agensya yaitu orang tua. Sejauh ini Direktorat Jenderal Kebudayaan baru dapat mengidentifikasi nilai sosial yang muncul dari adanya tayangan sinetron. Untuk mengantisipasi nilai sosial yang tidak baik, penanganannya adalah dengan mengusulkan untuk mengimbangi tayangan produk lain yang lebih bermutu. Dalam hal ini insentif diberikan kepada produser. Sebagai contoh

Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah mempunyai sinetron dengan muatan upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat menilai suatu sinetron/film, meliputi aspek isi, sinematografi, pesan yang disampaikan, bagaimana teknik penyampaiannya dan lain-lain. Seri sinetron ini diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada penonton agar mampu menyeleksi sinetron/film sehingga layak ditayangkan.

b. Pertanyaan:

Apakah ada bentuk kerja sama kompetisi kebudayaan daerah di tingkat SMK dan SMU, dan bagaimana meningkatkan minat siswa untuk memasuki sekolah kejuruan/SMSR?

Jawaban:

Minat memasuki SMSR menurun karena ketidakjelasan masa depan lulusan, sehingga perlu ada upaya membuka/menciptakan peluang pasar kerja bagi lulusan SMSR.

c. Usulan:

Usul dari Direktur Balai Pustaka agar Direktorat Jenderal Kebudayaan turut membudayakan pelajaran moral/etika dan budi pekerti.

Tanggapan:

Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah mulai membudayakan pelajaran budi pekerti bekerja sama dengan Balai Pustaka akan menerbitkan buku-buku yang secara langsung berfungsi pula sebagai sarana publik membudayakan etika dan budi pekerti kepada masyarakat.

## **E. Sekretariat Jenderal**

### **Proses Persidangan**

Persidangan dimulai pukul 10.45 oleh pimpinan sidang, dengan penyaji yang dibawakan langsung oleh Sekretaris Jenderal Depdikbud sampai dengan pukul 11.10. Namun karena adanya pengumuman tentang para pejabat yang baru dilantik dalam periode Tahun 1998/1999 disamping juga adanya dua sajian dari Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan, maka akhir persidangan waktunya diperpanjang s.d. pukul 13.20 setelah sesi tanya jawab yang cukup banyak mengundang perhatian.

### **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal
  - a. Visinya adalah untuk melaksanakan tugas pelayanan secara prima agar memuaskan semua unsur yang dilayani.
  - b. Misinya adalah untuk melakukan pembinaan terhadap perencanaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, prasarana & sarana, serta anggaran.
2. Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan
  - a. Masalah yang dihadapi ialah bahwa tenaga perencanaan yang tersedia sekarang masih belum seimbang antara tugas dan fungsi dengan tantangan masa depan.
  - b. Untuk menghadapi masalah diatas maka kebijakan yang diambil adalah dengan membentuk sistem pembinaan & pengembangan substansi perencanaan dan SDM perencana yang berkesinambungan melalui pengembangan sistem perencanaan yang efisien dan desentralisasi serta penataan

& penyempurnaan data dan informasi untuk perencanaan pusat dan daerah disamping juga melakukan peningkatan kemampuan tenaga perencana.

3. Pengelolaan Bidang Kepegawaian

Kendala yang dihadapi dalam penyerapan formasi pegawai baru tahun 1998/1999 adalah sebagai berikut:

- a. Pelamar masih kurang untuk kualifikasi bidang pendidikan tertentu.
- b. Usul kualifikasi yang diajukan berbeda dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
- c. Nilai kelulusan masih di bawah nilai standar kelulusan.

Adapun usul formasi pegawai yang diajukan baik untuk Pusat maupun daerah = 86.184 orang pegawai, formasi untuk Pusat = 15.729 orang pegawai terserap 15.444 orang pegawai sedang formasi untuk daerah sebesar 19.198 orang pegawai khususnya untuk Guru SD dan Penjaga Sekolah.

4. Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

Masalah yang dihadapi selama ini ialah bahwa Depdikbud belum menerapkan SAP sebagai salah satu simpul jaringan informasi anggaran. Untuk itu, kebijakan yang diambil adalah dengan memperkenalkan SAP dan pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras meningkatkan SDM, serta mengkoordinasi karena dengan pihak terkait (BAKUN Departemen Keuangan).

5. Sertifikasi Aset

Masalah yang dihadapi adalah bahwa belum semua aset Depdikbud bersertifikat. Oleh karena itu maka kebijakan yang diperlukan adalah adanya SKB antara Depdikbud dengan BPN serta dana pada anggaran rutin.

6. Kelembagaan
  - a. Dalam upaya untuk melakukan perampingan organisasi, masalah yang dihadapi adalah adanya penambahan beban tugas dan pemekaran organisasi di daerah, tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan belum terbitnya Keppres tentang jabatan fungsional.  
Untuk itu, kebijakan yang diperlukan adalah perlu dilakukan reorientalisasi organisasi dan manajemen serta penetapan jabatan fungsional.
  - b. Sementara untuk mengantisipasi organisasi era otonomi daerah adalah perlu melakukan pemilahan pembagian kewenangan antara Pusat, propinsi dan kabupaten yang akan berdampak terhadap penataan baik organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, penganggaran serta sarana dan prasarana.
7. Reformasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan era reformasi. Permasalahan hukum yang dihadapi adalah masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan lemahnya sistem jaringannya. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka diperlukan kebijakan dengan melakukan pengkajian ulang dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di samping juga memperkuat sistem jaringannya.
8. Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan Lembaga Negara Dalam upaya untuk melakukan peningkatan hubungan masyarakat (humas) yang proaktif, masalah yang dihadapi adalah lemahnya kesadaran terhadap peranan hubungan masyarakat dan

hubungan antar lembaga, lemahnya sumber daya kehumasan, di samping bahwa informasi yang terseleksi belum tersaji dengan baik. Kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya kehumasan, keterpaduan pengelolaan kehumasan dan pengembangan sistem informasi kehumasan.

9. Bidang Kerja sama Luar Negeri

Masalah yang dihadapi adalah bahwa jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri tidak sesuai dengan data yang ada di Depdikbud, serta adanya pelajar dan mahasiswa yang visa dan paspornya tidak sesuai dengan peruntukannya, di samping itu anggaran Center SEAMEO juga belum terpusat pada setiap "Center" di tempat yang tepat. Kebijakan yang diperlukan adalah melakukan peninjauan kembali mengenai pedoman belajar di luar negeri dan dibentuk Tim Clearing House yang melibatkan instansi terkait serta memusatkan anggaran Center SEAMEO.

10. Pelayanan Prima Ketatausahaan

Dalam upaya untuk meraih pelayanan yang prima dalam ketatausahaan, banyak kendala yang dihadapi, antara lain belum meratanya pembinaan pada setiap unit termasuk kualitas aparat pengelolanya dan juga belum sepenuhnya dilaksanakan pedoman Tata Persuratan dan Kearsipan. Dalam hal ini perlu dilakukan kebijakan dengan mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan dan penyelenggaraan diklat serta pemyarakatan Kepmendikbud No. 091/U/1995.

11. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Masalah yang dihadapi adalah masih banyaknya pegawai yang belum dapat mengikuti diklat baik penjenjangan maupun fungsional serta masih banyaknya lulusan diklat ADUM,

SPAMA, dan SPAMEN yang belum mendapat promosi jabatan. Kebijakan yang perlu diambil adalah dengan cara meningkatkan secara kuantitas dan kualitas diklat itu sendiri serta memprioritaskan PNS yang sudah mengikuti diklat untuk pengisian jabatan lowong disamping itu seleksi calon peserta diklat diperketat sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## 12. Kegrafikaan

Masalah yang dihadapi dalam kegrafikaan adalah belum adanya kebijakan pemerintah tentang standar mutu fisik buku pelajaran dan rendahnya kualitas SDM, sehingga kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah dengan menerbitkan kebijakan Depdikbud sebagai standar mutu fisik buku dan peningkatan kualitas SDM di bidang manajemen perbukuan, teknik penerbitan dan teknik kegrafikaan.

## 13. Perbukuan

Masalah dihadapi adalah di samping rendahnya kualitas SDM dan sulitnya pendistribusian juga kurangnya minat dan motivasi untuk menulis sehingga kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan peningkatan baik terhadap kemampuan profesional staf maupun pengembangan dan pemanfaatan sistem informatika perbukuan serta seleksi calon peserta diklat kerja sama dengan masyarakat perbukuan (IKAPI, GATBI).

## **Tanya Jawab**

### 1. Pertanyaan dan Saran:

- a. adanya/tersedianya anggaran yang diperlukan untuk latihan prajabatan bagi pegawai baru;
- b. pembatasan masa jabatan struktural;

- c. sebagai pengelola keuangan perguruan tinggi (SPP) apakah selalu harus melalui Bank BNI;
- d. disarankan agar guru yang diperbantukan yang rencananya dicabut agar dapat dicairkan kembali peraturannya khususnya untuk sekolah swasta. Hal ini perlu pendekatan dengan BAKN.

## 2. Jawaban dan Tanggapan

Adapun jawaban yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal yang diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Keuangan masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa prajabatan CPNS untuk golongan III diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh LAN dan memang terdapat kesenjangan antara jumlah anggaran jumlah peserta. Untuk golongan I dan II CPNS prajabatannya dilakukan di unit kerja masing-masing dengan anggarannya diambil dari Biro Tata Usaha dan Biro Keuangan dan ditransfer ke unit kerja masing-masing;
- b. Berdasarkan Kepmendikbud 19A dan 19B, memang ada pembatasan jabatan untuk pejabat di bawah eselon II, tetapi di dalamnya ada klausul yang menyatakan bahwa jabatan tersebut masih dapat diperpanjang lagi 1 kali masa jabatan, dan apabila masih diperlukan masih dapat diperpanjang 1 kali lagi. Apabila waktunya ditotal, seorang pejabat dapat menduduki pada jabatan yang sama sampai dengan 12 tahun.
- c. Berkaitan dengan SPP perguruan tinggi yang semula hanya dikelola oleh BNI, sekarang keuangan boleh dikelola oleh bank lain sepanjang mendapat izin dari rektor perguruan tinggi yang bersangkutan dan di samping itu bank tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik.

## **F. Inspektorat Jenderal**

### **Proses Persidangan**

Sajian disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdikbud mewakili Inspektur Jenderal yang sedang berhalangan hadir. Penyajian diawali terlebih dahulu dengan informasi tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal serta pola pikir kepengawasan. Setelah penyajian hasil evaluasi pelaksanaan program dan rencana kebijaksanaan umum sidang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

### **Butir-Butir Pokok Persidangan**

1. Inspektorat Jenderal memiliki 11 kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Dari TA 1994/1995 s.d. 1998/1999 sudah tercapai sesuai sasaran meliputi 11 kegiatan yaitu pemeriksaan perhitungan anggaran, wasrik tema, pembinaan aparatur, penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT), program kerja pemeriksaan (PKP), program kerja pemantauan dan pengendalian tema terpadu, evaluasi dan telaahan sasaran pengawasan, pemantapan dan pengembangan sistem informasi pengawasan, penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pengawasan terpadu, serta penyebarluasan pengertian dan kesadaran pengawasan (forwas).
2. Tingkat pencapaian sasaran pemeriksaan umum/komprehensif dan pemantauan tindak lanjut sudah mencapai angka 96,49% dan 96,67%, sedangkan pengawasan melekat yang terdiri Laporan Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat 31,31% dan Laporan Realisasi Program Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat 33,13%.

Tingkat pencapaian sasaran pengawasan melekat yang masih rendah ini antara lain disebabkan oleh belum dipahaminya teknik penyusunan programnya, adanya budaya *ewuh pakewuh*, serta kurangnya kesadaran dan perhatian para pejabat terhadap pengawasan melekat.

3. Masalah strategis yang ada adalah pengawasan waskat belum efektif, wasnal belum berhasil, koordinasi pengawasan lemah, lembaga binap belum berfungsi, meningkatnya pengaduan masyarakat dan merebaknya isu kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), belum diimbangi dengan sistem penanganan yang mantap.
4. Temuan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal dari tahun 1994/1995 s.d. 1998/1999, dari 39.564 temuan senilai Rp. 4.596.466.016,20 sudah ditindaklanjuti sejumlah 29.625 (75%). Sementara itu uang negara yang dapat diselamatkan sejumlah Rp. 2.678.020.127,16.  
Temuan-temuan tersebut meliputi bidang teknis Dikdasmen, Diklusepora, Dikti, dan Kebudayaan. Penyebab penyimpangan terutama adalah kelemahan pembinaan personel, kelemahan dalam pengawasan internal, kelemahan perencanaan, dan prosedur.
5. Pengawasan masyarakat yang disalurkan melalui TP 5000 dan Non TP 5000 telah 50% ditanggapi dan dapat dikelompokkan ke dalam tujuh macam, berturut-turut sesuai dengan banyaknya kasus adalah:
  - a. kepegawaian/ketenagaan;
  - b. penyalahgunaan wewenang;
  - c. korupsi/pungli;

- d. pelayanan masyarakat;
- e. hukum/peradilan;
- f. tatalaksana pemerintahan/birokrasi;
- g. pertanahan/perumahan;
- h. kewaspadaan nasional.

Saat ini pengawasan masyarakat banyak memberikan informasi berbagai penyimpangan (pengaduan), terlebih-lebih dengan adanya era keterbukaan yang saat ini digulirkan oleh pemerintah.

6. Dalam pembinaan aparatur, kasus yang menonjol adalah indisipliner asusila, tindak pidana, dan pelanggaran PP 10/1980 dengan hukuman terbanyak diberhentikan tidak dengan hormat.
7. Dua isu strategis pengawasan yaitu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) belum sepenuhnya mencapai sasaran dan reformasi pengawasan menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
8. Usul kebijaksanaan pelaksanaan 1999/2000 adalah mengefektifkan Waskat, memantapkan wasnal, mengoptimalisasikan wasmas, memantapkan sistem pengawasan Depdikbud. Selanjutnya isu strategis meliputi melakukan penataan kelembagaan, ketenagaan, ketatalaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan UU Pemda.
9. Usul kebijaksanaan awal perencanaan 2000/2001 adalah bahwa perlu terus mendorong Waskat, dan memantapkan sistem pengawasan fungsional, memantapkan keterpaduan pengawasan, memantapkan koordinasi dengan instansi terkait, memantapkan kemampuan profesional, memantapkan pendayagunaan pengawasan masyarakat.  
Sementara isu strategisnya adalah melaksanakan pengawasan

terpadu program JPS, merintis penataan kelembagaan dalam pelaksanaan UU Pemda.

10. Pada forum tanya jawab, pertanyaan yang muncul adalah:
  - a. Apakah penelitian khusus (litsus) masih diperlukan dalam pengangkatan jabatan. Atas pertanyaan ini, dijelaskan bahwa sampai saat ini ketentuan tentang hal tersebut masih berlaku.
  - b. Dengan adanya desentralisasi maka besar kemungkinan kanwil bergabung dengan dinas sehingga sistem pengawasan yang diperlukan berbeda. Atas pertanyaan ini dijelaskan bahwa arah pengawasan tetap tiga yaitu waskat, wasnal, dan wasmas, tetapi bentuk lembaganya masih dikaji lebih lanjut.

## **G. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan**

### **Proses Persidangan**

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mempersilakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan paparan mengenai butir-butir laporan evaluasi pelaksanaan program Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa laporan evaluasi serta program menonjol Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan melalui film, dan peserta dipersilahkan untuk menyimak isi film yang dibuat oleh Pustekkom Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Pemutaran film berjalan dengan lancar, dan para peserta sidang menyaksikannya dengan antusias. Setelah selesai pemutaran

film, acara dilanjutkan dengan penjelasan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan tanya-jawab.

### **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

Permasalahan dan program menonjol Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam film menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran proses pendidikan dikaitkan dengan milenium ketiga;
2. Perlunya pengembangan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Kepmendikbud 02217/O/1986;
3. Gambaran sumber daya manusia (SDM) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari tenaga bergelar S2 sebanyak 96 orang dan S3 sebanyak 24 orang;
4. Hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukan yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dampak krisis moneter dengan turunnya kurs rupiah yang menyebabkan proses belajar mengajar turun;
6. Hasil penelitian yang bekerja sama dengan Bank Dunia menunjukkan jumlah siswa SD berkurang baik untuk di desa maupun di kota;
7. Gambaran kecenderungan jumlah siswa di SLTP;
8. Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan UNESCO dan UNICEF mengenai jumlah siswa SLTP;
9. Gambaran persentase anak usia 13 - 19 tahun berdasarkan temuan-temuan;

10. Program anak sekolah tayangan dalam TV;
11. Pemetaan mutu pendidikan melalui Ebtanas;
12. Rata-rata nilai murni siswa yang menunjukkan bahwa nilai terendah dalam bidang IPA dan Matematika (kelompok IPA) dan Bahasa Inggris untuk kelompok IPS;
13. Gambaran yang menunjukkan mutu sekolah menurun;
14. Grafik mutu SLTP berdasarkan NEM tahun 1997 - 1998;
15. Hasil pengkajian terhadap penelitian kurikulum dianggap terlalu berat;
16. Kondisi geografis Indonesia dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh dan SMP terbuka/daerah terpencil;
17. Gambaran SMP terbuka;
18. Terwujudnya jaringan belajar jarak jauh dengan 9 anggota 9 Departemen;
19. Pengembangan pusat pendidikan terbuka jarak jauh/ SEAMOLEC;
20. Beberapa usulan kebijakan umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan adalah
  - a. meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - b. meningkatkan sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. peningkatan kinerja.

Setelah pemutaran film selesai, dilanjutkan penyampaian penjelasan lisan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan tentang masih adanya berbagai kendala dalam menyongsong paradigma baru reformasi pendidikan.

## Tanya Jawab

1. Rektor Universitas Sumatera Utara menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas SLTP dan SMA, hubungan dan jumlah lulusan yang meneruskan ke jenjang SMP, dan jumlah guru yang melanjutkan sekolah dan kaitannya dengan peningkatan pendidikan;
2. Kepala Kanwil Irian Jaya menyampaikan dan mempertanyakan ihwal pembebasan SPP dan biaya Ebtanas di Irian Jaya dibantu oleh Pemda, mutu pendidikan di Irian Jaya masih kurang, perlu adanya prioritas-prioritas, apakah akan ada perampingan kurikulum, dan penambahan kurikulum tentang budi pekerti.
3. Kepala Kanwil Timor Timur menyampaikan dan mempertanyakan penyebab NEM rendah, serta sejauh mana dampak dari hasil penelitian, informasi mengenai jaringan-jarak jauh, dan pilihan ganda dominan dalam test Ebtanas dan JPS lambat turunnya.
4. Atdikbud Australia menyampaikan keprihatinan terhadap bidang studi yang hasilnya rendah, dan menyarankan agar hasil-hasil penelitian dapat dimanfaatkan.

Terhadap pertanyaan di atas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa:

1. Akreditasi dari data sekolah merupakan populasi dan angka drop out SD menunjukkan kurang lebih 2 juta, sedangkan untuk tingkat SLTP, dan SLTA sekitar 3,5 juta;
2. Pelaksanaan JPS menggunakan indeks, dan indeks daya serap;
3. Revisi kurikulum sedang dalam proses dan direncanakan tidak diperbaiki secara total tetapi secara kontinyu melalui proses uji coba;

4. Untuk menaikkan mutu yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti guru dan UGB;
5. Mutu pelajaran IPA dan sebagainya masih rendah merupakan temuan-temuan.

**BAB V**  
**SIDANG KELOMPOK TENTANG HASIL EVALUASI**  
**PELAKSANAAN**  
**PROGRAM TAHUN 1994/1995 S.D. 1998/1999 DAN**  
**RANCANGAN KEBIJAKSANAAN UMUM 1999**

**A. Subkelompok Pendidikan Dasar**

**Proses Persidangan**

Sidang dibuka oleh Dirjen Dikdasmen, dengan menyepakati terlebih dahulu cara pelaksanaan sidang. Kesepakatan diambil yaitu dengan tetap menggunakan acuan/materi yang disodorkan sebagai acuan utama. Pertama dimintakan tanggapan umum untuk lima peserta dan diteruskan dengan tanggapan terhadap butir-butir pada tiap-tiap acuan oleh dua atau tiga peserta baru ditanggapi oleh pimpinan sidang, demikian seterusnya. Walaupun terkadang diselingi dengan tanggapan keras dari peserta, tanpa hak itu tidak mengurangi nilai kebersamaan dalam ikut merumuskan kebijakan yang di bahas dan tetap pada jalur diskusi yang sehat.

**Butir-Butir Pokok Diskusi**

Dari hasil perkembangan diskusi kelompok Dikdas ini, peserta sepakat mengelompokkan masalah menjadi tiga masalah pokok, yaitu pendekatan penerapan, dan kebijakan.

1. Isu Strategis Tahun 2000/2001
  - a. Taman Kanak-Kanak

- 1) Sebagian besar guru taman kanak-kanak adalah nonpegawai negeri sipil dengan honor yang rendah, untuk itu perlu peningkatan insentif dan bantuan biaya operasional;
- 2) Sebagian besar taman kanak-kanak dikelola oleh swasta, oleh karena perlu diberikan bantuan misalnya dengan guru DPK, melengkapi alat bermain dan meningkatkan kelayakan/kemampuan guru;
- 3). Dana pengawas TK dan SD yang hanya Rp. 12.000,00 perlu ditinjau kembali. Selain itu, perlu penyederhanaan pengangkatan pengawas TK/SD untuk memenuhi kebutuhan.

b. Sekolah Dasar

Tingkat pelayanan sekolah dasar telah mencapai angka partisipasi yang cukup tinggi. Karena itu upaya peningkatan mutu perlu diberi perhatian yang lebih besar melalui:

- 1) pengadaan alat peraga, buku pelajaran dan perpustakaan, percepatan pelaksanaan penyetaraan guru;
- 2) intensifikasi peran kancam dan pengawas;
- 3) pengadaan guru kontrak;
- 4) reorientasi penyelenggaraan EBTANAS;
- 5) penambahan dan pengaturan kembali jam belajar dan jadwal pelajaran di TK dan SD;
- 6) peninjauan kembali persyaratan/kriteria rekrutmen calon tenaga guru sesuai dengan kondisi daerah;
- 7) standarisasi ergonomik mebel sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
- 8) revitalisasi sekolah dasar.

c. SLB

Pendataan perlu diikuti dengan pemberian pelayanan sesuai dengan jenis dan gradasi kelainannya.

d. SLTP

Dalam rangka wajib belajar perlu dilakukan pendekatan yang inovatif melalui:

- 1) pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi;
- 2) pemberdayaan sekolah swasta;
- 3) penggalangan dana masyarakat;
- 4) penyelenggaraan SLTP terbuka;
- 5) intervensi dengan pembangunan UGB/USG dan RKB sesuai kondisi geografis dan jarak tempuh sekolah;
- 6) perbantuan guru ke sekolah swasta;
- 7) menambah jumlah DBO ke sekolah dari Rp 6 juta menjadi Rp 8 juta;
- 8) perlu standar khusus untuk bangunan sekolah di perkotaan;

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan masih perlu dilakukan:

- 1) penambahan buku pelajaran dan perpustakaan sekolah;
- 2) penambahan alat laboratorium dan sarana belajar;
- 3) penyesuaian sistem rayonisasi (untuk sekolah unggulan);
- 4) penambahan jumlah meubeler pengganti;
- 5) pengadaan rumah dinas kepala sekolah dan penjaga sekolah;
- 6) perbaikan sistem model penataran.

## 2. Masalah-masalah Khusus

- a. Desentralisasi pendidikan dan implikasi penataan SDM dan daerah;
- b. Penggunaan terminologi/nomenklatur jenjang sekolah SD, SLTP, SMU dan SMK perlu dikaji kembali;
- c. EBTA/EBTANAS masih dipandang perlu ditata kembali sistem dan formatnya;
- d. Pengkajian kembali fungsi kancam;
- e. Reorientasi model pembelajaran pendidikan budi pekerti;
- f. Pengkajian khusus masalah rekrutmen penilik/pengawas dan widyaiswara;
- g. Penyiapan uji coba untuk pelayanan anak perkembangan luar biasa melalui berbagai skema percepatan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam persaingan global;
- h. Peningkatan peran swasta, masyarakat, dan orang tua;
- i. Pengembangan materi budaya dalam kurikulum muatan lokal.

## 3. Pendekatan Penerapan Kebijakan

Dengan memperhatikan berbagai kondisi sekolah dan wilayah yang berbeda serta program desentralisasi pendidikan, penerapan kebijakan pendidikan pada masa yang akan datang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan pendidikan tidak lagi harus bersifat atau satu kebijakan untuk semua (*one fit all*). Berbagai faktor karakteristik kewilayahan, kesiapan, dan kebutuhan tiap-tiap sekolah merupakan faktor pembela yang harus mendapatkan perhatian secara saksama;

- b. Pelaksanaan suatu kebijaksanaan pendidikan hanya ditujukan bagi sekolah atau wilayah yang sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
- c. Penataan menyeluruh manajemen pendidikan di pusat dan daerah dengan memperhatikan aspek profesionalisme, *capacity building*, = penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, dan penggalangan partisipasi komunitas.

## **B. Subkelompok Pendidikan Menengah**

### **Proses Persidangan**

Diskusi kelompok ini dipimpin oleh Dr.M. Boediono Soedjadi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, dengan anggota kelompok yang hadir 24 peserta dari 29 peserta yang berasal dari unsur Unit Utama, Balai Pustaka, PPPG, Atdikbud Bonn, dan Kanwil di lingkungan Depdikbud. Diskusi kelompok diawali dengan terlebih dahulu mencari pemahaman yang sama mengenai tugas Kelompok A2 Pendidikan Menengah yang harus diselesaikan. Pada akhirnya disepakati bahwa yang perlu dibahas dan didiskusikan adalah isu-isu strategis yang ada di R VI, isu strategis tahun 2000/2001 sebagai kebijaksanaan awal perencanaan dan pendekatan penerapan kebijaksanaan.

### **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Masalah utama yang dihadapi di pendidikan dasar dan menengah khususnya SLTP adalah pembenahan kurikulum karena kurikulum tersebut berlaku untuk siswa yang akan melanjutkan ke SMU ataupun SMK. Ada pemikiran tujuannya yang harus

diubah, atau tujuannya tetap, tetapi sistemnya diubah. Dengan mempertimbangkan berbagai segi positif dan negatif dari berbagai pilihan kebijakan yang ada di negara lain (Jerman dan Inggris), pada akhirnya disetujui tujuan perlu disempurnakan dengan konsekuensi kurikulumnya juga diubah. Kurikulum SMK diarahkan sebagai terminal untuk terjun ke masyarakat pekerja, sedangkan kurikulum SMU diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun perlu dipertimbangkan pula bahwa kurikulum untuk lulusan SMU yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Penerapan perubahan kurikulum termasuk kurikulum lokal perlu memperhatikan kesiapan tiap-tiap sekolah, untuk itu perlu dibuat dulu klasifikasi sekolah di masing-masing wilayah.

2. Peningkatan daya tampung perlu dilakukan terutama pada jenjang SLTP. Berbagai permasalahan masih dihadapi terutama kurangnya dukungan dari faktor lingkungan strategis termasuk pemerintah daerah, dan tidak adanya anggaran pembiayaan untuk pengadaan tanah secara tuntas. Oleh karena itu, perlu pemikiran untuk mendorong lingkungan strategis ini supaya mau membantu sektor pendidikan secara optimal. Kendala yang dijumpai pada tingkat SLTP akan berpengaruh pula pada input SMU/SMK. Oleh karena itu, ada pemikiran agar pada jenjang SLTP sudah diperkenalkan program kejuruan, sehingga siswa memiliki wawasan untuk melanjutkan ke SMU atau SMK.
3. Pengawasan akademik sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan SMU/SMK memerlukan tenaga pengawas sekolah yang berkualitas. Selama ini pengangkatan pengawas sekolah seringkali memunculkan persoalan dalam

komposisi guru. Oleh karena itu, perlu pengkajian khusus masalah rekrutmen pengawas sekolah antara lain melalui sistem kontrak dengan lembaga independen. Upaya peningkatan mutu dapat pula ditempuh melalui akreditasi sekolah dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengatur kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui *school based management* .

4. Kebijakan pendidikan selama ini diterapkan secara sama untuk semua sekolah tanpa memperhatikan spesifikasi tiap-tiap sekolah/daerah *one fit for all* sehingga mematikan kreativitas sekolah/daerah. Sekarang ini sudah saatnya diberlakukan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai faktor kebutuhan, kesiapan sekolah, dan karakteristik kewilayahan.
5. Hasil pembelajaran di SMU/SMK saat ini rendah dan faktor yang paling berpengaruh pada masalah ini adalah kualitas guru. Berkaitan dengan hal tersebut perlu upaya peningkatan kualitas guru, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan substansi materi pelajaran dan cara mengajar baik melalui penataran maupun pertukaran guru antar wilayah dan antar negara. Selain hal tersebut, perlu dihindarkan adanya guru yang mengajar mata pelajaran yang bukan bidang studinya. Oleh karena itu, rekrutmen guru baru perlu memperhatikan persyaratan dan sesuai kebutuhan.
6. Mutu mata pelajaran IPA, Matematika dan Bahasa Inggris perlu ditingkatkan, sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam persaingan global.
7. Banyaknya lulusan SMU yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan masuk ke dunia kerja menunjukkan suatu dilema,

semestinya dicarikan suatu alternatif karena sudah tidak sesuai dengan tujuan. Sebagai satu perbandingan, seleksi masuk SMU di Jerman sangat selektif dan yang tidak tertampung masuk ke SMK. Oleh karena itu, sistem seleksi masuk SMU dan SMK yang saat ini perlu untuk ditinjau kembali.

8. Kualitas penyelenggaraan pendidikan erat kaitannya dengan kualitas dan kepemimpinan kepala sekolah sehingga pengangkatan kepala sekolah perlu dilakukan secara selektif dengan didukung oleh sistem evaluasi yang andal.
9. Anggaran pemerintah saat ini sangat minim, sehingga perlu dicari sumber-sumber pembiayaan yang lain agar proses belajar mengajar dapat berjalan baik dan program peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan.
10. Program pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan perlu didukung dengan optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan termasuk penyempurnaan buku pelajaran secara terus-menerus.
11. Dengan adanya kebijaksanaan otonomi daerah perlu diupayakan perimbangan alokasi dana pusat, daerah (propinsi dan kabupaten/kotamadya) dan sekolah.
12. Sistem penilaian angka kredit guru perlu disempurnakan sehingga benar-benar dapat meningkatkan kemampuan, prestasi, dan kesejahteraan guru.

### **C. Kelompok Diklusepora**

#### **Proses Persidangan**

Diskusi kelompok dimulai pukul 14.00 s.d. pukul 17.15 WIB dipimpin oleh Prof.Dr. Soedijarto, MA Direktur Jenderal Diklusepora

diikuti oleh 23 orang peserta. Diskusi membahas tentang konsep perencanaan yang disusun oleh Tim Substansi. Pimpinan sidang mempersilakan peserta untuk membaca konsep tersebut selama 10 menit. Selanjutnya peserta diskusi dipersilakan untuk memberikan masukan atau usulan. Pembahasan dilakukan secara berurutan yaitu tentang pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan keolahragaan.

### **Butir-Butir Pokok Diskusi**

Setelah mendengarkan pelbagai masukan dan usulan dari anggota Sidang Diskusi, kelompok sepakat merumuskan masukan tersebut ke dalam tiga kelompok usulan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
  - a. Tenaga PLS (penilik) yang ada dalam pelaksanaan hanya didukung lima orang tenaga lapangan (non-PNS).
  - b. Belum semua instansi memahami bahwa tamatan Kejar Paket B berlaku setara dengan SLTP
  - c. Masih menjadi persoalan antara Depnaker dan Depdikbud tentang kewenangan penanganan pelatihan tenaga kerja dan kursus-kursus.
  - d. Isu kekurangan tenaga pendidikan masyarakat (dikmas) di lapangan dan banyaknya tamatan SD tidak dapat melanjutkan sekolah perlu dimasukkan pada masalah strategis.
  - e. Masalah krisis saat ini perlu diangkat sebagai masalah strategis.
  - f. Masalah sekolah inti dan sekolah imbas perlu dihubungkan dengan pendidikan luar sekolah.

- g. Pada abad 21 pendidikan luar sekolah perlu dibuat fleksibel agar orang mudah keluar masuk pekerjaan.
  - h. Tenaga pamong belajar pada Kejar Usaha agar lebih banyak dibekali ilmu murni.
  - i. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP tidak memperhitungkan Kejar Paket B mengakibatkan aktivis Dikmas kurang semangat.
  - j. Pengangkatan penilik sebaiknya masuk dalam formasi pengangkatan pegawai.
  - k. Status Penilik Dikmas dan Penilik Olahraga diperjelas agar pemberdayaannya lebih baik.
2. Pembinaan Generasi Muda
- a. Banyak Penilik Olahraga dan Penilik Pemuda di daerah kurang sesuai latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Hal ini perlu masuk dalam masalah strategis.
  - b. Persyaratan SP3 perlu diperketat, agar pelamar tidak terlalu banyak.
  - c. Belum mantapnya “*character and national building*” menyebabkan bangsa mudah diguncang oleh pengaruh globalisasi.
  - d. Agar minat baca meningkat, perpustakaan perlu dikembangkan.
3. Keolahragaan
- a. Sosialisasi pengertian iptek olahraga perlu dimasukkan di dalam program;
  - b. Pembina-pembina olahraga perlu dipersiapkan.

- c. Diklusepora perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap olahraga.
- d. Pola pembinaan olahraga harus berasal dari Depdikbud dengan memasyarakatkan iptek olahraga.

## **D. Kelompok Kebudayaan**

### **Proses Persidangan**

Sidang kelompok Kebudayaan dimulai pada pukul 14.20 yang diikuti oleh 24 orang dari unsur Unit utama, Kantor Wilayah, Atdikbud, dua orang peserta masing-masing dari Komisi VII DPR dan BPPN tidak hadir.

Sidang kelompok Kebudayaan berjalan dengan aktif, hampir semua peserta memberikan tanggapan, dan saran. Isu yang menonjol dan ramai didiskusikan adalah bagaimana upaya Direktorat Jenderal Kebudayaan di dalam menangani program strategis Pembinaan Nilai-nilai Budaya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretaris Jenderal berkenan mengikuti sidang kelompok selama kurang lebih 10 menit.

### **Butir-butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Berdasarkan format diskusi kelompok Evaluasi Pelaksanaan Program Repelita VI, pimpinan sidang menjelaskan bahwa dari 9 program evaluasi terdapat 3 program strategis yang penting untuk didiskusikan yaitu Pembinaan Kesenian, Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah, dan Purbakala, dan Pembinaan

Nilai-nilai Budaya.

2. Untuk menanggapi pertanyaan peserta apa latar belakang pemilihan 3 program strategis sebagai materi pokok diskusi, pimpinan sidang memberikan penjelasan sebagai berikut

- a. Pembinaan Kesenian

Masalah yang menonjol adalah lebih banyak mengarah kepada pengembangan kreativitas karena selama pemerintahan Orde Baru sering terjadi pemasangan kreativitas seniman. Di sisi lain kesenian sebagai industri budaya tidak hanya berfungsi untuk memperkenalkan Indonesia di luar negeri tetapi juga dapat dijadikan sumber devisa dan pariwisata.

Persoalan lain adalah bahwa akan dibentuk Dewan Kesenian oleh Depdagri, dalam hal ini, seberapa jauh peranan Depdikbud dalam Dewan Kesenian perlu dibicarakan lebih lanjut.

- b. Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah, dan Purbakala  
Ada kesenjangan apresiasi masyarakat dengan kalangan profesional sehingga masih sering terjadi kasus-kasus pencurian benda purbakala.

- c. Pembinaan nilai-nilai budaya

Masalah aktual berkaitan dengan hal ini adalah perlu tidaknya pelajaran budi pekerti, dan maraknya konflik etnis meskipun ini juga didorong oleh adanya kepentingan-kepentingan politik. Dari sisi budaya, apa yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dengan pertimbangan waktu yang terbatas, dari 3 program di atas, diskusi difokuskan pada 2 program saja yaitu Pembinaan Kesenian dengan topik masalah dan isu strategis meliputi (a)

pembinaan kesenian di sekolah masih kurang, (b) masih kurangnya pengenalan prestasi seni Indonesia di forum internasional. serta program Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya dengan topik: (a) terjadinya pergeseran norma dan tata nilai ada yang mengakibatkan timbulnya krisis moral dalam masyarakat, (b) menipisnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial memicu timbulnya kecemburuan sosial yang dapat menjadi kendala bahkan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

### 3. Hasil diskusi:

#### a. Program kesenian

Berdasarkan topik masalah dan isu strategis yang dipilih. terdapat permasalahan pokok sebagai berikut:

- 1) Persebaran guru kesenian tidak merata. sebagai contoh di Propinsi Sumatera Barat terdapat kelebihan 200 orang guru kesenian sementara di Propinsi Irian Jaya, Kalimantan Timur, dan Lampung kekurangan guru kesenian. Selanjutnya, di sekolah Indonesia di luar negeri kekurangan guru kesenian biasanya dengan cara meminta bantuan penari atau seniman Indonesia yang kebetulan bermukim di luar negeri sebagai tenaga honorer.
- 2) Upaya pengangkatan guru baru menghadapi kendala pada keharusan pelamar memiliki ijazah S1 dan akta IV. Padahal berdasarkan pengamatan lulusan S1 non IKIP/LPTK kemampuan substansinya lebih baik jika dibandingkan dengan lulusan S1 akta IV dari IKIP/LPTK. Selain itu, pengisian kebutuhan guru kesenian lintas propinsi tidak efektif. kebanyakan guru yang

- diimpor tidak mau melaksanakan tugas di propinsi yang jauh dari tempat asalnya.
- 3) Pengajaran kesenian yang menjadi satu dalam mata pelajaran kesenian dan keterampilan kurang dapat mencapai tujuan yang diinginkan mengingat pengajaran kesenian diberikan dengan maksud untuk menumbuhkan budaya dan kepekaan siswa terhadap seni.
  - 4) Masih terbatas sarana pengenalan budaya Indonesia untuk sekolah Indonesia di luar negeri ataupun pada institusi lainnya, yang sampai saat ini baru berupa rekaman-rekaman dalam bentuk film, kaset, dan video-tape. Ini penting diperhatikan karena fungsinya tidak hanya sebagai sarana pembelajaran tetapi juga sebagai sarana komunikasi pengenalan budaya Indonesia.
  - 5) Masih belum terlihat peranan Direktorat Jenderal Kebudayaan secara aktif dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan hubungan kedua negara melalui Diplomasi Kebudayaan. Diplomasi ini tidak hanya memandang potensi negara yang bersangkutan sebagai sumber kerjasama (peminjaman dana : loan, grant; IPTEK; pertukaran pelajar. dll) tetapi juga seni sebagai industri budaya. Sebagai contoh baru-baru ini sudah didirikan Pusat Kebudayaan di Tokyo (baru satu-satunya) mungkin dapat diikuti oleh Atdikbud di negara-negara lainnya dengan koordinasi aktif Direktorat Jenderal Kebudayaan.

- 6) Para Atdikbud menginformasikan perlunya program terencana dan resmi dalam pengiriman misi kebudayaan, sampai saat ini masih sering terjadi pihak-pihak tertentu/institusi di Negara Perancis, Belanda, dan Tokyo mengundang secara langsung grup-grup kesenian dan seniman tanpa ada koordinasi dengan Atdikbud. Jika terjadi hal-hal yang merugikan seniman baru, Atdikbud diberi tahu sehingga seringkali Atdikbud harus menangani hal-hal yang bersifat nonteknis.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, peserta sidang kelompok mengusulkan sebagai berikut:

- 1) Perlu diusulkan kepada BAKN agar dapat melakukan penerimaan guru kesenian S1 nonakta IV.
- 2) Diadakan diklat untuk peningkatan kompetensi guru kesenian yang ada.
- 3) Pengajaran Kesenian dipisahkan dari mata pelajaran kesenian dan ketrampilan.
- 4) Program terencana Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam Diplomas Kebudayaan perlu ditingkatkan, upaya yang sudah dilakukan misalnya Pameran Seni Rupa Negara-Negara Nonblok, Forum Internasional tentang Seni Pertunjukan (program seleksi karya-karya unggul B seni, tari, teater untuk disajikan di Indonesia), penyelenggaraan Art Summit ketiga juga sudah dalam rencana. Sejalan dengan upaya peningkatan, Atdikbud agar dapat memberikan informasi identifikasi pihak-pihak/institusi/ masyarakat tertentu yang suka mendatangkan secara langsung perorangan maupun

grup seni. Informasi ini diperlukan sebagai dasar tindak lanjut Direktorat Jenderal Kebudayaan membuat suatu ketentuan bersama dengan pihak Departemen terkait, imigrasi, ataupun dengan Kedubes sehingga para seniman tersebut dapat dilindungi hukum, menerima hak-haknya secara utuh, dan lebih penting adalah nilai keseniannya yang dibawa dapat dipertanggung-jawabkan serta betul-betul mewakili kesenian Indonesia.

- 5) Para Atdikbud juga diminta agar memberikan informasi rencana penyelenggaraan dalam peristiwa kebudayaan internasional, dan membuka jaringan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi kebudayaan untuk menjadi partner dengan organisasi serupa di Indonesia.
- 6) Penyediaan sarana pengenalan budaya dalam bentuk CD (musik) sudah dilakukan terutama oleh pihak swasta dan akan diusahakan rekaman seni lainnya dalam CD dan VCD.

b. Pembinaan Nilai-nilai budaya

Dari topik masalah dan isu strategis yang dipilih, dapat diidentifikasi persoalan pokok di bawah ini.

- 1) Kecenderungan timbulnya potensi konflik antaretnis dipicu antara lain oleh adanya kecemburuan sosial penduduk setempat terhadap pendatang. Ini ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Penelitian ini melihat persepsi pemuda satu suku terhadap pemuda suku yang lain di Lampung dan juga daerah transmigrasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemuda dari keluarga transmigrasi lebih dapat menikmati sekolah, mendapatkan pekerjaan, dan tidak canggung dengan budaya setempat, tetapi pemuda setempat justru cenderung kurang menunjukkan hal-hal positif seperti itu. Kenyataan ini dapat menyimpan potensi konflik yang bermula dari adanya kecemburuan sosial penduduk setempat yang melihat pendatang lebih sukses.

- 2) Perlu tidaknya pengajaran budi pekerti diberikan di sekolah masih menjadi perdebatan. Padahal harapan masyarakat pengajaran ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya pergeseran norma, tata nilai/etika yang diakibatkan antara lain pengaruh budaya luar melalui media elektronik yang tidak sesuai dengan budaya kita.

Usulan terhadap permasalahan pokok di atas adalah:

- 1) Direktorat Jenderal Kebudayaan akan mengadakan pengkajian lebih mendalam pada arena interaksi budaya agar potensi konflik dapat dihindari. Arena budaya adalah suatu lingkungan tempat suatu komunitas dengan yang lain hidup berdampingan, misal sekolah, kantor, dan perkampungan masyarakat lebih dari satu etnis.
- 2) Perlu dibuat sinetron dengan lebih banyak menggali cerita dari budaya lokal.

## **E. Kelompok Penunjang (Setjen, Balitbang, dan Itjen)**

### **Proses Persidangan**

Persidangan dimulai tepat pukul 14.00 oleh pimpinan sidang, kemudian dilanjutkan dengan sumbang saran dari anggota kelompok untuk melakukan identifikasi masalah strategis khususnya untuk Sekretariat Jenderal berdasarkan prioritas kebijakan yang dikaitkan dengan isu-isu yang masih baru. Proses diskusi berjalan cukup alot karena saling mempertahankan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan substansi tugas masing-masing. Namun, akhirnya didapatkan kesepakatan untuk ditambahkan. Persidangan diakhiri pukul 17.00 setelah membahas 2 unit penunjang lainnya, yakni Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

### **Butir-Butir Pokok Diskusi**

1. Peserta kelompok diskusi ini sebanyak 34 orang yang terdiri atas para pejabat pada Unit Utama Pusat dan Pusat-Pusat serta para pejabat dari Kanwil dan Atdikbud dengan diketuai oleh staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengganti Inspektur Jenderal yang berhalangan.
2. Beberapa masalah strategi yang sudah tertuang di dalam matriks pada kolom 8 diidentifikasi kembali berdasarkan prioritas sehingga memunculkan 6 item masalah strategis yang dijadikan sebagai Topik untuk didiskusikan dalam kelompok.
3. Hasil Rumusan Sekretariat Jenderal  
Adapun enam (6) masalah strategis yang diangkat ke permukaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh penerapan otonomi daerah terhadap organisasi dan tatalaksana Depdikbud termasuk pembangunan gedung kancam yang perlu untuk disatupatkan;
  - b. Reformasi perundang-undangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi peningkatan pelayanan bantuan hukum dan humas yang proaktif;
  - c. Strategi penerimaan, pengangkatan, penempatan tenaga kependidikan dan kebudayaan serta pemberdayaan PNS termasuk peningkatan kemampuan profesional SDM bidang kegrafikaan;
  - d. Peningkatan kemampuan profesionalisme dalam rangka pembinaan karier PNS baik tenaga struktural maupun fungsional;
  - e. Perlunya koordinasi dalam sertifikasi aset Depdikbud. Beberapa gedung kanwil perlu direnovasi dan perlu memasyarakatkan budaya hemat energi baik di Pusat maupun di Daerah;
  - f. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran Depdikbud termasuk koordinasi pengelolaan BLN (Bantuan Luar Negeri).
4. Berdasarkan masalah strategis di atas dan masih adanya beberapa hal yang belum tertampung dalam narasinya sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh para Kakanwil dan para Kepala Biro yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pengisian kolom kebijaksanaan Pelaksanaan 1999/2000 dan Kebijakan Perencanaan 2000/2001, maka dicari rumusan-rumusan baru sehingga semua usulan yang bersifat prioritas dapat terakomodasi.

5. Hasil Rumusan Inspektorat Jenderal

Masalah strategis yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

- a. Waskat belum efektif, disamping itu waskat juga belum sepenuhnya berhasil mencegah kebocoran.
  - b. Hasil waskat belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan.
  - c. Masih terdapat kelemahan koordinasi pengawasan baik intern maupun ekstern.
  - d. Belum berfungsi lembaga BINAP secara optimal.
  - e. Meningkatnya pengaduan masyarakat dan isu KKN belum diimbangi dengan sistem penanganan yang mantap.
  - f. Pengawasan program JPS belum dilaksanakan.
  - g. Belum jelasnya pola pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan dengan diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah.
6. Hasil Rumusan Badan Penelitian dan Pengembangan Dikbud
- Masalah strategis yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:
- a. Kurikulum 1994 Didasmen untuk beberapa mata pelajaran masih mengandung kelemahan antara lain materi dan tata urutannya.
  - b. Prestasi belajar siswa SD, SLTP dan SMU sebagai salah satu indikator mutu pendidikan sebagaimana terlihat dalam NEM secara umum masih rendah.
  - c. Pelaksanaan pendidikan di sekolah cenderung lebih menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran dan kurang diimbangi dengan pengembangan sikap sehingga nilai-nilai moral kurang tercermin dalam perilaku peserta didik.

- d. Jumlah dan mutu pendidikan di Badan Penelitian dan Pengembangan masih belum relevan dan terbatasnya bidang keahlian jika dibandingkan dengan masalah yang dihadapi.
- e. Pendidikan dan pengembangan kebijakan belum banyak mencakup permasalahan di bidang kebudayaan.

## **F. Subkelompok Dikti-LPTK**

### **Proses Persidangan**

Sidang atau diskusi kelompok ini diikuti oleh 37 dari 40 orang peserta yang seharusnya tergabung dalam sub kelompok LPTK, yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Dikti, IKIP, Duta Besar RI untuk UNESCO, Puslit Arkenas, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas, PGRI, ISPI, dan Direktorat Jenderal Dikdasmen.

Diskusi diawali dengan penyampaian materi-materi yang akan dibahas, oleh pimpinan sidang dan dilanjutkan dengan pemberian waktu kepada para peserta diskusi untuk membaca dan mempelajari materi-materi yang telah disiapkan oleh panitia selama lima sampai sepuluh menit. Dalam diskusi terjadi interaksi antara peserta dan saling sumbang saran dan berbagai tanggapan terhadap isu-isu yang akan dibahas. Setelah diskusi selesai, sidang dilanjutkan dengan perumusan hasil diskusi yang dibantu oleh substansi.

### **Butir-Butir Pokok Diskusi**

1. Masalah (isu strategis)
  - a. Belum mantap sistem pengadaan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan karier.
  - b. Belum mantap kondisi interaksi vertikal dan horisontal antara lembaga terkait (Menko Wasbang dan PAN, LPTK,

- Kanwil/Dinas, Pemda) serta terbatasnya formasi mengakibatkan lulusan LPTK belum dimanfaatkan secara optimal.
- c. Belum mantap hubungan LPTK, sekolah serta instansi terkait termasuk Kanwil/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Litbang serta Pemda Tk. I/II.
  - d. Pelaksanaan perluasan peran dalam rangka konversi IKIP menjadi Universitas belum sesuai dengan rencana.
  - e. Terbatas jumlah dan kualitas dosen LPTK, khususnya yang berkualifikasi S2/S3, serta sulit diperoleh calon untuk studi lanjut ilmu murni yang memenuhi persyaratan.
  - f. Masih kurang proses demokratisasi dan desentralisasi dalam mendukung otonomi kelembagaan.
  - g. Kesejahteraan tenaga profesi kependidikan khususnya guru dan pamong belajar masih inemprhatikan (di bawah UMR) sehingga mempengaruhi kinerja.
  - h. PPL belum berjalan efektif untuk mendukung penyiapan tenaga kependidikan yang profesional.
  - i. LPTK sebagai pusat pengembangan dan pembinaan tenaga pendidikan melalui *inservice training* dan *pra service training* belum berjalan optimal.
  - j. Peluang berkembang bagi semua fakultas (bidang studi di LPTK) belum berjalan secara seimbang dan proporsional khususnya non-MIPA.
  - k. Pengadaan tenaga kependidikan (pamong belajar) untuk PLS Wajar Dikdas belum mendapatkan perhatian secara proporsional.

- l. Belum ada analisis skenario otonomi daerah dalam kaitannya dengan program-program LPTK.
  - m. Wawasan budaya kewirausahaan di LPTK belum dapat diterapkan dan dimantapkan secara formal.
  - n. Kurang minat lulusan SMU menjadi mahasiswa LPTK; Kurang jumlah guru pada bidang tertentu dan daerah tertentu dan terpencil.
  - o. Belum efektif pelaksanaan proses belajar mengajar yang menerapkan teori dan praktek secara proporsional.
  - p. Kemampuan meneliti lulusan LPTK khususnya dalam *action research* belum mantap.
  - q. Masih terbatas sarana dan prasarana di LPTK dalam mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
  - r. Kurikulum LPTK belum dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan Iptek.
2. Kebijakan 2000/2001
- a. Sistem P4 perlu direncanakan dan dilaksanakan secara mantap dengan meningkatkan koordinasi (interaksi vertikal dan horisontal) antar lembaga terkait dan dengan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.
  - b. Hubungan antara LPTK dan sekolah dalam rangka menyiapkan tenaga kependidikan yang berorientasi lapangan (*field based oriented*) perlu ditingkatkan. Dalam upaya memanfaatkan sarana dan prasarana secara efektif perlu dijalin kerjasama antara LPTK, sekolah, dan instansi terkait dengan prinsip "*resource sharing*" yang saling menguntungkan.

- c. SDM (tenaga dosen) dikembangkan melalui studi lanjut S2 dan S3 bidang kependidikan dan khususnya bidang non-kependidikan baik dalam negeri maupun luar negeri, pelatihan serta pengembangan sistem karier bagi dosen perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian, dan PKM. Dalam upaya mengatasi kesulitan mendapatkan calon tenaga dosen untuk studi lanjut bidang non-kependidikan perlu dilakukan rekrutmen dengan menerapkan sistem calon tenaga akademis baru (CTAB).
- d. Pelaksanaan transformasi kelembagaan (konversi) IKIP menjadi Universitas perlu direalisasikan sesuai rencana dalam rangka meningkatkan peran utama IKIP sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan di samping tenaga non-kependidikan.
- e. Proses demokratisasi dan desentralisasi pendidikan dalam upaya mendukung otonomi kelembagaan perlu dilaksanakan dengan meninjau kembali dan menyusun peraturan yang terkait dengan pelaksanaan manajemen perguruan tinggi.
- f. Kesejahteraan tenaga kependidikan khususnya guru dan pamong belajar ditingkatkan melalui kenaikan gaji, pemberian insentif, dan kenaikan pangkat/jabatan bagi yang berprestasi dalam rangka meningkatkan martabat dan kebanggaan profesi tenaga kependidikan.
- g. Peningkatan mutu LPTK perlu dilaksanakan agar terjadi kesesuaian pendidikan dengan perkembangan Iptek setelah tuntutan pembangunan melalui penyempurnaan kurikulum, pemantapan PPL, peningkatan kualitas dosen, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan proses belajar mengajar

dengan memperhatikan teori dan praktek secara proporsional, peningkatan pre service dan inservice, meningkatkan kemitraan dengan LPTK dan sekolah serta wawasan budaya kewirausahaan.

- h. Pengembangan LPTK perlu dilaksanakan dengan memperhatikan keseluruhan fakultas dengan berbagai program studinya dengan seimbang dan proporsional dengan pendekatan secara integratif agar tidak terjadi ketimpangan antara fakultas, jurusan dan program studi.
- i. Tenaga kependidikan khususnya guru SD dan SMP serta pamong belajar dipenuhi untuk menyukseskan program Wajar Dikdas 9 Tahun.
- j. Skenario penerapan otonomi kelembagaan LPTK disusun untuk mengantisipasi diterapkannya sistem otonomi daerah.
- k. Daya tampung program studi yang berdampak langsung kepada pembangunan diperluas dan ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- l. Sistem seleksi mahasiswa baru diperbaiki agar lebih mencerminkan pemerataan, terutama untuk memenuhi guru dari daerah terpencil.

### 3. Perumusan Hasil Diskusi

Setelah diskusi berakhir acara, dilanjutkan dengan perumusan hasil diskusi, dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Terbatas jumlah calon mahasiswa dan calon dosen yang baik.
- b. Ditemukan LPTK yang melakukan *inservice training*, sehingga perlu diadakan koordinasi antara LPTK dan BPG dan P3GK.
- c. Meningkatkan penelitian yang lebih baik di bidang pendidikan.

- d. Tahun 2000/2001 akan disempurnakan transformasi kelembagaan dari IKIP ke universitas.
- e. Mutu LPTK ditingkatkan.
- f. Penyeleksian atau peningkatan mutu calon mahasiswa LPTK harus lebih baik.
- g. Perlu penyeleksian calon tenaga kependidikan.
- h. Kurikulum LPTK disesuaikan dengan tugas-tugas guru.
- i. Perlu ditingkatkan penelitian iptek yang bermanfaat bagi masyarakat.

## **G. Subkelompok Dikti-Politeknik Negeri**

### **Proses Persidangan**

Sidang diskusi kelompok ini diikuti oleh 43 orang yang terdiri dari 26 direktur politeknik (poltek) negeri, Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi di lingkungan universitas/institut, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Inspektur Wilayah II, dan Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru (P3G).

Diskusi kelompok diawali dengan penyampaian materi-materi yang akan dibahas dengan mempersilahkan kepada peserta diskusi untuk mempelajari materi-materi yang telah dipersiapkan oleh Panitia selama 15 menit.

Setelah dipelajari materi yang akan dibahas, acara dilanjutkan dengan informasi dari pimpinan sidang Prof.Ir. Sudjarwadi, M.Eng.PhD. bahwa diskusi kelompok dibagi menjadi empat subkelompok agar mempermudah bagi masing-masing subkelompok memahami masalah yang akan menjadi isu strategis yang akan dibahas dalam kelompok.

Setelah diskusi selesai, sidang dilanjutkan dengan perumusan hasil diskusi kelompok oleh Tim Perumus.

### **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Diharapkan adanya reposisi pendidikan di lingkungan politeknik karena pendidikan di politeknik merupakan pendidikan andalan, dan sebagai salah satu tujuan dalam pencapaian kualitas sumber daya manusia yang diharapkan saat ini dan yang akan datang.
2. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, politeknik diharapkan meningkatkan program diploma menjadi IV (DIV) bagi para lulusannya, begitu juga perlu disiapkan calon dosen politeknik yang tingkat pendidikan S2 dan S3 agar para dosen mempunyai kualifikasi pendidikan minimal setingkat lebih tinggi daripada yang diajarkannya.
3. Akreditasi pendidikan di lingkungan politeknik perlu dilakukan agar terdapat jaminan mutu tiap-tiap politeknik. Untuk itu, terhadap tiap-tiap politeknik perlu dilakukan semacam evaluasi agar dapat diketahui kemampuannya.
4. Perlu adanya pengalaman dan pemagangan bagi dosen dan mahasiswa politeknik di industri, untuk mendekatkan antara tingkat kebutuhan tenaga yang diharapkan oleh industri dengan kemampuan yang disediakan bagi lulusan politeknik.
5. Penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dan teknologi informasi sangat diperlukan bagi para dosen dan lulusan politeknik. Karena dengan perkembangan yang pesat dan era persaingan yang bebas, penguasaan kedua aspek tersebut tidak dapat dihindarkan dan merupakan kebutuhan pokok bagi perguruan tinggi.

6. Kemampuan dosen dan lulusan politeknik dalam mengajukan karya tulis dalam bahasa Indonesia masih lemah, apalagi dengan menggunakan bahasa Inggris.
7. Perlu adanya hubungan kemitraan antara politeknik dan SMK sehingga dapat meningkatkan mutu SMK.  
Pada umumnya para lulusan SMK mempunyai keterampilan khusus dan mempunyai kemampuan yang dapat ditingkatkan lagi bila mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, khususnya di politeknik.
8. Perlu adanya penataan kembali program-program diploma khususnya yang berada di luar politeknik. Hal ini untuk mencegah adanya standar yang berbeda antara pendidikan politeknik yang harusnya sama, baik di politeknik atau di perguruan tinggi.
9. Perlu adanya kemitraan yang kuat antara politeknik dan daerah, agar daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di politeknik secara optimal.
10. Dalam hal pendanaan, Pemerintah Pusat perlu memperhatikan alokasi dana bagi penyelenggaraan program di lingkungan politeknik yang sampai saat ini masih dirasakan sangat rendah, sehingga masih banyak program-program yang seharusnya dilaksanakan oleh politeknik belum dilaksanakan seperti yang diharapkan.

## **H. Subkelompok Dikti-Universitas/Institut**

### **Proses Persiapan**

Diskusi dibuka oleh Ketua dengan mengingatkan kembali arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar diskusi diarahkan pada 3

sasaran, yaitu bagaimana menyusun rencana kerja ini sebagai suatu sistem yang efektif dan efisien; keterkaitan dengan otonomi pendidikan tinggi, serta keterkaitan dengan mekanisme pengawasan. Dalam diskusi, sebagian besar peserta aktif mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk menyempurnakan materi.

Diskusi ditutup oleh Ketua dengan beberapa kesimpulan berupa saran-saran perbaikan, baik untuk isu strategis, kebijaksanaan umum, maupun kebijaksanaan perencanaan.

### **Butir-Butir Pokok Diskusi**

1. Sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, program pembinaan peningkatan pendidikan tinggi melalui peningkatan otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi tidak dapat diberlakukan sama bagi semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Apabila hal tersebut dilakukan, kebijakan yang disusun akan menjadi terlalu netral dan tidak/kurang mengakomodasi keragaman derajat perkembangan PT khususnya bagi PT yang masih memerlukan subsidi dan pembinaan pengembangan di pemerintahan pusat dapat berakibat akan banyaknya PT yang tidak dapat berkembang menuju kemandirian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diajukan satu usulan isu strategis, yaitu ***Prioritas kebijakan terlalu netral dan kurang mengakomodasi keragaman kemampuan penyelenggaraan PT di Indonesia.***

Dengan demikian, dalam Kebijakan Umum Tahun 1999, ditambahkan rumusan ***Otoritas pusat agar menunjukkan keberpihakan*** pendanaan bagi penyelenggaraan PT yang masih lemah.

Dalam kebijaksanaan perencanaan 2000/2001 diusulkan tambahan butir sebagai berikut: ***Perlu pengelompokan kemampuan perguruan tinggi dalam persaingan perolehan dana pembangunan.***

3. Dalam kaitannya dengan otonomi pemerintahan, akan banyak bantuan yang mungkin didapat dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini, terutama bagaimana peran dalam mendapatkan sumber-sumber keuangan sendiri, diusulkan dalam kebijakan perencanaan 2000/2001 kegiatan tentang ***Implementasi kebijakan pusat supaya disinkronkan dengan peran daerah dalam penyediaan dana pembangunan.***
4. Dalam rangka pengawasan terhadap perencanaan tersebut pada butir-butir 3, dianggap masih diperlukan kebijakan asistensi dalam perencanaan pendidikan tinggi dari pusat. Untuk itu, diusulkan kebijakan perencanaan tahun 2000/2001 sebagai berikut: ***Masih diperlukan asistensi perencanaan oleh Pusat.***
5. Dalam upaya peningkatan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi negeri, diusulkan penyempurnaan kebijaksanaan perencanaan nomor 1.3 sehingga berbunyi: ***Mendukung pelaksanaan akreditasi dan keterpaduan program studi PTN dan PTS melalui pemantapan sistem, kesiapan perguruan tinggi dan kerelaan perguruan tinggi untuk menggunakan hasil dan saran proses akreditasi.***
6. Dalam program peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan perkembangan iptek, tuntutan kebutuhan pembangunan, serta perkembangan zaman, selain isu strategis yang sudah diajukan, terdapat beberapa isu baru yang dikembangkan yaitu:

- a. ketersediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi;
  - b. kemampuan penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, serta teknologi informasi lulusan perguruan tinggi masih lemah;
  - c. civitas akademika masih lemah dalam menyajikan karya tulis baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing.
7. Untuk mengantisipasi isu strategis proses tersebut, diusulkan kebijaksanaan umum sebagai tambahan, yaitu *Meningkatkan intensitas proses penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi secara terstruktur dan tidak terstruktur dalam kurikulum.*
8. Kebijakan perencanaan 2000/2001 yang diusulkan adalah:
- a. meningkatkan kegiatan kewirausahaan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi;
  - b. meningkatkan intensitas pembelajaran bahasa asing (Inggris) sebagai bahasa kedua dalam kehidupan kampus;
  - c. meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi mutakhir dalam kehidupan akademik.
9. Untuk menunjang pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan Program Studi, Pengembangan Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, agar sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, diusulkan satu isu strategis baru yaitu: ***Tri Dharma Perguruan Tinggi belum merupakan fungsi yang bersifat institusi.***
- Isu strategis ini muncul karena selama ini dalam pelaksanaannya tri dharma ini dilakukan oleh setiap dosen secara individu dan lebih banyak dikaitkan dengan pencapaian angka kredit untuk

kenaikan pangkat. Karenanya banyak dosen yang hanya melaksanakan pengajaran dan penelitian sedangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat, kurang diminati karena angka kredit yang diperoleh dari kegiatan tersebut, relatif kecil.

Hal ini menyebabkan perguruan tinggi tidak mempunyai keterkaitan yang erat dengan masyarakat padahal seharusnya peran perguruan tinggi harus dirasakan oleh masyarakat sesuai bidang ilmunya.

10. Selain itu, saat ini tenaga dosen yang melanjutkan pendidikan di luar negeri, tunjangan jabatan distop dan kenaikan pangkatnya tertunda selama yang bersangkutan belajar. Namun, hal tersebut seolah-olah tidak berlaku bagi dosen yang belajar di dalam negeri. Hal ini tentunya sangat merugikan dosen yang bersangkutan, mengingat pendidikan yang dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
11. Dengan adanya isu tersebut, maka diusulkan kebijaksanaan perencanaan tahun 2000/2001 sebagai berikut: ***Meinjau kembali aturan nilai Tri Dharma dalam promosi jabatan dan kepangkatan dengan bobot yang proporsional (termasuk bagi yang sedang menjalankan tugas belajar).***
12. Dalam menunjang program kehidupan kampus yang dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi antara lain, terbatasnya sarana dan prasarana, untuk kegiatan mahasiswa, terutama kegiatan ekstra kurikuler seperti olahraga dan kesenian.

Selain itu, dari segi etika kehidupan kampus, masih banyak terjadi pemalsuan/peniruan karya ilmiah, tesis dan lain-lain yang dilakukan baik oleh mahasiswa maupun dosen yang sangat menyalahi etika akademis perguruan tinggi.

13. Untuk mengatasi kendala tersebut, diusulkan kebijaksanaan sebagai berikut:
  - a. Kebijakan Umum:  
mengembangkan fasilitas fisik kampus yang kondusif untuk pengembangan berkehidupan akademis seutuhnya.
  - b. Kebijakan Perencanaan:
    - 1) meningkatkan sarana dan dana untuk kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa;
    - 2) mengembangkan kode etik kehidupan kampus yang mengikat seluruh *civitas academica*.
14. Dalam meningkatkan daya tampung perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sampai saat ini pembentukan perguruan tinggi jarak jauh/kelas jauh tetap tidak diperkenankan. Saat ini yang sedang dikembangkan adalah sistem belajar jarak jauh dan para pakar/ahli di bidang tertentu diberbagai PT diminta untuk berbicara tentang bidang keahlian dan pengalamannya sehingga informasi tersebut dapat diketahui oleh semua perguruan tinggi.
15. Pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan terapan dan ilmu pengetahuan dasar belum dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai strategis yang merupakan ciri keunggulan daerah yang bersangkutan secara kompetitif dan komparatif. Untuk itu, pada tahun 2000/2001 diusulkan kebijaksanaan perencanaan sebagai berikut: "*Diperlukan penajaman nilai strategis yang ditinjau dari segi pengembangan institusi dan pemanfaatan sumber daya alam spesifik dalam setiap usul penelitian*".

## **I. Kelompok Dikti-PTN Seni**

### **Proses Persidangan**

Sidang/diskusi kelompok PT Seni (B4) dibuka oleh pimpinan sidang Dr. Rahayu Supanggah, S.Kar. (Ketua STSI Surakarta) tepat pukul 14.25 WIB dengan terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada para peserta dan khususnya kepada para pimpinan PT besar yang berkenan ikut pada sidang/diskusi kelompok PT Seni. Diskusi dimulai terlambat dari alokasi waktu yang disediakan, tetapi dapat berjalan dengan lancar/hangat dan para peserta dengan silih berganti memberikan tanggapan dan masukan.

Setelah para peserta yang hadir menyampaikan masukan secara lisan dan tertulis, diskusi memutuskan untuk membentuk tim dalam rangka menyelesaikan tugas kelompok PT Seni sesuai dengan format yang disediakan oleh panitia substansi. Diskusi ditutup pukul 16.00 WIB dan selanjutnya tugas tim menyelesaikan rumusan hasil sidang/diskusi kelompok PT Seni dan akan didiskusikan lebih lanjut pada pukul 20.00 WIB.

### **Butir-Butir Pokok Diskusi**

1. Rektor ITB (Prof.Dr.Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc.) menyampaikan usul dan masukan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Tri dharma PT agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh/mandiri dan bernutu sehingga karya-karya pendidikan menjadi baik dan dapat dipasarkan;
  - b. Fakultas Seni dan Desain ITB telah membuka program S3 seni rupa dan menawarkan/memberi kesempatan kepada PT lain untuk ikut program dimaksud;

- c. Diharapkan ada kerja sama yang baik antarpakar seniman senior dan forum/asosiasi untuk menggali metodologi pengajaran seni yang baik. Diharapkan di setiap propinsi ada sekolah seni dan ada forum untuk memperkenalkan seni Indonesia di tingkat dunia.
2. STKIP (Prof. Dr. Nyoman Dantes) mengutarakan dua hal yaitu:
  - a. Perlu peningkatan mutu dosen S2 dan S3 dan diperlukan terobosan-terobosan dari Direktur Jenderal Dikti yang memperbolehkan lintas disiplin;
  - b. Di lapangan ada kesulitan mendapatkan tenaga untuk menjadi guru kesenian serta permasalahan akta dan perlu ada kerja sama antara PT seni dengan LPTK.
3. Rektor UNS (Prof. Dr. Haris Mudjiman) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Disadari adanya kemajemukan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan;
  - b. Perlu peningkatan peralatan/sarana prasarana dan workshop karena ada PT Seni yang praktek di tempat yang tidak layak;
  - c. Dari fakta hasil penilaian BAN, banyak program studi seni yang bernilai C;
  - d. Lamanya penyelesaian program studi bidang seni dan perlu adanya kebijaksanaan khusus tentang tugas akhir dan kemandirian mahasiswa.
4. Rektor Unibraw (Prof. Dr. Eka Afnan Troena, SE) menyampaikan masalah sebagai berikut:
  - a. Kehidupan seni di kalangan kampus dan masyarakat masih rendah untuk itu perlu formulasi baru tentang kehidupan seni di kampus;

- b. Perlu adanya jalur seni yang mengarah ke profesionalisme karena berkaitan dengan masalah pemasaran;
  - c. Perlu kerja sama antar PT Seni untuk memasarkan hasil-hasil STSI.
5. Rektor Universitas Cendrawasih (Ir. Franz Alexander Wospakrik, M.Sc.) menyampaikan masalah sebagai berikut:
  - a. Perlu adanya pemerataan pendidikan seni karena seni tradisional pembinaannya kurang dan tidak ada program studi yang berkaitan dengan seni sehingga tidak ada pembinaan yang jelas, terutama di Irian Jaya;
  - b. Perlu kerja sama antar PT sehingga mahasiswa Universitas Cendrawasih dapat direkrut PT Seni, dan
  - c. Kerjasama dan peran dari Dewan Kesenian perlu direalisasikan:
6. Rektor UNUD (Prof.Dr.dr. I Ketut Sukardika) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. PT menyongsong era reformasi pendidikan perlu memperhitungkan faktor pendukung dan penghambat karena kendala PT berbeda dan perlu dibentuk kerjasama;
  - b. Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNUD adalah kebudayaan dan UNUD telah bekerja sama dengan PT Seni lain yaitu STSI Denpasar;
  - c. Pendidikan seniman bermutu dan kerja sama ditingkatkan antar-PT sehingga saling mengisi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
7. Rektor STKIP Gorontalo (Prof. Dr. Nani Toluli) menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Perlu adanya kiat-kiat/usaha penciptaan kondisi supaya kampus menjadi sumber pelestarian seni budaya nasional maupun tradisional dan peran dosen agar ditingkatkan;
  - b. Mata kuliah seni dan pengembangan apresiasi di setiap program studi perlu ditingkatkan;
  - c. Perlu peningkatan usaha atau peran PT dalam menciptakan seni kreatif dan pengembangan bakat/potensi mahasiswa di bidang seni.
8. Wakil dari BAN-PT menyampaikan tanggapan bahwa ada kerja sama dengan STSI Surakarta tentang kriteria akreditasi bidang seni dan kriteria dimaksud akan disosialisasikan.
  9. Kepala PPPG Kesenian Yogyakarta (Drs. Imam Supandji) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Politeknik akan didirikan di bidang seni bekerjasama dengan STSI/IKIP dan pengembangan kurikulum di Sekolah Umum/SMP perlu lebih diperhatikan karena siswa tidak belajar seni sebagai substansi dan pengajarannya menjadi kurang efektif;
    - b. Perlu penggunaan internet dalam pengembangan Seni dan saling menginformasikan lewat email, dan
    - c. Komersialisasi seni harus hati-hati dan perlu pengkajian khususnya terhadap adopsi budaya luar dan budaya nasional/daerah.
  10. Wakil dari STSI Denpasar Bali menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Masih ada kendala-kendala PT bidang seni antara lain kurikulum nasional dan lokal, yang kurang fleksibel;

- b. Mahasiswa wilayah timur/Irian bisa kuliah di STSI Denpasar atau kuliah jarak jauh, dan merespon positif adanya S3 Seni di ITB;
  - c. Perlu peningkatan mutu dosen S2/S3 dan perlu adanya program spesialis.
11. Pimpinan Sidang (Dr. Rahayu Supanggah, S.Kar.) memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a. PT Seni perlu memperkaya wawasan dengan disiplin lain;
  - b. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa dari wilayah timur di STSI Surakarta perlu direalisasikan;
  - c. Membuat karya seni mahal dan perlu penyederhanaan serta kerja sama.
12. Wakil ISI Yogyakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
- a. Perlu ditingkatkan peran Dewan Pendidikan Seni (dahulu Konsorsium Seni) dan Badan Kerja Sama (BKS) yang terdiri dari 7 PT Seni Negeri dan 2 PTS Seni dan dibawah arahan DIKTI;
  - b. Bidang Seni perlu diperkenalkan secara optimal dan empu-empu seni diberi kesempatan sebagai guru besar (*emeritus*);
  - c. Perlu kerja sama program seni dan ISI membuka peluang mahasiswa dari wilayah timur dalam bidang seni kriya dan etnomonosiologi;
  - d. Pendidikan Seni dan Desain laris, tetapi kurang daya tampung sedangkan Seni Pedalangan sebaliknya.
13. Ketua STSI Bandung (Iyus Rusliana, STT) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelangkaan tenaga pendidik bergelar S2 dan S3 dan izin penyelenggaraan PT Seni dipercepat, serta kriteria akreditasi BAN belum jelas;
  - b. Kerjasama melalui BKS perlu ditingkatkan;
  - c. Produk seni hendaknya untuk tugas akhir studi saja, dan
  - d. Masih ada kekurangan guru kesenian serta ada keterkaitan studi antara SMSR atau SMKI dengan PT Seni.
14. Rektor ITB (Prof. Dr. Lilik Hendra Jaya, M.Sc.) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Perlu langkah-langkah proaktif dan kreativitas untuk menelurkan doktor di bidang seni karena doktor bidang seni masih kurang;
  - b. Kerja sama antar PT dan mutu/kualitas serta pemasaran pengembangan seni ditingkatkan.
15. Wakil dari Universitas Indonesia menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Perlu kelestarian dan peningkatan mutu bidang seni dan sekaligus pemerataan menumbuhkembangkan PT seni;
  - b. Diskusi diharapkan mengacu pada rambu-rambu/matriks dan memilih isu-isu strategis yang relevan.
16. Rektor Universitas Patimura menyampaikan bahwa tahun ajaran (TA) bidang seni terlalu lama, dari segi efektivitas menjadi kurang, dan karya-karya seni antara lain hasil Festival Seni Mahasiswa yang mendapat juara agar diperhitungkan.
17. Pimpinan Sidang (Dr. Rahayu Supanggah, S.Kar.) memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a. Peningkatan mutu dan relevansi kebutuhan masyarakat, perlu melihat misi dan visi PT seni;

- b. Peserta festival seni bukan dari mahasiswa PT Seni;
  - c. Karya bermutu yang akan dihasilkan oleh mahasiswa PT Seni mendapatkan bonus;
  - d. Ucapan terima kasih disampaikan kepada peserta dan selanjutnya Tim Perumus yang terdiri dari 5 orang akan menyelesaikan hasil perumusan diskusi bidang PT Seni.
18. Kesimpulan Tim Kelompok PT Seni
- a. Penambahan tiga poin pada masalah isu strategis, yaitu:
    - 1) terbatasnya PT yang memiliki kemampuan dan wewenang menyelenggarakan program studi S2 dan S3 dalam bidang seni;
    - 2) terbatasnya sosialisasi seni;
    - 3) penyetaraan guru besar bagi seniman berkualitas empu.
  - b. Penambahan delapan poin pada Kebijakan Perencanaan yaitu :
    - 1) akreditasi program studi seni;
    - 2) PT seni menyelenggarakan program studi S2 dan S3;
    - 3) pementasan disiplin seni;
    - 4) pembukaan program seni baru;
    - 5) penyebaran karya seni;
    - 6) penyediaan tenaga kependidikan seni oleh LPTK dan PT seni;
    - 7) penyelenggaraan festival seni, dan;
    - 8) penyetaraan seniman berkualitas empu sebagai guru besar (guru besar emeritus).

## **J. Subkelompok Dikti-Kopertis**

### **Proses Persidangan**

Sidang Diskusi Kelompok B5 Dikti-Kopertis dipimpin oleh Prof.Ir. Joetata Hadihardaja, Direktur Perguruan Tinggi Swasta (Dir. Gutiswa) Direktorat Jenderal Dikti dengan Sekretaris Dr.Ir. Tresna Darmawan Koordinator Kopertis Wilayah IV Bandung. Sidang diskusi kelompok ini ikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari unsur Kopertis Wilayah I-XII, Biro Organisasi, Inspektorat Jenderal, Atdikbud, universitas. Wakil dari BMPTS/API SI tidak hadir.

Untuk melakukan diskusi kelompok, sebagai dasar digunakan dua buah rambu-rambu diskusi Kelompok/Subkelompok yang telah dibagikan kepada setiap peserta yaitu Rambu-rambu Diskusi Kelompok secara umum dan Rambu-rambu Diskusi Kelompok Dikti. Format diskusi yang dibahas mengalami perubahan, dari yang telah disediakan dan yang dibagikan kepada peserta, karena ternyata Pimpinan Sidang mempunyai format diskusi yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan diskusi tidak dapat berjalan sampai beberapa menit. Selanjutnya, setelah format diskusi terbaru berhasil digandakan oleh Panitia, diskusi kelompok mulai berjalan.

Cara yang digunakan oleh pimpinan sidang adalah membagi peserta diskusi menjadi tujuh subkelompok dengan anggota 2-4 orang, masing-masing membahas topik sebagai berikut:

- a. penataan sistem pendidikan tinggi,
- b. peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan,
- c. peningkatan pemerataan pendidikan tinggi,
- d. kehidupan kampus dan pengembangan kemahasiswaan,
- e. pembinaan tenaga kependidikan,

- f. pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan terapan, dan
- g. pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan dasar.

Setelah subkelompok mendiskusikan topik masing-masing selama 1,5 jam, setiap subkelompok melalui Ketuanya masing-masing menyampaikan sidang pleno kelompok B5, sedangkan subkelompok lainnya dapat mengajukan usul atau perbaikan. Dinamika sidang diskusi kelompok sangat tinggi, setiap peserta secara keseluruhan terlibat dalam setiap usulan/perbaikan yang disampaikan oleh subkelompok yang lain.

Tidak seperti pada Kelompok Dikti lainnya, yang membahas sesuai dengan penyebutan kelompoknya, seperti Kelompok Dikti-LPTK membahas bagaimana pembinaan terhadap LPTK dengan segala permasalahannya, Kelompok Dikti-Politeknik juga membahas pembinaan politeknik dengan segala aspeknya, maka untuk Kelompok Dikti-Kopertis ini masalah yang dibahas tidak hanya masalah kopertis, tetapi seluruh kebijakan tentang pembinaan pendidikan tinggi (secara keseluruhan topik yang ada sebanyak tujuh buah).

Pada bagian akhir diskusi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sempat mengikuti sidang diskusi kelompok B5 ini dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Dikti dan Kepala Biro Perencanaan.

Sidang diskusi kelompok B5 Dikti-Kopertis ini secara keseluruhan diakhiri pukul 17.15, dengan kesimpulan seluruh hasil diskusi telah diserahkan kepada Tim Substansi (Dr. Bambang Indrianto) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya dirumuskan secara bersama dengan kelompok Dikti lainnya pada pukul 19.00 WIB.

### **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

Berdasarkan rambu-rambu diskusi yang telah dibagikan kepada setiap

peserta, hal-hal yang dibahas dan didiskusikan adalah:

- a. pendalaman dan kelengkapan dari isu strategis (kolom 8);
- b. perumusan kebijaksanaan umum, sesuai isu strategis yang dikembangkan (kolom 9);
- c. perumusan kebijaksanaan pelaksanaan untuk tahun 1999/2000 (kolom 10);
- d. perumusan kebijaksanaan perencanaan tahun 2000/2001 dalam bentuk program/kegiatan lanjutan atau baru sama sekali (kolom 11);
- e. perumusan saran dan tanggapan mengenai prioritas program/kegiatan secara rinci dan jelas (kolom 12).

Berikut beberapa usulan perbaikan, saran, dan tanggapan yang diajukan oleh tiap-tiap subkelompok yang selanjutnya ditanggapi oleh anggota subkelompok lainnya.

#### 1. Penataan Sistem Pendidikan Tinggi

- a. Isu strategis nomor 7 disempurnakan menjadi belum sempurnanya perangkat untuk akreditasi perguruan tinggi, dan kurangnya sosialisasi serta belum siapnya perguruan tinggi dalam mengimplementasikan ketentuan akreditasi.
- b. Kebijakan Pelaksanaan
  - 1) Butir 1.1 disempurnakan menjadi menata organisasi **yang berintikan pemberdayaan** dan meningkatkan mutu kerja perguruan tinggi dan pusat (Direktorat Jenderal Dikti) serta mengembangkan sistem informasi manajemen melalui **aktualisasi** pelaksanaan otonomi dan seterusnya.
  - 2) Butir 1.3 mendukung pelaksanaan akreditasi program studi PTN dan PTS melalui pemantapan sistem dari

BAN, kesiapan dan kewajiban perguruan tinggi untuk menggunakan hasil dan saran proses akreditasi.

Saran/tanggapan: Badan Akreditasi Nasional (BAN) agar menjalin kerja sama dengan standar akreditasi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sehingga BAN mendapat pengakuan internasional, tidak cukup hanya mengacu pada standar internasional.

- 3) Butir 1.4 dilengkapi dengan “serta menetapkan/ menyusun kebijaksanaan alokasi anggaran yang memberi peluang bagi perguruan tinggi yang berada di daerah tertinggal”
- 4) Butir 1.5 dilengkapi dengan “ mengusahakan alokasi dana khusus bidang pendidikan dari dana APBD dalam rangka otonomi daerah.

Saran: Dalam kegiatan penelitian, perlu dilakukan pendaerahan dengan berprinsip pada aspek pemerataan dan kompetisi untuk memperoleh kualitas yang baik.

## 2. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan

- a. Berkaitan dengan isu strategis (masalah), kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijaksanaan perencanaan, secara prinsip tidak ada usulan perubahan/ perbaikan.
- b. Saran/tanggapan yang diberikan:
  - 1) Menambah jumlah PTN/PTS untuk diberi wewenang membuka program pascasarjana;
  - 2) Menambah program studi S2 dan S3 bagi PTN/PTS yang sudah ada program pascasarjana;

- 3) Meningkatkan kinerja pusat-pusat penelitian yang sudah ada;
- 4) Mensosialisasikan lembaga pendidikan (lemdik) pada PTN/PTS;
- 5) Merangsang dan menggalakkan penerbitan buku, jurnal ilmiah yang terakreditasi;
- 6) Meningkatkan penulisan artikel untuk dipublikasikan melalui jurnal internasional dengan diberi insentif;
- 7) Menyelenggarakan pertemuan ilmiah, diskusi, seminar untuk menghasilkan dana dengan penyediaan modal awal;
- 8) Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, seperti Freport dll;
- 9) Berkaitan dengan *land* dan *levy and grant college*, perlu mempersiapkan aturan main yang jelas, peraturan yang mendukung, bermanfaat, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekitar, meningkatkan fungsi dan tugas perguruan tinggi, dan pemeratakan PTN dan PTS;
- 10) Menyederhanakan proses kurikulum nasional (Kurnas) dengan tetap mempertahankan rasionya antara 50-80%, misal untuk teknik harus 60%, untuk diploma 80% dan seterusnya. Pemerintah tidak akan menetapkan lagi, tetapi sudah diatur oleh Majelis Pertimbangan Pendidikan Tinggi (MPPT) dengan prinsip dasar bahwa kurnas dimaksudkan agar lulusan yang programnya sama walau dari perguruan tinggi berbeda tetap dapat berkomunikasi;

11) Mendirikan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk proses perizinannya juga dengan sungguh-sungguh.

Sebagai informasi, sekarang telah diizinkan perguruan tinggi asing (Swiss) bekerja sama dengan pemerintah mendirikan Institut Teknologi Swiss Tangerang (ITST).

3. Kehidupan kampus dan pengembangan kemahasiswaan
  - a. Kebijakan umum butir kolom 9 dilengkapi dengan “berakhlak mulia, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
  - b. Kebijakan pelaksanaan kolom 10 ditambah:
    - 1) Butir 4.4 : Meningkatkan peranserta aktif mahasiswa dan dosen dalam kegiatan membentuk ahklak mulia dan peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    - 2) Butir 4.5 : Mengupayakan penggalian dana alternatif dari masyarakat, dunia usaha untuk ikut membantu pembiayaan kegiatan mahasiswa di daerah dalam rangka otonomi perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
  - c. Kebijakan perencanaan kolom 11, untuk butir 4.2 dilengkapi dengan “dalam rangka persiapan pelaksanaan otonomi daerah”
4. Meningkatkan dan perluasan daya tampung PT.
  - a. Untuk kebijaksanaan umum butir 5, selain bidang sains dan teknik, perlu bidang manajemen dan akuntansi guna menyongsong percaturan global.

- b. Berkaitan dengan kebutuhan minimal perguruan tinggi, perlu diadakan prioritas untuk sarana prasarana pada perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur.
- c. Guna meningkatkan pemerataan pendidikan, dapat ditempuh cara tertentu dengan menambah daya tampung pada program studi yang sudah disetujui, menambah program studi baru, atau mendirikan PTS baru.
- d. Munculnya PTS-PTS liar yang tidak atau belum mendapat izin perlu dikoordinasikan dengan pihak Mabes POLRI, terlebih-lebih dengan kasus jual beli gelar *three in one* (DBA, MBA, MM) atau gelar Doktor sekaligus.  
Saran: Masalah diselesaikan pada tingkat pusat, jangan dibiarkan kopertis atau daerah atau mengambil kebijakan dan menentukan langkah-langkah penanganannya sendiri-sendiri.
- e. Berkaitan angka partisipasi kasar (APK) yang sulit naik, perlu diperhatikan penambahan fasilitas dan sarana laboratorium, khususnya pada program eksakta, karena untuk program noneksakta sudah cukup baik.

## 5. Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan

- a. Kebijakan perencanaan
  - 1) Butir 1.1: dilengkapi dengan “lebih terarah”;
  - 2) Butir 1.2: pendidikan S2 kedua diganti dengan “pendidikan S1 kedua”, dan kata “berpartisipasi” diganti dengan “berprestasi”
- b. Saran/Tanggapan: Perlu dilakukan evaluasi kurikulum LPTK dengan melibatkan calon tenaga kependidikan agar bidang studi cocok *match* dengan kebutuhan di SD, SLTP, sekolah menengah umum dan kejuruan.

6. Pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan dasar  
Kebijaksanaan perencanaan tahun 2000/2001 ditambah:
  - a. Meningkatkan kemampuan peneliti untuk menyusun proposal pelaksanaan dan implementasi penelitian melalui penataran, peningkatan jenjang pendidikan, kerjasama untuk memperoleh bantuan sumber daya manusia pendamping yang menyediakan alat laboratorium dengan litbang perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
  - b. Meningkatkan kualitas jurnal untuk mendapat akreditasi.
  - c. Mendorong penerbitan jurnal yang berkualitas pada PTN/PTS agar mendapat pengakuan/akreditasi dari Dikti dan internasional.
  - d. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi asing.
7. Pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan terapan
  - a. Isu strategis butir 1 dilengkapi dengan “sistem kompetisi berjenjang dengan memperhatikan unsur pemerataan”.
  - b. Kebijakan pelaksanaan butir 1 dilengkapi dengan “dalam pelaksanaan penerapan hasil penelitian haruslah arif dengan memperhatikan tingkat kemampuan teknologi, sosiologi masyarakat pengguna”
  - c. Hasil-hasil penelitian harus diupayakan hak patennya sebagai hak intelektual (HAKI).
  - d. Saran:
    - 1) Diupayakan dana khusus untuk penelitian pada perguruan tinggi yang sedang berkembang.
    - 2) Diupayakan penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi.
    - 3) Peningkatan koordinasi perguruan tinggi.

**BAB VI**  
**SIDANG PARIPURNA III**  
**PEMAPARAN HASIL DISKUSI KELOMPOK**  
**DAN UPACARA PENUTUPAN**

**A. Kelompok Dikdasmen**

**Proses Persidangan**

Pemaparan hasil kerja kelompok disampaikan secara panel dengan pimpinan sidang Dirjen Dikdasmen. Pemaparan terlebih dahulu diawali penyampaian pendapat kelompok bahwa kebijakan R.VI dan isu strategis tahun 1999/2000 merupakan kebijakan yang sedang berjalan sehingga program kegiatannya telah masuk dalam DIP tahun 1999/2000. Oleh karena itu, fokus diskusi mencakup isu-isu pragmatis dan strategis pendidikan tingkat dasar dan menengah masa depan sebagai kebijaksanaan awal perencanaan tahun 2000/2001

Materi yang dipaparkan terbagi ke dalam 3 masalah yaitu isu strategis tahun 2000/2001, masalah khusus, dan pendekatan penerapan kebijakan. Setelah pemaparan, dilanjutkan dengan penyampaian beberapa saran dari peserta Rakernas dan tanggapan Dirjen Dikdasmen.

**Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Isu strategis tahun 2000/2001 meliputi TK, SD, SLB, SLTP, dan SMU/SMK.
  - a. Taman Kanak-kanak  
Perlu peningkatan insentif dan bantuan operasional bagi guru TK non PNS, bantuan guru DPK dan alat bermain, serta

peningkatan kelayakan/kemampuan guru bagi TK swasta. Untuk pengawas TK/SD perlu ditinjau kembali besarnya dana operasional yang hanya Rp12.000,00 dan prosedur pengangkatannya agar dapat disederhanakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Sekolah Dasar

Angka partisipasi SD sudah cukup tinggi sehingga perlu perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan mutu melalui:

- 1) pengadaan sarana pendidikan (alat peraga, buku pelajaran dan perpustakaan) dan standardisasi ergonomik mebeler sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
- 2) intensifikasi peran kancam, pengawas guru termasuk pengadaan guru kontrak dan peninjauan kembali persyaratan/kriteria rekrutmen calon tenaga guru sesuai kondisi daerah;
- 3) reorientasi penyelenggaraan EBTANAS, penambahan dan pengaturan kembali jam belajar, dan jadwal pelajaran di TK dan SD, serta revitalisasi SD.

c. SLB

Pendataan perlu diikuti dengan pemberian pelayanan sesuai dengan jenis dan gradasi kelainannya.

d. SLTP

- 1) Sebagai upaya untuk menyukseskan wajib belajar perlu pendekatan inovatif melalui teknologi komunikasi dan informasi, bantuan guru dan pemberdayaan sekolah swasta, penggalangan dana masyarakat dan menambah

jumlah DBO ke sekolah dari Rp. 6 juta menjadi Rp. 8 juta, penyelenggaraan SLTP terbuka, penyelenggaraan UGB/USG dan RKB sesuai kondisi geografis dan jarak tempuh sekolah, serta penyusunan standar khusus bangunan sekolah di perkotaan.

- 2) Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, masih perlu dilakukan penambahan buku pelajaran, perpustakaan sekolah alat laboratorium, sarana belajar termasuk mebel pengganti; penyesuaian sistem rayonisasi sekolah unggulan; pengadaan rumah dinas kepala sekolah dan penjaga sekolah; serta perbaikan sistem dan model penataran.

e. SMU/SMK

- 1) Upaya peningkatan mutu pendidikan SMU/SMK perlu dilakukan melalui akreditasi sekolah negeri dan swasta; program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (*school based quality assurance program*); supervisi akademik dengan skema baru (pengawasan kontrak dari lembaga independen); dan peningkatan kualitas guru;
- 2) Perlu penyempurnaan sistem penilaian angka kredit guru serta sistem penataran dan pelatihan guru baik dari segi rekrutmen, materi, metode, pelaksanaan maupun sistem evaluasinya.
- 3) Penyempurnaan kurikulum SMU dan SMK disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah, dan pemberlakuannya secara bertahap pada sekolah yang siap.

- 4) Peningkatan mutu mata pelajaran IPA, Matematika dan bahasa Inggris ditekankan sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia dalam memasuki persaingan global.
- 5) Pengembangan sistem seleksi dan evaluasi kinerja kepala sekolah, karena kualitas SMU dan SMK berhubungan dengan mutu kepemimpinan kepala sekolah.
- 6) Pencarian sumber-sumber pendapatan biaya pendidikan di luar pemerintah karena anggaran sekolah saat ini sangat minim, dan perlu dikembangkannya formula baru perimbangan alokasi dana pusat, dana propinsi, dan dana lokal untuk sekolah.
- 7) Pengembangan sistem penentuan kelulusan siswa yang lebih bertumpu pada hasil EBTANAS dan perlu pemikiran agar NEM sekolah diumumkan secara luas agar masyarakat dapat menilai kualitas masing-masing sekolah.
- 8) Perbaikan sistem seleksi masuk SMU dan SMK agar calon siswa sudah memahami apakah akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau terjun ke lapangan kerja. Di samping itu sistem evaluasi hasil belajar siswa dan ujian akhir perlu pula diperbaiki.
- 9) Optimalisasi pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan khususnya SMK Swasta, antara lain melalui peningkatan mutu PSG.
- 10) Untuk mendukung program pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, perlu optimalisasi sarana

dan prasarana pendidikan dan penyempurnaan buku pelajaran secara terus menerus.

2. Masalah-masalah khusus

- a. Desentralisasi pendidikan dan implikasi penataan SDM pusat dan daerah, serta pengkajian kembali fungsi Kancam.
- b. Perlu pengkajian kembali penggunaan *nomenklatur* jenjang sekolah SD, SLTP, SMU, dan SMK.
- c. Penataan kembali sistem dan format EBTA/EBTANAS, reorientasi model pembelajaran pendidikan budi pekerti, dan pengembangan materi budaya dalam kurikulum muatan lokal.
- d. Pengkajian khusus masalah pelayanan anak berkemampuan luar biasa melalui berbagai skema percepatan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam persaingan global.
- e. Peningkatan peran swasta, masyarakat, dan orang tua.

3. Pendekatan penerapan kebijaksanaan

Dengan adanya program desentralisasi pendidikan, dan memperhatikan berbagai kondisi sekolah dan wilayah yang berbeda, penerapan kebijaksanaan pendidikan pada masa yang akan datang tidak harus bersifat seragam atau satu kebijakan untuk semua (*one fit for all*), dan hanya diterapkan bagi sekolah atau wilayah yang sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Di samping itu, perlu pula penataan secara menyeluruh manajemen pendidikan di pusat dan daerah dengan memperhatikan aspek profesionalisme, *capacity building*, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, dan penggalangan partisipasi komunitas.

4. Saran dari peserta Rakernas untuk kebijaksanaan yang akan datang antara lain adalah bahwa untuk meningkatkan mutu pelajaran bahasa Inggris perlu didukung dengan guru yang berkualitas:
  - a. Perlu peningkatan penghargaan terhadap guru SD dan guru SD terpencil dari segi gaji;
  - b. Penataran yang diselenggarakan di Jakarta perlu dipikirkan biaya perjalanannya;
  - c. Pembangunan gedung SD perlu dilengkapi dengan perpustakaan;
  - d. Perlu dipikirkan agar ada pembinaan dan penghargaan terhadap sekolah RI (sekolah swasta semi pemerintah) di luar negeri, dan pemberian kemudahan urusan kepindahan siswa yang kebanyakan anak pegawai kedutaan;
  - e. Sebagian lirik lagu hymne guru yang berbunyi: "... pahlawan tanpa tanda jasa", akhir-akhir ini dampak psikologisnya seperti dilecehkan dan oleh karena itu perlu kebijakan untuk mengubahnya.

## **B. Kelompok Kebudayaan**

### **Proses Persidangan**

Sidang pleno pemaparan hasil diskusi sidang Kelompok Kebudayaan pertama-tama dibuka oleh Dirjen Kebudayaan yang melaporkan bahwa diskusi kelompok diprioritaskan pada 2 program, strategis yaitu Pengkajian Nilai-Nilai Tradisional dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya. Kemudian, hasil diskusi dan usulan kebijakan tahun 1999/2000 disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Kebudayaan dan

usul kebijakan berkembang dengan adanya saran dan imbauan yang disampaikan oleh peserta pada sesi tanya jawab.

### **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

1. Pengkajian Nilai-Nilai Tradisional
  - a. Tidak saling mengerti antara pendukung kebudayaan di tempat-tempat pertemuan interaksi arena kebudayaan.
  - b. Ada interaksi budaya yang saling menguntungkan. Dari isu pokok di atas, kelompok mengusulkan perlu diadakannya kajian mendalam pada arena interaksi budaya agar potensi konflik dapat dihindari.
  - c. Didiskusikan juga ihwal moral dan etika, tetapi dengan kebijakan Ditjen Kebudayaan dianggap sudah cukup.
2. Pembinaan Kesenian
  - a. Pembinaan kesenian baik di sekolah dalam negeri maupun sekolah Indonesia di luar negeri tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Sesuai dengan kurikulum 1994, mata pelajaran kesenian dan keterampilan disampaikan oleh satu guru, padahal ini sukar disatukan. Pengajaran kesenian diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kepekaan terhadap seni pada siswa.
    - 2) Persebaran guru mata pelajaran kesenian tidak merata sehingga pada propinsi-propinsi tertentu terjadi kelebihan guru (Sumatera Barat kelebihan 200 guru), sedangkan propinsi Lampung, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya kekurangan.
    - 3) Upaya penambahan guru melalui pengangkatan mengalami hambatan karena menyangkut keharusan

bagi pelamar memiliki akta IV. Di sisi lain, S1 kesenian lulusan IKIP/LPTK dianggap kurang memadai kemampuan keseniannya.

- 4) Menurut Atdikbud, masih ada pengiriman misi kebudayaan yang dilakukan secara tidak resmi sehingga seringkali terjadi pelanggaran hak-hak seniman yang tidak diberikan sesuai dengan kemampuan, juga menimbulkan masalah-masalah seperti kehabisan dana dari rombongan kesenian tersebut.

Usul kebijakan hal di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mata pelajaran kesenian diberikan secara tersendiri, tidak digabung dengan mata pelajaran keterampilan.
  - 2) Pembicaraan dengan BAKN tentang kemungkinan pengangkatan guru kesenian nonakta IV perlu diadakan.
  - 3) Pengiriman misi kebudayaan/kesenian dilakukan secara resmi dengan koordinasi pihak-pihak terkait, terutama unit pelayanan luar negeri.
  - 4) Hak cipta peseorangan perlu dilindungi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Beberapa usul dari peserta sidang pleno antara lain adalah peningkatan upaya menjaga pelestarian budaya yang telah dilakukan secara terkoordinasi antar departemen yaitu Depdikbud, Departemen Penerangan, dan Departemen Pariwisata Seni dan Budaya (Deparsenibud); penegasan perlunya pemisahan pengajaran kesenian dari keterampilan; perlunya buku petunjuk kebudayaan khususnya bagi Atdikbud, dalam hal ini Direktorat pada Ditjen Kebudayaan telah menerbitkan buku tersebut,

misalnya buku kesenian yang dapat dicari di Direktorat Kesenian. Ditjarnittra telah pula mengeluarkan Ensiklopedia Suku Bangsa Indonesia.

## **C. Kelompok Penunjang**

### **Proses Persidangan**

Pemaparan Kelompok Penunjang dimulai pukul 11.25 sampai dengan pukul 12.15 WIB oleh Dr.Ir. Wahyudi Ruwiyanto sebagai Ketua Kelompok A5 Penunjang. Namun, penyampaiannya diserahkan kepada perwakilan tiap-tiap unit kerja. Ihwal Sekretariat Jenderal disajikan oleh Drs. Soenardi Dwidjosusastro, Kepala Biro Hukum dan Humas, ihwal Inspektorat Jenderal disajikan oleh HR. Kosasih Ardivicara, SH., MEd., Sekretaris Inspektorat Jenderal. dan ihwal Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan disajikan oleh Drs. Suheru Muljoatmodjo, M.A, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Hasil Perumusan Sidang Kelompok Penunjang**

#### **1. Sekretariat Jenderal**

##### **a. Masalah strategis:**

- 1) Pengaruh penerapan otonomi daerah terhadap organisasi dan tatalaksana Depdikbud Pusat dan Daerah;
- 2) Hubungan Masyarakat Depdikbud yang bersifat proaktif;
- 3) Peningkatan kemampuan profesionalisme dalam pembinaan karier PNS;

- 4) Reformasi perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- 5) Strategi penerimaan, pengangkatan, penempatan tenaga kependidikan dan pemberdayaan PNS;
- 6) Penataan aset dan pengadaan gedung kantor;
- 7) Efisiensi dan efektivitas serta produktivitas dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan dan pengembangan perencanaan;
- 8) Peningkatan kerjasama luar negeri;
- 9) Pelayanan prima ketatausahaan;
- 10) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia kegrafikaan;
- 11) Pengadaan buku bermutu dan peningkatan minat baca masyarakat.

b. Kebijakan umum

Kelompok ini juga mengusulkan 4 butir kebijakan umum, yaitu:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan koordinasi pemantapan sistem perencanaan, pengendalian, penilaian program dan penganggaran, peningkatan kemampuan tenaga perencanaan dan pengelolaan program, pengadaan dan pengelolaan tenaga kependidikan dan kebudayaan serta peningkatan pelayanan kepegawaian, pengelolaan dan pendayagunaan aset dan sumber daya, pemantapan reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan, pembinaan dan

pemantapan ketatausahaan, peningkatan hubungan kerja sama luar negeri antara lembaga di dalam dan di luar negeri, peningkatan koordinasi antara kegrafikaan dan perbukuan.

- 2) Membudayakan dan memperluas peran dan fungsi hubungan masyarakat (*publik relations*) sebagai saluran informasi dalam memasyarakatkan program, serta secara produktif menyerap aspirasi dan tuntutan masyarakat akan pendidikan dan kebudayaan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan yang didukung oleh SDM yang memadai baik jumlah maupun mutunya.
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah, melalui pengembangan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas, dan pendayagunaan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan diklat struktural, fungsional dan teknis, yang mengarah kepada kedisiplinan, keteladanan, serta pemberdayaan kepemimpinan yang andal diseluruh jajaran Depdikbud.
- 4) Melaksanakan pengkajian restrukturisasi dan revitalisasi organisasi Depdikbud dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta melaksanakan penataan manajemen yang mengarah pada manajemen modern.

c. Kebijakan awal perencanaan tahun 2000/2001

- 1) Perlu melaksanakan pengkajian hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, peningkatan sumber daya hukum, dan jaringan informasi hukum.
- 2) Perlu revitalisasi organisasi, penataan hukum, bagan, sistem dan prosedur kerja, standarisasi hasil kerja, penataan kepegawaian, dan penataan anggaran.
- 3) Perlu meningkatkan kualitas SDM, keterpaduan kehumasan, dan mengembangkan SIM kehumasan.
- 4) Perlu mengadakan sistem informasi kepegawaian, pemantapan perencanaan kebutuhan, peningkatan produktivitas kerja, serta pengembangan sistem karier PNS.
- 5) Perlu mengkonsolidasikan perencanaan, pengembangan profil pendidikan, evaluasi pelayanan informasi perencanaan, dan peningkatan sumber daya perencanaan dan studi kelayakan.
- 6) Perlu menyempurnakan administrasi pengendalian dan penyaluran barang dan jasa serta penataran bukti milik dan optimalisasi penggunaannya.
- 7) Perlu memantapkan penyusunan anggaran, pengawasan pelaksanaan, dan pemantapan penyusunan anggaran melalui SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah).
- 8) Perlu memantapkan sistem dan mekanisme bantuan luar negeri, kerja sama internasional, pelatihan staf, peninjauan ketentuan belajar di luar negeri, serta peningkatan sistem informasi kerja sama luar negeri.
- 9) Perlu memantapkan pembinaan teknis kegrafikaan, pembinaan jasa grafika, dan penyebarluasan informasi teknologi kegrafikaan.

- 10) Perlu mengkoordinasikan pengadaan buku, peningkatan kemampuan staf, pemanfaatan sistem informasi perbukuan.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Masalah strategis digambarkan sebagai berikut:
    - a. Kurikulum 1994 pendidikan dasar dan menengah untuk beberapa bidang studi masih mengandung kelemahan antara lain materi dan tata urutannya.
    - b. Prestasi belajar siswa SD, SLTP, dan SM sebagai salah satu indikator mutu pendidikan sebagaimana terlihat dalam NEM SLTP dan SMU secara umum masih rendah.
    - c. Pelaksanaan pendidikan di sekolah cenderung lebih menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran dan kurang berimbang dengan pengembangan sikap sehingga nilai-nilai moral kurang tercermin dalam perilaku peserta didik.
    - d. Jumlah dan mutu peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan masih belum memadai dan terbatasnya bidang keahlian dibandingkan dengan masalah yang dihadapi.
    - e. Penelitian dan pengembangan kebijakan belum banyak mencakup permasalahan di bidang kebudayaan.
  3. Inspektorat Jenderal Depdikbud
    - a. Masalah strategis dapat digambarkan sebagai berikut:
      - 1) Pengawasan melekat belum efektif, wasnal belum sepenuhnya berhasil mencegah kebocoran keuangan negara.

- 2) Wasnal belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan.
  - 3) Masih lemah koordinasi pengawasan baik intern maupun ekstern.
  - 4) Belum berfungsinya lembaga BINAP secara optimal.
  - 5) Meningkatnya pengaduan masyarakat dan isu KKN Pengaduan belum diimbangi dengan sistem pengawasan yang mantap.
  - 6) Pengawasan program JPS belum dilaksanakan.
  - 7) Belum jelas pola pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan dan belum berlaku undang-undang pemerintah daerah.
- b. Kebijakan Umum Tahun 1999
- 1) Mengefektifkan pengawasan melekat, memantapkan pengawasan fungsional, mengoptimalkan pendayagunaan hasil wasnal dan waskat, mewujudkan keterpaduan sinergi ketiga bentuk pengawasan tersebut.
  - 2) Memantapkan sistem pengawasan dengan mewujudkan keterpaduan antara pengawasan Inspektorat Jenderal dengan aparat pengawasan di daerah, merintis penataan kelembagaan, memantapkan koordinasi waskat dengan instansi terkait, dan meningkatkan profesionalisme aparat.
- c. Kebijakan Umum Tahun 1999/2000
- 1) Mendorong pemasyarakatan waskat serta meningkatkan peran lembaga BINAP.
  - 2) Memantapkan sistem wasnal dan mengkaji penyesuaian organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal sesuai dengan perkembangan.

- 3) Memantapkan keterpaduan pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan supervisi WAS/Penilik serta mewujudkan keterpaduan pengawasan dengan PTN dan Kopertis.
  - 4) Memantapkan koordinasi rencana dan pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya dengan instansi terkait.
  - 5) Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat pengawasan dan meningkatkan pengelolaan sarana prasarana.
  - 6) Meningkatkan analisis hasil pengawasan fungsional dan pendayagunaan pengawasan masyarakat.
  - 7) Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap program JPS.
  - 8) Merintis penataan kelembagaan, ketenagaan, dan ketatalaksanaan pengawasan dalam rangka pelaksanaan undang-undang Pemerintah Daerah.
- d. Kebijakan Awal Perencanaan Tahun 2000/2001
- Kebijakan awal perencanaan pada tahun 2000/2001 dapat digambarkan sebagai berikut:
- 1) Perlu terus mendorong pemasyarakatan waskat serta meningkatkan peran lembaga BINAP.
  - 2) Perlu menetapkan sistem pengawasan fungsional dan mengkaji penyesuaian organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal sesuai dengan perkembangan.
  - 3) Perlu terus memantapkan keterpaduan pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan supervisi/ pengawasan penilik serta mewujudkan keterpaduan pengawasan dengan PTN dan Kopertis.

- 4) Perlu terus memantapkan koordinasi rencana dan pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya dengan instansi terkait.
- 5) Perlu terus meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat pengawasan dan meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
- 6) Perlu terus meningkatkan analisis tentang hasil pengawasan dan pendayagunaan pengawasan masyarakat.
- 7) Perlu terus melaksanakan pengawasan dan pemantauan terpadu program JPS.
- 8) Perlu mewujudkan penataan kelembagaan, ketenagaan dan ketatalaksanaan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

#### **D. Laporan Sesjen dan Penyampaian Butir-butir Kebijakan Umum**

##### **Proses Persidangan**

Acara penutupan Rakernas tahun 1999 ini, selain dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Taskin yang sekaligus menutup acara Rakernas.

Laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal meliputi persidangan, peserta, evaluasi penyelenggaraan, pertandingan golf peduli pendidikan, dan hasil Rakernas.

## **Butir-Butir Pokok Sajian/Persidangan**

### 1. Persidangan

Persidangan paripurna ini diisi dengan amanat Presiden RI, pengarahannya Mendikbud, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, serta penyampaian berbagai kebijakan dengan adanya otonomi daerah yang disampaikan oleh Dirjen PUOD Depdagri, Asisten Menko Wasbangpan Bidang Otonomi Daerah, Kepala BAKN, dan Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan.

Pelaksanaan persidangan paripurna dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1999 di Istana Negara dan Kantor Pusat Depdikbud Senayan Jakarta.

Pada tanggal 18 Mei 1999, dari pagi sampai dengan siang hari (07.30 s.d. 13.00 WIB) dilaksanakan pemaparan hasil evaluasi pelaksanaan program selama Repelita VI dan usul kebijaksanaan tiap-tiap unit utama.

Dari pukul 14.00 s.d. 17.00 WIB dilanjutkan sidang kelompok yang dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok Nondikti dan kelompok Dikti.

Kelompok Nondikti terdiri atas 5 subkelompok yaitu Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Diklusepora, Kebudayaan, dan Penunjang (Setjen, Balitbang, dan Itjen), sedangkan kelompok Dikti terdiri atas 5 subkelompok yaitu LPTK, Politeknik, PT/ Institut, PT Seni, dan Kopertis.

Dari diskusi kelompok ini diperoleh masukan yang cukup banyak untuk lebih memantapkan hasil evaluasi dan usul kebijaksanaan. Perumusan hasil diskusi kelompok dilaksanakan pada pukul

19.00 s.d. 21.00 yang terdiri dari 7 laporan hasil diskusi kelompok (7 unit utama).

2. Peserta

a. Jumlah peserta

Peserta yang diundang = 326 orang

Peserta yang hadir = 299 orang

Tidak hadir = 27 orang

terdiri dari 4 pejabat pusat termasuk Irjen karena sakit, 9 pejabat dari daerah serta 14 peserta tamu.

b. Kondisi peserta

Pada umumnya kondisi peserta cukup sehat karena setiap pagi peserta mengikuti senam kesegaran jasmani, namun demikian masih terdapat 143 orang yang mengalami gangguan kesehatan.

3. Evaluasi penyelenggaraan

Evaluasi dilakukan dengan angket, dan dari 299 angket yang diedarkan kepada 299 orang tersebut, kembali sebanyak 117 angket (39,5%).

Karena angket yang kembali tidak sampai 50% dan keterwakilan tiap-tiap kelompok unit kerja perimbangannya tidak diungkapkan, maka kemungkinan sampel bias dan kesimpulan tersebut di atas belum dapat mewakili aspirasi seluruh peserta.

4. Pertandingan Golf Peduli Pendidikan

Perkumpulan Golf Handayani dari Balai Pustaka Depdikbud berhasil menggalang dana dari penyelenggaraan pertandingan golf peduli pendidikan yang dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Mei 1999 bertempat di Padang Golf Bogor Raya. Dana yang terkumpul sebanyak Rp. 250 juta, yang akan disumbangkan

kepada Dharma Wanita Depdikbud Rp. 125 juta, pembangunan masjid Depdikbud Rp. 50 juta, Bapor KORPRI Depdikbud Rp. 25 juta, dan Persatuan Golf Handayani Rp. 50 juta.

5. Hasil Rakernas

- a. Visi pendidikan nasional adalah mempersiapkan individu dan masyarakat sehingga memiliki kemampuan dan motivasi serta berpartisipasi aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani yang diharapkan.

Misi pendidikan nasional jangka panjang adalah melaksanakan sistem pendidikan nasional yang lebih otonom, adaptif dan fleksibel, serta berwawasan global sehingga menjadi pusat peradaban, dengan komitmen dan partisipasi masyarakat, menuju terbentuknya individu dan masyarakat madani.

Misi pendidikan nasional jangka pendek adalah memulihkan kembali pendidikan nasional dari dampak krisis moneter dan ekonomi, mengatasi permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini, dan meletakkan dasar-dasar reformasi pendidikan secara terarah, sistematis, bertahap, dan berkelanjutan dalam terbentuknya masyarakat madani.

- b. Meningkatkan program penanggulangan dampak krisis moneter dan ekonomi dengan tetap menjaga mutu dan relevansi pendidikan sehingga dapat dilakukan peningkatan efisiensi internal serta penajaman sasaran program Jaring Pengaman Sosial.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang berwawasan budaya bangsa dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan agar budaya

nasional lebih mengakar pada masyarakat sehingga mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat jatidiri, serta mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui upaya penanaman nilai-nilai budaya, ketakwaan, dan budi pekerti di lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, termasuk peserta didik di semua jalur dan jenjang pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam TAP MPR No. X Tahun 1998.

- d. Menegakkan citra satuan pendidikan sebagai pusat belajar peserta didik dalam membentuk keunggulan dan pembelajaran masyarakat dengan mengaktualisasikan nilai dan norma pendidikan serta penghargaan dan sanksi (*reward and sanction*) dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera; meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar; menegakkan disiplin dan kreativitas sejak usia dini; membudayakan kebiasaan belajar, bekerja, dan membangun; meningkatkan kinerja profesionalisme guru dan tenaga kependidikan; serta memberdayakan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan keteladanan kepala sekolah, pimpinan perguruan tinggi, dan pimpinan lembaga pendidikan luar sekolah.
- e. Memantapkan standar pengendalian mutu dan relevansi pendidikan serta pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembakuan dan koordinasi perencanaan dan pembinaan sarana dan prasarana pendidikan, pemantapan pelaksanaan, serta evaluasi dampaknya terhadap upaya peningkatan mutu dan relevansi pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

- f. Meningkatkan kegiatan kepramukaan, kepalangmerahan, olahraga, pemuda, dan kesenian pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagai wahana pembinaan disiplin; pengembangan nilai moral, kemanusiaan, etika, dan cita rasa seni; pengembangan sikap kreatif; pengembangan inteligensi emosional; dan pengembangan keterampilan adaptif.
- g. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pemerintah serta swasta di dalam dan di luar negeri secara berkesinambungan, antara lain dalam bentuk *Land Grand College*, guna menunjang keberhasilan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
- h. Melaksanakan reformasi pendidikan secara sistematis (terencana, bertahap, dan berkesinambungan) di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dengan mempersiapkan skenario pengembangan program pembinaan SDM dan didukung oleh anggaran yang semakin meningkat sejalan dengan tuntutan globalisasi dan desentralisasi.
- i. Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dengan fokus pada penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) yang berwawasan mutu dan keunggulan melalui pembaruan proses pembelajaran yang bermakna di sekolah dan luar sekolah.
- j. Meningkatkan peran serta pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini melalui perluasan daya tampung, peningkatan penyelenggaraan pembinaan TK, pengembangan model pendidikan melalui kelompok bermain, pendidikan pada lembaga penitipan anak dengan

- memadukan aspek gizi, kesehatan, dan psikososial secara seimbang dalam rangka meletakkan dasar arah perkembangan dan pertumbuhan anak seutuhnya.
- k. Meningkatkan mutu dan efisiensi penyelenggaraan sekolah dasar sebagai bagian dari Wajar Dikdas 9 Tahun melalui peningkatan pendidikan budi pekerti dan mutu pengajaran, terutama untuk pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, serta Matematika; penanaman wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi; penataan kelembagaan (*regrouping*); peningkatan pengajaran yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - l. Meningkatkan usaha penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dengan mempertahankan pencapaian dan meningkatkan daya tampung SLTP dengan tetap mempertahankan mutu melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, penambahan SLTP Terbuka, pembangunan UGB dan RKB secara terseleksi, pembebasan biaya yang memberatkan orang tua siswa, pemberian beasiswa bagi siswa rentan putus sekolah, dan pemberian dana bantuan operasional (DBO), serta peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.
  - m. Mempertahankan mutu dan meningkatkan daya tampung pendidikan menengah umum melalui program jaminan kualitas sekolah (*quality assurance*), akreditasi, dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, pembangunan UGB dan RKB secara terkendali, peningkatan perimbangan program peserta didik, pembebasan biaya yang

- memberatkan orang tua siswa, pemberian dana bantuan operasional, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- n. Meningkatkan relevansi, mutu, daya tampung, dan pemasyarakatan SMK, peningkatan pembinaan dan pengendalian program, melalui pemantapan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda, pengembangan unit produksi, perbaikan proses belajar mengajar, pengembangan sistem evaluasi dan sertifikasi, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta bekerja sama dengan instansi terkait, dunia industri, dan dunia usaha.
  - o. Memantapkan dan meningkatkan pembinaan siswa agar memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi, kedisiplinan, kejujuran, akhlak mulia, wawasan yang luas, dan budi pekerti yang luhur melalui pembinaan organisasi siswa intrasekolah (OSIS), kepramukaan, apresiasi terhadap seni dan budaya, kepalangmerahan, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kewirausahaan, dan kegiatan sosial lain dalam rangka menanamkan rasa kemanusiaan dan jiwa sosial, serta wawasan kebangsaan.
  - p. Menata sistem pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas perguruan tinggi, melalui peningkatan koordinasi pusat dan daerah, peningkatan sistem perencanaan, penataan kinerja organisasi perguruan tinggi, pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien, peningkatan pengelolaan manajemen mutu terpadu, aktualisasi asas otonomi, akuntabilitas, akreditasi, evaluasi, serta pengembangan sistem informasi perguruan tinggi.

- q. Meningkatkan mutu dan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan melalui keberpihakan pendanaan bagi perguruan tinggi yang masih lemah, peningkatan kualitas tenaga akademik secara berkelanjutan, peningkatan intensitas proses penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi, penataan program studi, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan terkendali, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengadaan sarana/prasarana dan fasilitas penunjang, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan industri, dan lembaga lain dalam dan luar negeri.
- r. Meningkatkan perluasan kesempatan belajar di perguruan tinggi melalui perluasan pemberian beasiswa prestasi, beasiswa kerja, dan kredit mahasiswa, pemberian keringanan dan penerapan SPP secara proporsional; penelusuran calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dari keluarga kurang mampu; perluasan kapasitas program S1 dan diploma bidang sains dan teknik; pembukaan program studi/jurusan/fakultas/politeknik secara terkendali; penyebaran perguruan tinggi di kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu; dan penambahan sarana-prasarana dan fasilitas penunjang.
- s. Meningkatkan peran perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi agama (PTA), dan partisipasi perguruan tinggi luar negeri dalam meningkatkan daya tampung secara terkendali, mutu, dan relevansi, melalui pemantapan sistem perencanaan, peningkatan kualitas tenaga akademik, deregulasi penyelenggaraan, penentuan persyaratan bidang studi, pengembangan kurikulum dan program pengajaran

serta peningkatan kerja sama antar lembaga perguruan tinggi, dunia usaha, kalangan industri, dan lembaga lain dalam dan luar negeri.

- t. Menciptakan suasana kehidupan dan memantapkan ketahanan kampus sebagai tempat belajar yang kondusif bagi keberhasilan proses pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) melalui peningkatan kemampuan pemecahan masalah secara kreatif, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengembangkan pembinaan motivasi untuk belajar dengan landasan moral dan etika, serta mengacu kepada kepentingan masa depan bangsa.
- u. Meningkatkan mutu, profesionalisme serta memperbaiki citra, harkat, martabat, serta upaya memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (guru, pamong belajar, tenaga pelatih, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya), termasuk kebutuhan akan guru fisika, kimia, biologi, matematika, melalui penegakkan disiplin, pengembangan kreativitas dan keteladanan, evaluasi kinerja dan peningkatan kualifikasi, perbaikan metode penataran, peningkatan kesejahteraan, pembinaan karier, peningkatan keterpaduan dalam pengadaan, penempatan dan penyebaran, pemberian penghargaan kepada tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil, pemberdayaan fungsi, tujuan, dan mutu kelembagaan, serta koordinasi pendidikan prajabatan dan dalam jabatan.
- v. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menuntaskan program Wajar Dikdas 9 Tahun melalui penyelenggaraan

program pendidikan tenaga kependidikan yang bermutu dan tepat kualifikasi, menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat peningkatan kemampuan (*upgrading*) bagi para guru dan tenaga kependidikan lain, implementasi transformasi kelembagaan beberapa IKIP, pengembangan kepada masyarakat.

- w. Meningkatkan kemampuan dan keterpaduan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang bermutu, tepat jumlah, dan kualitas melalui pemantapan, sistem seleksi, pelaksanaan pendidikan, penempatan dan pembinaannya; meningkatkan program pendidikan tenaga kependidikan yang lebih fleksibel dan terkendali; pengadaan sarana/prasarana dan fasilitas penunjang pendidikan; serta meningkatkan kerja sama LPTK dengan sekolah dan lembaga lain.
- x. Mempercepat penuntasan pemberantasan buta aksara dengan gerakan nasional, melalui Kejar Paket A Fungsional, peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Kejar Paket A setara SD, serta Kejar Paket B setara SLTP dalam menunjang Wajar Dikdas 9 Tahun yang diikuti dengan percepatan sosialisasi kesetaraan kepada masyarakat, serta pengembangan berbagai jenis pendidikan luar sekolah dengan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan yang ada.
- y. Meningkatkan jumlah peserta dan mengembangkan program pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan

- kewirausahaan, untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui perluasan beasiswa, magang, peningkatan mutu profesional lembaga kursus yang distandardisasi dan diakreditasi, pengembangan model pembelajaran, peningkatan mutu tenaga kependidikan, pelatihan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.
- z. Memantapkan dan meningkatkan pembinaan anak, remaja, dan generasi muda agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, kedisiplinan kejujuran, akhlak mulia, wawasan yang luas, dan budi pekerti luhur, memiliki keahlian dan keterampilan, jiwa kepeloporan, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan dalam menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi rakyat sebagai upaya mendukung pengentasan kemiskinan, serta pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan penularan HIV/AIDS.
  - aa. Meningkatkan peran wanita dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan wawasan kemitrasejajaran di samping kodratnya sebagai istri dan ibu yang memiliki etika dan moral dalam pembinaan anak usia dini, melalui program pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan keahlian, serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
  - ab. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai upaya peningkatan kesegaran jasmani masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, melalui pembentukan klub dan kelompok berlatih olahraga, pembinaan pusat

pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar/mahasiswa, serta pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan penelitian, dan penataran bagi tenaga keolahragaan.

- ac. Meningkatkan pelestarian kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan yang dinamis, yang mengandung unsur-unsur budaya yang diwarisi dari masa lalu dan yang diciptakan pada masa kini, melalui penggalangan kebudayaan nasional, pengkajian kebudayaan suku-suku bangsa, peningkatan interaksi budaya antar pemuda dan antar generasi, peningkatan daya saing industri budaya dan peningkatan penyebaran informasi budaya yang berwawasan kebangsaan, serta peningkatan fungsi dan manfaat kekayaan budaya bangsa.
- ad. Melestarikan bahasa daerah, memantapkan kedudukan, peran, dan mutu pendidikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara di kalangan masyarakat termasuk di semua jalur pendidikan melalui penelitian, pemekaran kosakata dan peristilahan, pembakuan kaidah bahasa dan mengoptimalkan fungsinya sebagai alat konseptualisasi, ekspresi dan komunikasi. dan meningkatkan upaya penggunaan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dalam pergaulan internasional.
- ae. Meningkatkan prestasi budaya bangsa Indonesia di forum internasional dalam bidang ilmu-ilmu budaya melalui kegiatan diskusi dan seminar serta bidang karya seni dan produk-produk industri budaya lain melalui kegiatan pergelaran, pameran, lomba, dan festival.

- af. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang budaya pada jajaran pemerintah melalui pemantapan pengadaan dan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu dan profesionalisme.
- ag. Meningkatkan konsolidasi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penyesuaian bahan perumusan kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan jangka menengah dan jangka panjang melalui penelitian dampak dan epilog krisis terhadap pendidikan, penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan, penyempurnaan sistem pengujian dengan pendekatan keluaran (*output*), pengembangan informatika dengan fokus penyajian data yang akurat dan tepat waktu, pemanfaatan media pengajaran melalui pengembangan teknologi komunikasi, dan pengembangan inovasi pendidikan melalui model-model pembelajaran yang bermakna.
- ah. Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat nasional dan internasional dalam bidang pengembangan indikator pendidikan, penelitian dampak krisis, inovasi pendidikan, dan pengujian hasil belajar siswa, serta meningkatkan pemasyarakatan dan penyebarluasan hasil-hasilnya.
- ai. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan melekat, memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan pendekatan komprehensif dan standar audit pemerintahan, mengoptimalkan pendayagunaan hasil pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta mewujudkan

keterpaduan dan sinergi ketiga pengawasan tersebut untuk mendukung pencapaian program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan, terutama penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun.

- aj. Memantapkan sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan dengan mewujudkan keterpaduan antara pengawasan Inspektorat Jenderal dan aparat pengawasan di daerah, merintis penataan kelembagaan, memantapkan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait dan profesionalisme aparatur pengawasan, meningkatkan penertiban dan pembinaan disiplin aparatur, serta akuntabilitas kepemimpinan unit kerja di lingkungan departemen.
- ak. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan koordinasi pemantapan sistem perencanaan, pengendalian dan penilaian program dan penganggaran, pemberdayaan kemampuan tenaga perencana serta pengelola dan pendaya guna aset, pemantapan pemutakhiran, dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya, penyempurnaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan, peningkatan hubungan kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri, serta peningkatan kinerja kegrafikaan dan perbukuan.
- al. Meningkatkan dan memberdayakan peran dan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*) sebagai saluran informasi dalam mensosialisasikan dan memasarkan program, serta secara proaktif menyerap aspirasi dan

tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

am. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penataan kelembagaan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan meningkatkan kemampuan lembaga pengelola di daerah dengan mempertimbangkan pelaksanaan otonomi daerah melalui sistem manajemen strategis, peningkatan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis.

## **E. Pengarahan dan Sambutan Penutupan oleh Menko Kesra dan Taskin**

### **Proses Persidangan**

Sidang diawali dengan permohonan Sekretaris Jenderal kepada Menko Kesra dan Taskin setelah selesai menyampaikan laporan penyelenggaraan Rakernas; untuk memberikan pengarahan dan sekaligus menutup secara resmi Rakernas Depdikbud yang telah berlangsung sejak tanggal 17 Mei 1999. Pengarahan berlangsung ±25 menit dan diakhiri dengan menutup secara resmi Rakernas Depdikbud tahun 1999.

### **Butir-Butir Pokok Pengarahan**

1. Judul Pengarahan:

“Mencerahkan Kehidupan Intelektual, Estetis dan Mental,

Tumbuhkan dan Perkuat Nilai-nilai Kebangsaan, Budaya dan Agama?

2. Pengarahan ini didasarkan pada arahan Presiden dengan renungan saran-saran ***reformasi pendidikan*** kemungkinan pelaksanaannya, yaitu tentang Presiden menghendaki agar pendidikan benar-benar dapat mencerahkan kehidupan intelektual, estetis, dan mental peserta didik. Selain itu, pendidikan diharapkan juga mampu memberdayakan generasi muda, baik sebagai makhluk individu dengan kompetensi pribadinya, maupun sebagai makhluk sosial dengan kemampuan kemasyarakatannya; sehingga anak didik mempunyai kehidupan yang sehat dan efektif. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pendidikan dapat menumbuhkan dan menguatkan wawasan serta nilai-nilai budaya dan agama, yang tercermin dalam akhlak yang mulia.
3. Pendidikan merupakan ***sesuatu yang akhirnya harus menguntungkan anak didik***, yaitu generasi muda.
4. Ajakan Presiden untuk menyukseskan ***pendaftaran dini anak usia sekolah dasar, 7-15 tahun***, dengan berbagai kemudahan, memungkinkan anak-anak yang semula tidak mampu/miskin, mendapatkan kesempatan untuk dapat menunjukkan kemampuan dirinya sebagai kader pembangunan yang berkualitas.
5. Petunjuk Presiden agar sementara waktu sumbangan orang tua diminimalkan atau kalau bisa dihapuskan, hal ini dapat mendorong kesempatan untuk meningkatkan ***angka partisipasi kasar*** terutama partisipasi bagi anak keuarga miskin, untuk bersekolah akan menjadi lebih tinggi, tanpa

mengorbankan yang lainnya, bahkan tanpa memerlukan untuk membiayai pendidikannya.

6. Pesan Presiden tersebut harus ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh dengan memberi kesempatan sebanyak-banyaknya bagi anak-anak untuk bersekolah serta mempersiapkan anak didik tersebut sebagai kader pembangunan masyarakat masa depan.
7. Menurut Presiden, masyarakat masa depan yang dikehendaki adalah *masyarakat madani* yaitu masyarakat yang lebih demokratis, ditandai dengan kepastian hukum, egalitarian, berkeadilan, menghargai harkat kemanusiaan, menghormati kemajemukan budaya dalam kesatuan bangsa, yang kesemuanya dibingkai oleh nilai-nilai budaya dan agama. Masyarakat tersebut berkembang dalam suasana dinamika yang sangat cepat serta merupakan masyarakat teknologi dan informasi yang selalu berubah secara dinamik, serta selalu berada dalam suasana persaingan profesi dan siap menghadapi tuntutan akan pekerjaan yang bervariasi dan bisa berubah dengan cepat.
8. Untuk itu, anak-anak harus:
  - a. berada dalam suasana budaya bersaing antar sesamanya tetapi tetap dalam alam kebersamaan;
  - b. mempunyai kemampuan kewirausahaan;
  - c. bisa membaca lingkungan dan menangkap peluang;
  - d. mengubah hambatan menjadi kesempatan.
9. Kemampuan tersebut tidak hanya didapat di sekolah, tetapi harus dikembangkan sebagai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta pemberdayaan kemampuan dirinya dalam masyarakat.

10. Untuk itu, sekolah dan lembaga pendidikan harus bisa memberikan:
  - a. pengetahuan, keterampilan teknis, generik dan profesional;
  - b. kesempatan untuk *bergaul dengan* dan *mengambil pelajaran dari masyarakatnya sendiri* atau masyarakat maju yang lebih besar;
  - c. memperkenalkan dirinya kepada kemungkinan-kemungkinan masa depan yang lebih rumit untuk melatih kemampuan penyesuaian terhadap perubahan dan kemajuan teknologi.
11. Arah reformasi pendidikan menurut Presiden bahwa pendidikan nasional mempunyai visi dan misi jangka panjang untuk mengembangkan sistem dan organisasi yang lebih otonom, adaptif dan fleksibel, serta berwawasan global.
12. Di samping itu, kita juga harus bisa menjadikan keluarga dan masyarakat mampu memberikan bimbingan kepada anak untuk menyerap ilmu dan teknologi melalui berbagai saluran lain yang antara lain media massa atau pengalaman lapangan.
13. Selama ini telah dikembangkan reformasi di lingkungan sekolah berupa pembaharuan sekolah dan guru, kurikulum, serta segala dukungan yang diperlukan. Hal itu beda dengan reformasi berbasis keluarga yang harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan peran dan memberdayakan keluarga dan masyarakat yang harus mempunyai kemampuan manajemen untuk mengelola pendidikan di semua tingkatan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan *renungan*

***pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk mampu menjadi pengelola pendidikan masyarakat.***

14. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, seluruh kekuatan pembangunan dapat menjadi komponen yang integral dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan corak budaya dan kondisi daerah yang majemuk di Indonesia.
15. Hal lain yang diimbau perlu mendapat perhatian oleh Menko Kesra dan Taskin adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk mencintai sekolah dan menjadikan sekolah sebagai pusat pemberdayaan bangsa. Untuk itu, dianjurkan oleh Menko agar gedung-gedung sekolah dijadikan tempat berkumpul, tempat berlatih dan bersekolah para orang tua, terutama yang belum pernah bersekolah, untuk mempelajari hal-hal baru dan atau menerapkan ilmu dan teknologi baru secara sederhana.
16. Pada tingkat pendidikan tinggi, telah dimintakan bantuan Presiden bagi anak-anak keluarga miskin lulusan SMU yang mempunyai nilai di atas rata-rata (khususnya Matematika dan Bahasa Inggris) serta tinggal di desa yang jauh dari universitas, untuk mengikuti ujian masuk PTN (UMPTN) dan telah disetujui untuk diberikan ongkos jalan bagi 20.000-30.000 anak. Bagi anak yang lulus UMPTN akan diupayakan beasiswa dari berbagai sumber (yayasan, JPS, dan lain-lain). Untuk para guru, sedang diperjuangkan perbaikan nasibnya dan diupayakan mendapat kesempatan belajar serta bagi yang mempunyai anak yang masih melanjutkan pendidikan mendapatkan keringanan dengan beasiswa yang memadai.

**Perpustakaan  
Jenderal Ke**

353  
DE  
d